

AHMAN SYA | FARID SAID

PENGANTAR EKOWISATA

AHMAN SYA | FARID SAID

PENGANTAR EKOWISATA

PARAMEDIA
KOMUNIKATAMA

PENGANTAR EKOWISATA

Penulis: Ahman Sya dan Farid Said
©2020 by Ahman Sya dan Farid Said

©Penerbit Paramedia Komunikatama
Jl. Suryalaya Barat I No. 4C Bandung
Jawa Barat 40265

Penyunting: Rindi Antika Sari, Gugun Gunardi
Tata letak: A. Saeroji

Foto sampul: Gunung Rinjani
Sumber: <http://rinjaninationalpark.com>

Diterbitkan pertama kali oleh
Paramedia Komunikatama
Anggota IKAPI, Jawa Barat, 2020.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-623-91830-6-6 (PDF)

Isi diluar tanggung jawab percetakan.

Sambutan: Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Seraya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku Pengantar Ekowisata yang disusun oleh saudara Ahman Sya dan saudara Farid.

Buku ini diharapkan menjadi salah satu referensi dan rujukan bagi pengembangan dan pembangunan ekowisata di Indonesia, sebagai bagian dari wisata alam yang sangat potensial dan beraneka ragam.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dihuni oleh kurang lebih 271 juta penduduk (2020), 525 suku bangsa, dan 250 bahasa daerah. Terbentang dari Sabang (sebelah Barat) sampai Merauke (sebelah Timur), dan dari Miangas (sebelah Utara) sampai Pulau Rote (sebelah Timur), dengan luas kurang lebih 8,3 juta kilometer persegi. Pulau-pulau Indonesia memiliki luas sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Indonesia, sedangkan sisanya adalah lautan (70%). Kondisi ini

menjadikan nusantara dijuluki sebagai negara bahari yang kaya akan potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan sebagai hasil kreasi dan inovasi penduduknya. Oleh karena itu, kebijakan Presiden RI Bapak Joko Widodo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Bapak Wishnutama pada Kabinet Indonesia Maju, sangatlah tepat ketika menempatkan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini didukung oleh berbagai sumberdaya yang memadai dan peran penting pemerintah dalam hal regulasi, fasilitasi, dan pendukungannya.

Ke depan, peran dan fungsi ekowisata diprediksi akan menjadi bagian yang sangat penting dalam pariwisata yang berkualitas. Hal ini disebabkan bukan hanya karena wisatawan yang khusus dan berasal dari kelompok menengah ke atas, namun juga latar belakang pengetahuan dan pendidikan wisatawan itu sendiri yang cukup memadai. Dengan demikian, ekowisata sebagai pariwisata yang berbasis ekologi akan lebih maju dan berkembang karena sekaligus berfungsi dalam optimalisasi konservasi, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Para akademisi dalam kiprahnya diharapkan dapat seiring dan sejalan dengan pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pembangunan ekowisata ini, agar prinsip dasar pembangunan pariwisata yang *pro-job, pro-poor, pro-growth,* dan *pro-environment,* yang melandasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud secara bersama-sama.

Terimakasih.

Jakarta, 17 Agustus 2020

Sekretaris Kemenparekraf RI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ni Wayan Giri Adnyani', written over a large, faint, oval-shaped watermark or background mark.

Ni Wayan Giri Adnyani

Kata Pengantar

Puji syukur dipersembahkan ke Hadirat Alloh SWT, atas berkah dan ridhonya sehingga penulisan buku ekowisata dapat diselesaikan. Tujuan utama penulisan buku ini adalah memberikan kontribusi berupa ide dan pemikiran pada pembangunan bidang pariwisata di Indonesia khususnya ekowisata, yang dalam beberapa tahun terakhir telah diposisikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini tentu memiliki alasan yang kuat, di antaranya adalah karena pariwisata memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kepeduliannya terhadap lingkungan, yang didukung oleh potensi alam, budaya, dan buatan yang melimpah.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas 17.504 pulau, dihuni oleh 525 suku bangsa, dan 271 juta penduduk (2020). Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki potensi dan modal dasar dalam pembangunan pariwisata yang luar biasa, baik pariwisata alam, budaya, maupun buatan. Apabila keadaan

ini dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka sektor pariwisata bagi Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber devisa utama dan solusi bagi memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

Ekowisata adalah bagian dari pariwisata alam, yang berbasis pada ekologi dan mengedepankan keserasian dan keseimbangan hubungan antara individu dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata bagi Indonesia adalah keniscayaan, yang akan berdampak pada kesejahteraan penduduknya, namun lingkungan alam tetap terjaga. Prinsip dasar ekowisata adalah “semakin dilestarikan semakin menyejahterakan”, yang dipayungi oleh *conformity and commitment* semua pihak, baik akademisi, bisnis/industri pariwisata, pemerintah, masyarakat, maupun media.

Keterlibatan kaum intelektual di perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi pariwisata, sangat diperlukan. Karenanya, penguasaan pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan oleh masyarakat perguruan tinggi (terutama dosen dan mahasiswa) akan menjadi bekal utama memperkokoh fondasi kepariwisataan.

Buku ini, diharapkan akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi tumbuhnya inovasi dan kreativitas pengembangan pariwisata (khususnya ekowisata) yang diinisiasi oleh kalangan para dosen maupun mahasiswa sebagai kader kepariwisataan masa depan.

Kami menyadari bahwa dalam buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Berbagai kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, untuk perbaikannya di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak terutama Kemenparekraf RI, yang telah memungkinkan buku ini terbit. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pariwisata Indonesia kini dan masa yang akan datang, serta menjadikan pariwisata Indonesia sebagai motor penggerak pembangunan nasional untuk maju dan sejahtera.

Lombok, 17 Agustus 2020

Penulis,

AHMAN SYA

FARID SAID

Daftar Isi

Sambutan Sesmen Kemenparekraf RI	iii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	1
A. Sejarah Ekowisata	1
B. Manfaat Ekowisata	4
C. Prinsip Ekowisata	7
D. Karakteristik Ekowisata	9
E. Definisi Ekowisata	10
Bab II Destinasi Ekowisata di Indonesia	14
A. <i>Wonderful</i> Indonesia	15
B. <i>Welcome to wonderfully wonderful</i> Indonesia	16
C. Sumatra	23
D. Jawa	33
E. Bali & Nusa Tenggara	47
F. Kalimantan	54
G. Sulawesi, Maluku & Papua	58
Bab III Pasar Ekowista	73
A. Segmen Pasar	78
B. Unsur Pasar Ekowisata	80

Bab IV Kesadaran Lingkungan	82
A. Gambaran Mental	83
B. Peta Mental (Peta Kognitif)	84
C. Peta Kognitif dan Rencana	90
D. Persepsi dan Kognisi	92
Bab V Ekowisata dan Demografi	97
Bab VI Geografi dan Ekowisata	100
Bab VII Peran NGO dalam Ekowisata	105
Bab VIII Peran CBETM, Perempuan, dan Masyarakat Adat	112
A. CBETM	112
B. Peran Perempuan	115
C. Masyarakat Adat	117
Bab IX Ekowisata Maritim	119
A. Model Pengembangan Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan	128
B. Analisis Pasar dan Pemasaran Ekowisata Bahari	164
Bab X Penutup: Ekowisata dan Industri	173
A. Pendahuluan	174
B. Tautan dalam Rantai Pariwisata	176
C. Operator Perjalanan Pribadi Dalam Proses Perencanaan	179

Daftar Pustaka	181
Biodata Penulis	189
Lampiran	197

Daftar Gambar

Gambar 0: Curug Cimarunjung – Geopark Ciletuh	xiv
Gambar 1: Bukit Lawang	23
Gambar 2: Mount Leuser national park	25
Gambar 3: Kerinci-Seblat national park	28
Gambar 4: Siberut national park	29
Gambar 5: Way Kambas national park	31
Gambar 6: Ujung Kulon national park	33
Gambar 7: Mt. Halimun-Salak national park	35
Gambar 8: Mount Gede-Pangrango national park	38
Gambar 9: Merapi	39
Gambar 10: Bromo-Tengger-Semeru national park	40
Gambar 11: Ijen plateau	42
Gambar 12: Baluran national park	43
Gambar 13: Alas Purwo national park	45
Gambar 14: Bali Barat national park	47
Gambar 15: Mount Rinjani	49
Gambar 16: Kelimutu Crater Lakes	51
Gambar 17: Komodo marine national park	52
Gambar 18: Derawan-Sangkalaki	54
Gambar 19: Tanjung Putting national park	56
Gambar 20: Selayar-Takabonerate	58
Gambar 21: Bunaken marine national park	60
Gambar 22: Tangkoko Duasaudara reserve	61
Gambar 23: Togeian islands	63
Gambar 24: Banggai islands	64
Gambar 25: Wakatobi marine national park	66
Gambar 26: Toraja	68
Gambar 27: Seram-Sawai	70

Gambar 28: Raja Ampat islands	72
Gambar 29: Sustainable Development Goals	75
Gambar 30: Portrfolio strategi kepariwisataan	76
Gambar 31: Strategi pemasaran pariwisata	78
Gambar 32: Ecotourism as a market segmen	81
Gambar 33: Visitor was Diving and Snorkling	128
Gambar 34: Aspek-aspek dalam Ekowisasta	162
Gambar 35: Hamparan mangrove di Kepulauan Tanakeke Kabupaten takalar Sulsel	164
Gambar 36: Struktur Industri Pariwisata	179

Gambar 0: Curug Cimarunjung – Geopark Ciletuh



Bab I

Pendahuluan

A. Sejarah Ekowisata

Aktivitas Ekowisata (*ecotourism*), menurut sejarahnya diawali di Kenya Afrika tahun 1970-an. Waktu itu dikenal sebagai wisata mewah dan rekreasi mahal, karena kegiatannya adalah berburu satwa liar. Mereka yang berhasil mendapat hewan buruan, akan dihargai dengan nilai yang fantastis. Pada tahun 1976, Gerardo Budowski mengusulkan penggabungan wisata alam dan konservasi sebagai satu kesatuan. Kemudian, Hector Ceballos-Lascurain (1987) mengemukakan bahwa ekowisata adalah perjalanan ke tempat-tempat yang masih alami dan relatif belum terganggu atau tercemari, yang bertujuan untuk mempelajari mengagumi dan menikmati pemandangan, flora dan fauna, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, sejak masa lampau sampai masa kini (*RimbaKita.com*, 26 April 2020, pukul 12.59).

Ekowisata mulai diketahui masyarakat umum setelah dipublikasikan oleh *The International Ecotourism*

Society/TIES (1990), dengan kegiatan utamanya adalah wisata alam yang bertanggung jawab dalam menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (*Ibid*). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga langsung ikut terlibat, dan kemudian menunjuk Costa Rica sebagai *pilot project* ekowisata pertama di dunia dengan melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan badan lingkungan hidup internasional. Proyek ini dianggap berhasil dan menjadi contoh untuk ekowisata dunia (*Ibid*).

Di Indonesia, ekowisata diperkenalkan oleh beberapa biro perjalanan wisata asing tahun 1980-an, salah satunya *Mountain Travel Sobek*. Biro perjalanan wisata ini membuat kegiatan pendakian gunung api aktif tertinggi (gunung Kerinci), pendakian danau vulkanik tertinggi kedua di dunia (Danau Gunung Tujuh), dan kunjungan ke danau vulkanik terbesar di dunia (Danau Toba). Kegiatan ekowisata ini secara yudis formal mendapat dukungan penuh dari pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisata.

Selanjutnya, dalam konsep yang lebih umum dan luas, ekowisata memiliki makna sebagai pariwisata berbasis

ekologi atau pariwisata yang berwawasan lingkungan. Perhatian utama ekowisata bukan semata-mata bersenang-senang (*having fun*) atau mengisi waktu luang (*leisure*), akan tetapi membawa para wisatawan untuk dekat dengan alam lingkungan, memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kecenderungan untuk bertindak (*trend to action*) yang sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Upaya untuk menjaga keserasian dan keseimbangan hubungan antara makhluk hidup dengan alam lingkungan, menjadi ciri khas dalam ekowisata. Karena itu, bentuk kegiatan pada ekowisata memiliki konten yang luas, bukan saja bersenang-senang dan mengisi waktu luang sambil menikmati keindahan sebagaimana dikemukakan di atas, akan tetapi juga meliputi *learning by doing* (belajar sambil berbuat sesuatu) untuk kepentingan diri dan lingkungan alam yang dikunjunginya.

Prinsip dasar ekowisata selanjutnya berkembang sangat pesat, yaitu sebagai wisata berbasis alam yang mencakup pendidikan dan perlindungan (konservasi) alam lingkungan, yang dikelola dengan mengedepankan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Beberapa ahli mendefinisikan bahwa

ekowisata pada dasarnya adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial budaya, dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam di sekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal (*Ibid*). Oleh karenanya, ekowisata juga dianggap sebagai bagian dari konservasi yang dapat memberi manfaat ganda (*multiplier effect*), baik bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat maupun perlindungan terhadap alam lingkungan.

B. Manfaat Ekowisata

Segala sesuatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupannya di ruang permukaan bumi atau alam lingkungan, baik yang terjadi karena relasi, interelasi, interaksi, maupun interdependensinya, selalu memberikan manfaat tersendiri. Demikian halnya dengan ekowisata, yang berdampak pada berbagai aspek yaitu konservasi, pemberdayaan dan pendidikan lingkungan. Dikutip dari www.lingkunganhidup.co (30 April 2020, pukul 16.56), manfaat ekowisata di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Konservasi. Kegiatan ekowisata dan satwa yang terancam punah sangatlah erat, bahkan bersifat positif sebagaimana studi yang dilakukan oleh Griffith University. Wisata yang berkorelasi positif dengan konservasi, berarti memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman hayati, budaya, melindungi warisan alam serta budaya di planet bumi.
2. Pemberdayaan ekonomi. Ekowisata melibatkan masyarakat lokal berarti meningkatkan kapasitas, dan kesempatan kerja masyarakat lokal. Konsep ekowisata adalah cara yang efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal di seluruh dunia untuk melawan kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
3. Pendidikan lingkungan. Ekowisata adalah kegiatan wisata yang melibatkan pendidikan lingkungan, yang berarti kegiatan wisata ini memperkaya pengalaman dan kesadaran lingkungan melalui berbagai interpretasi. Kegiatan ini di dalamnya mempromosikan pemahaman, penghargaan yang utuh terhadap alam, masyarakat, dan budaya setempat (lokal).

Dari ketiga jenis komponen penting di atas, belum berarti secara otomatis setiap perjalanan wisata alam akan merupakan aktivitas ekowisata. Hal ini akan sangat tergantung pada banyak hal, di antaranya jenis destinasi yang dikunjungi, kepiawaian pemandu wisata, waktu lama kunjungan, daya dukung selama perjalanan wisata, dan lain-lain. Lokasi (destinasi) ekowisata di Indonesia terdapat di (1) Pulau Sumatera: Bukit Lawang, *Mount Leuser National Park*, Kerinci-Seblat *National Park*, Siberut *National Park*, Way Kambas *National Park*, (2) Pulau Jawa: Ujung Kulon *National Park*, *Mount Halimun-Salak National Park*, *Mount Gede-Pangrango National Park*, Merapi, Bromo-Tengger-Semeru *National Park*, Ijen Plateau, Baluran *National Park*, dan Alas Purwo *National Park*, (3) Bali dan Nusa Tenggara: Bali Barat *National Park*, *Mount Rinjani National Park*, Kelimutu Crater Lakes, Komodo Marine *National Park*, (4) Kalimantan: Derawan-Sangkalaki, Tanjung Puting *National Park*, (5) Sulawesi, Maluku dan Papua: Selayar-Takabonerate, Bunaken Marine *National Park*, Tangkoiko Duasaudara Reserve, Togeans Islands, Wakatobi Marine *National Park*, Toraja, Seram-Sawai, Raja Ampat Islands.

C. Prinsip Ekowisata

Prinsip dasar ekowisata adalah mengatur untuk menyatukan konservasi lingkungan hidup, pengembangan masyarakat, dan kegiatan wisata yang berkelanjutan sehingga berjalan beriringan. Hal ini menuntut para pihak yang melaksanakan dan berpartisipasi dalam ekowisata harus menjalankan kriteria dan prinsip sebagai berikut:

1. Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis.
2. Membangun kesadaran lingkungan, budaya, dan rasa hormat.
3. Memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah.
4. Memberikan manfaat keuangan langsung bagi konservasi atau pelestarian lingkungan hidup.
5. Menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal, industri, dan swasta.
6. Memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan bagi pengunjung untuk meningkatkan sensitivitas terhadap iklim politik, lingkungan dan sosial tempat tujuan wisata.

7. Membangun, mengoperasikan fasilitas atau infrastruktur dengan meminimalkan dampak lingkungan.
8. Mengakui hak-hak, keyakinan spiritual komunitas adat, budaya, dan memberdayakan mereka.

Dari ketujuh kriteria dan prinsip di atas, menunjukkan bahwa dalam penanganan ekowisata, sangat diperlukan implementasi pendekatan integratif antara akademisi, bisnis/industri pariwisata, pemerintah, masyarakat dan media, sehingga misi ekowisata sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan baik. Hal ini, di dalamnya mencakup aspek konservasi, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berada di sekitar destinasi ekowisata tersebut. Dengan kata lain, ekowisata bukan semata-mata mewujudkan aspek pariwisata sebagai rekreasi, akan tetapi pariwisata yang bertanggung jawab, baik terhadap alam maupun manusia yang ada di sekitarnya dengan segala aspek dan karakteristiknya holistik).

D. Karakteristik Ekowisata

Menurut Honey (1990), ekowisata yang nyata (sejati) memiliki tujuh karakteristik, yaitu: (1) melibatkan perjalanan ke destinasi-destinasi alami, (2) meminimalkan dampak, (3) membangun kesadaran lingkungan, (4) memberikan keuntungan keuangan secara langsung bagi pemeliharaan, (5) memberikan keuntungan keuangan dan pemberdayaan masyarakat lokal, (6) menghormati masyarakat lokal, dan (7) mendukung hak azasi manusia dan gerakan demokrasi (dalam *google.co.id*, tanggal 3 Mei 2020 pukul 13.43).

Dari semua karekteristik ini, jelas tergambar bahwa ekowisata mengandung pesan sebagai wisata yang *back to nature* tanpa melupakan peran dan fungsi manusia yang ada dan hidup di atasnya. Bahwa alam lingkungan perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya adalah penting. Namun manusia yang ada harus sejahtera. Dengan demikian hubungan timbal balik antara manusia dengan alam lingkungan diupayakan sebaik mungkin dan seideal mungkin. Hal ini dimaksudkan agar keserasian, keseimbangan, dan kenyamanan kehidupan terwujud karena alam senantiasa berperan untuk menjadi penyedia berbagai kebutuhan hidup manusia dan manusia berada

pada posisi yang “tahu diri” memperlakukan alam lingkungan. Tidak semena-mena dan tidak berlebihan.

Bagi masyarakat yang tahu dan taat menjalankan agama yang dianutnya (khususnya Islam), prinsip dasar ekowisata ini sangat erat kaitannya dengan ajaran agama itu sendiri. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan berbagai fasilitas di alam lingkungan untuk manusia, namun manusia diperintahkan untuk tidak berlebihan, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, menurut pemahaman para pemuka agama dan juga penganut teori positivisme, berbagai kerusakan di muka bumi ini sebagian besar diakibatkan oleh perilaku dan atau perbuatan manusia itu sendiri. Maka dari itu, bentuk-bentuk pengendalian diri dari setiap pribadi manusia dalam mengeksploitasi alam lingkungan sangatlah penting.

E. Definisi Ekowisata

Berikut ini adalah beberapa definisi ekowisata yang dikemukakan oleh para ahli. Tentu saja satu sama lain ada perbedaan, namun dari semua itu ada benang merah yang mengacu para konten dan konteks yang sama.

1. Menurut Latupapua (Muchlisin Riadi, 2019), ekowisata merupakan istilah dan konsep yang menghubungkan antara pariwisata dengan konservasi. Ekowisata merupakan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan merupakan jenis wisata yang mengutamakan tanggung jawab wisatawan terhadap lingkungan.
2. Suprayitno (2008), menyatakan bahwa ekowisata merupakan suatu model wisata alam yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah yang dikelola secara alami yang memiliki tujuan untuk menikmati keindahan alam dengan melibatkan unsur pendidikan serta dukungan terhadap usaha konservasi dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat.
3. Fennel (1999), menyebutkan bahwa ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
4. Page dan Ross (2002), mengemukakan bahwa ekowisata adalah kegiatan perusahaan wisata yang dapat memberikan banyak manfaat, seperti sumber

pendanaan bagi kawasan konservasi, perlindungan kawasan konservasi, alternatif sumber mata pencaharian masyarakat lokal, pilihan untuk mempromosikan konservasi, dan dorongan upaya konservasi secara khusus.

5. Muntasib (2007), mengartikan bahwa ekowisata merupakan kegiatan pemanfaatan jasa keanekaragaman hayati tanpa mengganggu keanekaragaman hayati itu sendiri, sehingga dapat dijadikan alternatif pelestariannya (kajianpustaka.com, 26 Juni 2020, jam 03.22).
6. Megan Elper Wood (2002:7), mengemukakan bahwa *“ecotourism is defined by its sustainable development results: conserving natural areas, educating visitors about sustainability, and benefiting local people”*. Namun demikian, dalam implementasinya Wood mengingatkan bahwa *“putting ecotourism on a truly sustainable path is a major challenge, requiring partnership and cooperation between the tourism industry, governments, local people and the tourists themselves”*.

7. Ahman Sya (2019) dalam bukunya Geografi Pariwisata, menjelaskan bahwa ekowisata adalah pariwisata berbasis ekologi, yang mengedepankan keserasian hubungan timbal balik (relasi, interelasi, interaksi, dan interdependensi) antara manusia dengan alam lingkungan, sehingga memberikan keuntungan bersama kepada manusia itu sendiri maupun lingkungan tempat tinggalnya. Keuntungan dimaksud dapat berupa keuntungan materi dan imateri yang pada intinya diperlukan oleh alam, manusia, maupun makhluk hidup lainnya.

Bab II

Destinasi Ekowisata di Indonesia

Indonesia memiliki banyak destinasi ekowisata, baik yang berlokasi di pegunungan, perbukitan, dataran rendah, maupun pantai, pesisir, dan atau lautan. Semua ini tersebar di pulau-pulau yang ada di nusantara seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Berikut ini diuraikan gambaran singkat tiap destinasi itu (dalam bahasa Inggris), dan juga informasi tentang kapan waktu terbaik kalau berkunjung ke destinasi tersebut beserta kontak yang bisa dihubungi.

Seluruh informasi destinasi ekowisata di Indonesia ini merupakan media promosi yang disusun dan dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Ahman Sya, 2012), yang kemudian diperbaharui oleh penulis. Saat itu, ekowisata di Indonesia mulai secara gencar disosialisasikan dan dipublikasikan kepada banyak kalangan di Indonesia, ASEAN, Asia, maupun dunia, sebagai destinasi wisata yang berbasis ekologi dengan berbagai karakteristiknya.

A. Wonderful Indonesia

Sprawled over 5.000 km from east to west along the equator in the eastern hemisphere, Indonesia is the fourth most populous country and largest archipelago in the world, comprising 17.504. With a total land mass of 1.919.440 square kilometers, Indonesia is also the most densely forested region in the world and supports the world's highest level of biodiversity after the amazon.

Administratively divided into 34 provinces on the 5 major islands of Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi and Papua. Indonesia offers visitors though the world a mind-boggling array of reasons to visit and experience, explore and be mesmerized by the multitude of sight and sound, tourist destination, natural endowments, cultural and traditional heritage and all her unique attractions some of which are not found elsewhere in the world.

Some of the attractions include thousands of species of flora and fauna, animals and birds as well as the endangered endemic species that are carefully being protected from extinction. Indonesia also has the richest volcanic alluvial soils and a tropical climate that is perfect for the growth and numerous medicinal plants, spices and herbs

that are already well-known which are attributed to the existence of more than 400 volcanoes sprinkled throughout the archipelago. The country's variety of ecosystem and natural habitat have also become the targets of research project that have resulted in new natural environmental discoveries.

Hence, Indonesia's size, tropical climate, and archipelagic geography offers plenty of reasons why millions of visitors around the world with diverse interests visit her shores for an experience of a lifetime.

B. Welcome to Wonderfully Wonderful Indonesia

1. Your Tropical Rendezvous.

In a setting of lush greenery, sun, sea, and sand Indonesian being in the tropics brings with it to seasonal climatic changes about by the eastern monsoon from June to September that is the dry season. The western monsoon from December till March is the wet season. Intermittent showers occur during the transition between the two seasons. Heaviest rainfall is between the months of December and January, and temperatures

range from 21⁰C (75⁰F) to 3⁰C (90⁰F) except at higher altitudes which are much cooler. Humidity is 70-100 %.

2. Color Custom Language And More.

Indonesia's long stories brings with it a myriad of cultural and traditional attributes that has spawned over for 250 language and dialect belonging to more than 525 ethnic groups. Bahasa Indonesia is the official national language which use the Roman alphabet. English language is widely spoken particularly in the main tourist belts and is the primary written and oral foreign language used.

3. Savor and indulge.

Let your taste buds savor and indulge in Indonesian cuisines. Each region has its own specialties which might consist of particular vegetable, soy bean, chicken, fish, beef and other varieties of ingredients, combination and methods of cooking. Coconut oil and milk are widely used in Indonesian cooking along with spices and chili pepper. Fish, eaten fresh, dried, salted or smoked, is featured in almost all regional cuisines. Sumatrans use more meat and are well known their ricg spicy dishes. In west Sumatra, restaurants specializing is

west Sumatran cuisine called Padang restaurants are famous for their unique way of serving food.

Favorite local delicacies include: Sate, or Satay (grilled chicken, beef or goat meat), Gado-Gado (cooked vegetable salad with peanut sauce), Nasi Goreng (fried rice), and Bakmi Goreng (fried noodles) are found everywhere and eaten at anytime of the day.

Year around sunshine and warm climate make for an abundance of tropical and sub-tropical fruits and vegetables. Some of the best coffee and tea are grown in the plantations in Sumatra and Java. Alcoholic drinks are available in the form of beer, brem (from Bali), and a local brew call Tuak from Toraja and North Sumatera.

4. Our Welcoming Procedure.

All visitors to Indonesia must be in possession of a passport valid for at least 6 monts from date of arrival and have proof of onward or return passage. Immigration authorities provide Free Visas for tourist valid for 30 days for nationals from 169 countries (since 2016): Afrika Selatan, Albania, Aljazair, Amerika Serikat, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain,

Bangladesh, Barbados, Belarusia, Belanda, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia ang Herzegovina, Bostwana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Ceko, Chad, Chili, Denmark, Dominika (persemakmuran), Ekuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Filipina, Finlandia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Hongkong (SAR), India, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kazakhstan, Kenya, Kepulauan Marshall, Kepulaua Solomon, Kiribati, Komoro, Korea Selatan, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liechthenstein, Lithuania, Luksemburg, Macao (SAR), Madagaskar, Makedonia, Maladewa, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mesir, Moldova, Monako, Mongolia, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nikaragua, Norwegia, Oman, Palu, Palestina, Panama, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republik Dominika, Romania, Rusia, Rwada, Saint Kitts dan Navis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadis, Samon, San Marino, Sao Tome dan

Principe, Selandia Baru, Senegal, Serbia, Scyhelles, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Swedia, Swiss, Taiwan (Chinese Taipei), Tajikistan, Tahta Suci Vatikan, Tanjung Verde, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Tiongkok, Uzbekistan, Vanualu, Venezuela, Vietnam, Yordania, Yunani, Zambia, Zimbabwe (<http://www.imigrasi.go.id>). *Please check with the Indonesian embassy or consulate in your home country before departure. For further information log on to www.Indonesia.travel.*

5. *Great Attractions.*

Indonesia is a unique marine biodiversity that are as mind-boggling as its cultural, traditional and ethnic diversity. Situated on what experts call the Wallacea region, Indonesia has 28.000 flora species ranging from tiny rare orchids to the giant Rafflesia flower, and 3.500 species of animals, including the endangered giant Komodo Lizard, the horned Javan Rhinoceros and the endangered Sumatrans tigers.

6. *For Adventurous.*

There are 400 volcanoes to climb, of which more than a hundred of them are still active, week-long challenging trekking expeditions in the forest, offering one of the best surfing and diving locations in the world; world-class competition sites for rafting and unique paragliding spots.

7. *Living In Culture Diversity And Harmony.*

More than 525 ethnic groups keep alive over 250 local languages, but Indonesians are united by the national language of Bahasa Indonesia. Five main religions of Islam, Hinduism, Buddhism, Catholic and Protestant exist side by side with Muslims forming the majority of the population. This displays the nation's long history of tolerance and openness. Age-old customs in the lives of the indigenous tribes of West Papua co-exist in harmony with a post-modern culture. The country is populated with 267 million mainly occupying the five big islands of Java, Bali, Sumatera, Sulawesi (Celebes), and Kalimantan (Borneo).

8. *Ecotourism, an endowment of our heritage.*

Indonesia is the best way to enjoy unique wonders of nature and culture from the easily accessed sites of Bali and Java to the more remote forests of Sumatra, Borneo, Sulawesi and Eastern Indonesia. Visitors would also be pleasantly surprised that by choosing a responsible ecotourism product, you will also be able to contribute to the conservation of our natural and cultural heritage, and the well-being of your host communities.

All around the archipelago, a growing number of businesses, NGOs, community groups and local government units work together to make ecotourism a reality. In Halimun National Park (West Java), in Tangkahan near Gunung Leuser National Park (North Sumatra), around Mount Rinjani in Lombok, in the Toraja land of South Sulawesi, along the beaches and rice fields of Bali, in the marine Park of Komodo, and in the rainforest of Borneo, more and more communities are getting the economic benefits of ecotourism. With more and more income from ecotourists, people once engaged in illegal logging are now becoming the gatekeepers of the forests.

C. Sumatera

1. Bukit Lawang

Gambar 1: Bukit Lawang



Sumber: <https://www.pariwisatasumut.net/2019/03/bukit-lawang-di-bahorok-sumatera-utara.html>

a. Haven for the primates.

Opened in 1973, The Bukit Lawang Orang Utan Rehabilitation Center was established for the care of primates rescued from captivity, injured, or displaced through land clearing, and to assist them in readjusting to the wild again. Located in the vicinity of the Bukit Lawang village on the eastern banks of the Bahorok River, the center

is within reach of one of the most important reserves in Southeast Asia, the Gunung Leuser National Park.

In November 2003, Bukit Lawang was almost destroyed by flood. Since then, it has been rebuilt and a conservation education program introduced to increased awareness among tourists and the community. Environmentally friendly tourism facilities are now being developed following an integrated plan. Among the popular activities within the area are jungle trekking and tubing down the river.

b. Accessibility and directions.

Bukit Lawang is about 3-4 hours drive from Medan, the provincial capital of North Sumatra. You Should Visit the Months from June to October. Contact HPI (Himpun Pramuwisata Indonesia or Indonesian Guides Association), Bukit Lawang. Contact person: Agun (Mobile: 081375126275. Email: agunto@yahoo.com.

2. *Mount Leuser national park.*

Gambar 2: *Mount Leuser national park*



Sumber: <https://indonesiaexpat.biz/travel/the-bare-necessities-gunung-leuser/>

a. A Commitment to the preservation of our forest.

Natural attractions of what Tangkahan will offer visitors. Here, the clear bluish green water of the Batang Serangan and Buluh rivers converge, and are typical of rainforest streams with a diverse variety of vegetation and colorful rocks on their banks. Also winding through the park is the Alas river targeted by the rafters craving for an adrenalin pump. At least four of the world's rarest species: Tigers, rhinos, elephants and orangutans are still found at Gunung Leuser.

For years this area had suffered from extensive illegal logging. It was not until 2001 when illegal loggers ceased their activities and together with the rest of the community became involved in promoting the area for ecotourism, protecting the reserve from threats of illegal logging and poaching. Now, mounted rangers on elephants patrol the park and act as guides for tourists.

b. Accessibility and directions Tangkahan.

Located three hours from Medan, the provincial capital of North Sumatra, and is accessible by private cars or public transport from the Pinang Baris Bus Terminal. You should visit the months from June to October. Contact: Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) or Tangkahan Tourism Institution, Visitor Center, Kawasan Ekowisata Tangkahan (Tangkahan Ecotourism Area), Desa Namo Sialang, Tangkahan, North Sumatra. Mobile phone: 08126567432, 081361662387, 081361674113.

Email: tangkahan_ecotorurism@yahoo.com

3. Kerinci Seblat National Park.

a. Sumatra's pride and precious natural heritage.

Stretching across four the provinces of West Sumatra, Jambi, Bengkulu and South Sumatra that has become

Sumatra's pride and natural heritage possession is the Kerinci Seblat National Park, the largest national park in Sumatra and encompassing a large part of the Bukit Barisan Mountain range, the 13,791 sq. km park includes the second highest mountain in Indonesia, Mount Kerinci (3,805 meters), and the highest caldera lake in southeast Asia, Lake Gunung Tujuh, a huge lake 1,995 meters above sea level that is surrounded by primary rainforest and seven hills. The park also comprises hot springs, rapids, caves, and scenic waterfalls.

The park is also home to a diversity of flora and fauna, including the world's largest flower, the rafflesia. Arnoldi, and the plant with the largest unbranched inflorescence, the Titan Arum. Animals include Sumatran tigers, Sumatran rhinoceros, Sumatran elephants, Bornean clouded leopard, Malayan tapir, Malay sun bear and numerous bird species. Lake Kerinci is the best place to see the park famous bird life like the hornbills, banded broadbills and drongos.

Gambar 3: Kerinci-Seblat *National Park*



Sumber: <https://vacationspotindonesia.wordpress.com/2015/04/13/kerinci-seblat-national-park/>

b. *Accessibility and directions.*

From the provincial capital of West Sumatra, Padang, proceed to the town of Sungai Penuh, district of Kerinci, which is 7-8 hours away, or 278 km from Padang. Alternatively, start from the village of Kersik Tuo, which is a distance of 211 km from Padang or approximately a 5-6 hours drive. You should visit the months from January to October. Contact Kerinci Seblat national park, jalan Basuki Rahmat No. 11, Sungai Penuh 32112, Jambi 17101. Phone (0748) 22300 Email: bynks@pdg.wssso.net.id.

4. Siberut *National Park*.

Gambar 4: Siberut *National Park*



Sumber:

https://www.google.com/search?q=siberut+national+park&safe=strict&sxsrf=ALeKk01S8R6hFJ_BdbOTbvowT6BiaQpKBA:1593525155305&source=Inms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-icrm16nqAhXKAnIKHcsTAikQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1517&bih=675#imgrc=bjADUBCRB617XM

a. Nature and man in harmonious co-existence.

Declared as a national park by the Indonesian government and proclaimed, as a biosphere reserve by UNESCO for its environmental significance. Siberut national park comprises the island of Siberut, rich in biodiversity and culture. Measuring 190,500 hectares, the island was sixty percent of the national park is covered with primary forest where trees can reach up to 60 meters tall, and mixed primary forests, swamps, coastai forest and mangroves.

The park is well known for a number of endemic animal species such as its rare monkey species. Its indigenous inhabitants, the Mentawai, still live according to their hunting traditions. The Mentawai islands are thought to have been isolated from the mainland of Sumatra for over 500,000 years, thereby producing an ecosystem that is unique its own. Siberut is becoming increasingly popular for trekking and ancient cultures sight-seeing, as well as surfing and other marine activities.

b. Accessibility and directions.

A ferry crosses three times a week in the evening from Padang (Muara Padang) to Muara Siberut/Muara Sikabakuan/Muara Saibi. The trip takes approximately 10 hours. Or use an express ferry that travels every Thursday morning from Padang to the town of Tuapejat in Sipora island and then further to the southern part of Siberut island in only four hours. You should visit the months from January to September. Contact Siberut national park, jalan Raden Saleh No. 8C. P.O. Box 159 Padang, West Sumatra. Phone/Fax: (0751) 442309.

5. Way Kambas *national park*.

Gambar 5: Way Kambas *national park*



Sumber: https://www.indonesia-tourism.com/lampung/way_kambas.html

a. *Fortress of the great mammal.*

Situated at the southern tip of Sumatra, the Way Kambas national park is known for the first ever built elephant school in Indonesia. This national park occupies 1,300 square kilometers of coastal lowland forest around the Way Kambas river on the east coast of Lampung, 110 km from the provincial capital Bandar Lampung.

Way Kambas consist of swamp forest and lowland rain forest, but there is little primary forest as the area was extensively logged before becoming a reserve in 1972. The park is home to five pairs of rhinos, the occasional Sumatran

tigers and of course its main attraction elephants. Way Kambas is also famous among bird watchers as a haven for the rare white winged ducks.

In 1995 a Sumatran rhino sanctuary (SRS) was established to protect the endangered species. Large enclosures provide the Sumatran rhinos that have been relocated from zoos with an environment as close as possible to their natural habitats.

About 13 km from the entrance to the national park at Way Kambas, is a small guesthouse in a jungle clearing by the banks of the Sungai Way Kanan that serves basic accommodation for visitors.

b. Accessibility and directions.

From Bandar Lampung take about two hours drive to Way Kambas. If using a ferry from the port of Merak in Banten province to the port of Bakauheni Lampung, and another 4-6 hours drive is required to reach Way Kambas. You should visit the months from July to September. Contact Way Kambas national park, jalan Raya Way Jepara, Labuan Ratu Lama, Lampung. Phone (0725) 44220.

D. Java

1. Ujung Kulon National Park.

Gambar 6. Ujung Kulon National Park



Sumber: <https://blog.pigijo.com/tak-kalah-dari-tanjung-lesung-taman-nasional-ujung-kulon-wajib-kamu-kunjungi/>

a. Playground of the last of the javan rhino.

Situated at the extreme south-western tip of Java on the Sunda Shelf, this national park includes the Ujung Kulon peninsula, several offshore islands, Panaitan, Handeuleum and Peucang as well as the Krakatau natural reserves.

The park covers an area of 1,206 sq km (of which 443 sq km are marine, several species of endangered plants and animals can be found there. the Javan rhinoceros being the most seriously under threat. other rare species of plant and animals found here include the banteng (Javanese wild ox),

silvery gibbon, Javan lutung, crab-eating macau, leopard, Java mouse deer and rusa deer. There are also many species of reptiles, amphibians and birds.

Ujung Kulon national park is the count last fifty or so Javan rhinoceros are still surviving in 1992. UNESCO designated the area as a world natural heritage site as the largest remaining lowland rainforest in Java. In 2005, the park was designated as an Asean heritage park.

b. Accessibility and directions.

From Jakarta, drive to Serang (Banten province) via toll road, and continue to Labuan, which takes approximately 1.5 hours. From Labuan continue about 3.5 hours drive to Taman Jaya, the starting point into the park. You should visit the months from April to September. Contact Ujung Kulon national park, jalan Perintis Kemerdekaan No. 51 Labuan, Pandeglang 42264, West Java. Phone: (0253) 801731, Fax: (9253) 804651. Email: btnuk@ciiegon.wasantara.net.id.

2. Mt. Halimun Salak *National Park*.

Gambar 7: Mt. Halimun Salak *National Park*



Sumber: <https://placeandsee.com/mount-halimun-salak-national-park>

a. Beauty amongst the beast park.

The largest remaining lowland forest in Java, Gunung Salak national park comprise 2 adjacent mountains, mount Salak and mount Halimun. It is located close to the town of Sukabumi. The approximately 113,000 hectares park consist of a wide range of plants and animal species, and is home to 23 mammal species, at least 2 of which are endemic and endangered (the Javan gibbon and the gtizzled languor). it also supports more th 200 bird species of which 18 are endemic, and over 500 plant species. Indigenous Kasepuhan and other Sudanese communities live in and around the park are also depended heavily on its natural resources. Here,

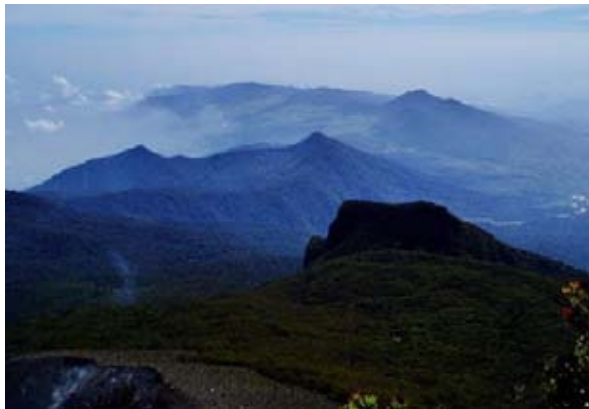
visitors will be able to observe rare primates, birds, and other forest attractions and to relax in the tranquil setting of towering waterfalls.

b. Accessibility and directions.

Firstly, fly to Jakarta and continue to the town of Bogor, West Java. From Bogor drive to Kabandungan via Parungkuda in a 1.5 hours drive, or drive to Cisangku located 50km (1.5 hours drive) away. You should visit June to August every year. Contact Gunung Halimun Salak national park office, Parangkuda PO Box 2, Kabandungan, Sukabumi 43157, West Java. Phone (0266) 621256, Fax: (0266) 621257. Email: tng@telkom.net

3. Mount Gede-Pangrango National Park.

Gambar 8: Mt. Gede-Pangrango National Park



Sumber: <https://mytravelingphotograph.blogspot.com/2012/06/mount-gede-adventure-unforgettable.html>

a. *Strolling in the clouds.*

*The twin volcanoes in West Java with steep, mountain slopes, deep valleys and long ridges, stands mount Gede at 2,958 meters and mount Pangrango at 3,019 meters into the clouds. The two summits are connected by a high saddle known as Kandang Badak (2,400 meters). Several meters before the summit of mount Gede are fields of Javanese edelweiss (*annaphalis Javanica*).*

The two mountains are the center of the Gunung Gede Pangrango national parks, which also evolved from already existing conservation areas, such as Cibodas nature reserve, Cimungkat nature reserve, Situgunung recreational park and mount Gede Pangrango nature reserves. Since the 19th century, it has been an important site for biological and conservation researches, and in 1977 UNESCO declared it a world network of biosphere reserves.

The park is inhabited by 251 of the 450 bird species found in Java. Among these are endangered species, the Javan hawk-eagle, the Javan scoops owl, the silvery gibbon, Javan surili, Javan lutung, leopard cat, Indian muntjac, Java mouse-deer, dhole, Malayan porcupine, Sunda stink badger and yellow-throated marten.

There are four entrance gates into the park, the Cibodas, Gunung Putri, Selabintana gates, and all provide access to the peaks with the Situgunung gate leading to a lake area set aside mainly for family type recreation.

b. Accessibility and directions.

From Jakarta, go to Bogor and further up to Cibodas in approximately 2.5 hours drive (100 km) by using a car. You Should Visit the months of May to September. Contact Gunung Gede Pangrango national park, jalan Raya Cibodas PO Box 3, Sindanglaya Cipanas 43253, Cianjur, West-Java. Phone (0263) 512776, (2063) 519415. Email: tngp@cianjur.wasantara.net.id.

4. Merapi.

a. The volcano that never sleeps.

Fire mountain of Gunung Merapi in Indonesia. This iconic volcano situated in Central Java and close to Indonesia's cultural capital of Yogyakarta. Merapi is the most active volcano in the country and has erupted regularly since 1548. In spite of this, it continues attracts numerous hikers and climbers of Merapi is a 5 hour climb to the peak, and 3 hours to return.

Merapi is the youngest of a group of volcanoes in southern Java. It is one of at least 129 active volcanoes in Indonesia and is part of the Pacific ring of fire (or ring of energy) a section of fault lines stretching from the western hemisphere through Japan and Southeast Asia.

For the people of Central Java and Yogyakarta, Merapi hold a symbolic significance. Members of the royal palace of Yogyakarta and Surakarta still make annual offerings for ancient Javanese spirits.

Gambar 9: Merapi



Sumber: <https://www.triptipedia.com/tip/Wvj2HwL/get-to-know-more-about-the-island-of-Java>

b. Accessibility and directions.

From Yogyakarta, go further north to Kaliurang hill resort by public transport or by car. Kaliurang stands at 900 meters on the slopes of Merapi. You Should Visit the months

of May to September. Contact: Vogels Hostel, jalan Astamulya 76, Kaliurang, Yogyakarta. Phone: (0274) 895208.

5. Bromo Tengger Semeru *National Park*.

Gambar 10: Bromo Tengger Semeru *National Park*



Sumber: <https://sunrise-indonesia.com/eksotika-gunung-bromo/>

a. A Spectacular encounter with surrealily.

Step back 820,000 years to an ancient volcanic massif that is the Bromo Tengger Semeru national park, covering a total area of 5,250 hectares at an altitude of about 2,100 meters.

Which five newer volcanoes have Tengger, an ancient caldera, has a unique sea of sand in which five newer volcanoes have emerged: Mount Bromo (2392 m), mount Batok (2470 m), mount Kursi (2581), mount Watonga (2661 m) and mount Wooddale (2650m).

Visitors come for the surreal experience of crossing a sea of black sand inside the caldera of this ancient volcano, by foot or on horsebacks, usually to reach the peak in time to catch the sunrise over the mountains. There are seven mountains around the Tengger caldera including mount Pananjakan (2770m). The peak of mount Pananjakan is a vantage point to take in the sights of the entire volcanic complex of Tengger.

Further south in the national park is the Semeru Jambangan group, which is the highest peak of Java, mount Semeru (3676m) and eight other mountains. The Semeru forest area has four lakes and fifty rivers that are former lava lines from mount Semeru.

b. Accessibility and directions.

Most visitors come through Probolinggo a small town located on Surabaya-Banyuwangi coastal route. From there, catch the public minibuses that go to the village of Cemara Lawang located 3 km away from the crater wall. You should visit the months from April to October. Contact: Bromo Tengger Semeru national park office, jalan Panda No. 8 Malang, East Java. Phone: (0341) 55104.

Email: tn_bromo@malang.wasantara.net.id.

6. Ijen Plateau.

Gambar 11: Ijen Plateau



Sumber: https://www.villa-arun.com/portfolio/ijen-crater/attachment/ijen-crater-sulfur-lake_3x2/

a. *The mystical Ijen.*

A complex of strato volcanoes in proximity to Bayuwangi in East Java, Ijen and the landscape around it is dominated by the volcanic cones of Ijen, Merapi, on the northeastern edge of the plateau, and Raung on the southwest corner. Kawah Ijen (Ijen crater) is the center of attraction, being an acid crater lake about 1 km wide, turquoise in color that lies at 2148 meters above sea level.

The crater's vent is a source of sulfur and collectors work here, making the daily trek up to the-crater collecting

pure sulfur from the quarry on the lake's edge and carrying them in large shoulder baskets that may weigh up to 80 kg.

b. Accessibility and directions.

Ijen plateau is usually accessed from the town of Bondowoso, from either the northern or the southern coast, and Bayuwangi, Pos Paltuding, the starting point for the 8 kilometers hike to Kawah Ijen, is 64 km from Bondosowo. The starting point can also be reached from Bayuwnagi with a 4WD vehicle. You should visit April to October every year. Contact: Global Adventure, jalan Harinjing 102, Kediri, East Java. Phone: (0345) 391163. Fax: (0354) 495312. Email: globaladventure@indo.net.id www.globaladventureindonesia.com.

7. Baluran National Park.

Gambar 12: Baluran National Park



Sumber: <https://www.tempatwisata.pro/wisata/Taman-Nasional-Baluran-Jawa-Timur>

a. Sun, Sea and all things green and wonderful.

Located on a 25,000 hectares park land in East Java, the Baluran national park in Situbondo, has the look and feel of an African grassland. It has a relatively dry climate and consists of lowland forests, savanna, mangrove forests, hills, and mount Baluran (1247m), an inactive volcano that towers over the plains. The park's 40 km coastline consists of lowland forest, beaches and coral reefs.

The main attractions are the Javanese wild ox (Banteng), Rusa deer, barking deer, feral water buffalo, Asiatic wild dog and other species, including the very rare Javan panther. There are also leaf monkeys, monitor lizards, squirrels, fruit bats, Javan warty pig, common palm civet and a variety of bird species; such as the green jungle fowl, the red jungle fowl, and the Javanese peacock.

The relatively small park is packed with outdoor recreational activities, such as safari rides, forest trek, diving and snorkeling, mountain hiking and climbing, strolling the beach, canoeing, rowing and boating.

b. Accessibility and directions.

From Surabaya, take the coastal road that head to Banyuwangi via Probolinggo by public buses or by cars and

*stop right at the park entrance (approximately 5 hours drive).
Visitors coming from Bali can take the route heading to
Wonorejo from Banyuwangi (about four hours drive from
Denpasar). You should visit the months of June to November.*

*Contact: Baluran national park office, jalan K.H. Agus Salim
No 132, Banyuwangi 68425, East Java.*

Phone: (0333) 4241 19, Fax: (0333) 412680.

Email: (1)tnbaluran@telkom.net,

(2)office@balurannationalpark.com.

Website: www.baluranantionalpark.com.

8. Alas Purwo National Park.

Gambar 13: Alas Purwo National Park



Sumber: <https://pagguci.com/info-lengkap-taman-nasional-alas-purwo-banyuwangi/>

a. Roll with the waves.

Situated at the Blambangan peninsula on the south-eastern tip of East Java is the Alas Purwo national park. The park covers an area of 434 sq km and is made up of mangroves, monsoon forest, some savanna and beach forest. The area has a number of Asiatic wild dogs besides Banteng or Javanese wild ox, deer, barking deer and wild boar.

Blambangan however, has become a wellknown location for surfers who normally arrive by charteted boats from Bali. Plengkung beach, known as G-Land, located in Purwo peninsula is one of the best surfing spots in the world with waves as high as 7 meters. Here, beautiful and long sandy beaches welcome seasonal sea turtles that come to lay their eggs.

b. Accessibility and directions.

From Banyuwangi, use a car or public buses to Pasaranyar (65 km) and than to Tranggulasi (another 12 km). Continue to Hengkung which os approximately 10 km from Trianggulasi by following the coastal side. You should visit the months of March to October. Contact: Alas Purwo national park office, jalan Ahmad Yani 108, Banyuwangi

68416, East Java. Phone: (0333) 410857, fax: (0333) 428675, email: alaspurwo@telkomnet.

E. Bali & Nusa Tenggara.

1. Bali Barat *National Park*.

Gambar 14: Bali Barat *National Park*



Sumber: <https://www.wonderfulbali.com/bali-barat-national-park/>

a. *Where the starlings still own the skies.*

On the north-western side of the island of Bali is where Bali Barat national park is located. The park covers around 770 sq km, approximately 10% of Bali's total land area. It includes a 1,000 meters long beach, amongst a gathering of coral reefs and islets. The national park has several ecosystems, a savanna, mangrove forest, montane, mixed monsoon forest, and coral islands. The center of the

park is dominated by remnants of four volcanic mountains with the highest peak being Gunung Patas at 1,412m.

The national park is a safe habitat for many bird species such as banteng, barn swallow, black capped oriole, black eacket-tailed treepie, crested serpent-eagle, crested treeswift, dollarbird, hawkbill turtle, Indian muntjac, Java sparrow, Javan lutung, large flying fox, leopard cat, lesser adjutant, longtailed shrike, milky stork, pacific swallow, red-rumped swallow, rusa deer, sacred kingfisher, water monitor, wild boar and yellow-vented bulbul. It is particularly known as home to the last wild population of the fast disappearing bah starling. Several endangered flora species are also found in the west Bali national park.

b. Accessibility and directions.

The park is easy to reach from Gilimanuk, Singaraja or Denpasar, by using ferries from Ketapang in Java. From Gilimanuk to Cekik (the park headquarters), the distance is 4 km while from Denpasar to Cekik, the distance is 124 km. You should visit the months from August to December. Contact: Bali Barat national park office, kantor pos Gilimanuk, Cekik 82253, Bali. Phone: (0265) 61060, 61173. Email: tnbb@telkom.net.

2. *Mount Rinjani*

Gambar 15: *Mount Rinjani*



Sumber: <http://rinjaninationalpark.com/>

a. Go trekking at Southeast Asia's finest.

Standing tall at 3,726 meters and the 2nd highest mountain in Indonesia after mount Kerinci in Sumatra, is mount Rinjani. Apart from the climb itself, visitors enjoy and take in the sight of its 6 km by 8.5 km oval-shaped caldera which is filled partially by a crater lake known as Segara Anak (child of the sea). The lake is located some 2,000 meters above sea level and is estimated at being around 200 meters deep. Eruptions between 1994 and 1995 have also formed a new mountain within the caldera called mount Bajugari at approximately 2,300 meters above sea level.

Forest clad the slopes of Rinjani while in the lowlands the land is cultivated yielding rice, soybeans, coffee, tobacco, cotton, cinnamon, cacao, cloves, cassava, corn, coconuts, copra, bananas and vanilla.

The volcano and the caldera are protected by the Gunung Rinjani national park established in 1997. The park covers an area of 41,330 hectares in the northern part of Lombok. There are also guided village tours which provide a glimpse of local culture and the opportunity to meet the locals.

b. Accessibility and directions.

Senaru and Sembalun Lawang village are starting points for excursions into the park as well as for climbing mount Rinjani. Senaru village can be reached within a three hour drive to the north from Mataram, while Sembalun Lawang village is approximately of four hours drive to the east of Mataram. You should visit the months from August to Desember. Contact: Gunung Rinjani national park office, jalan Erlangga 88, Mataram, Lombok, West Nusa Tenggara. Phone (0370) 627764. Email: tngr@telkom.net.id.

3. Kelimutu *Crater Lakes*.

Gambar 16: Kelimutu *Crater Lakes*



Sumber: <https://www.lakescientist.com/kelimutu-crater-lakes/>

a. Let the force be with you.

On the island of Flores covering an area of 5,000 hectares is Kelimutu national park. Its most famous attraction is the three multi-colored crater lakes which lie at an altitude about 1,600 meters above sea level, surrounded by mostly secondary forest.

A narrow ridge separates two of the crater lakes, Ata Polo and Ata Muri. The water of Ata Polo has greenish color whereas Ata Muri is turquoise; the third Ata Mbupe lies a little north and is almost black. The colors of the lakes may change due to variation in the lakes mineral contents, although locals believe each lake is where souls of the dead

dwell. Souls of sinners will enter the black lake, while Tiwu Ata Polo is the lake of evil, virgins and infants are designated the blue green lake, and Tiwu Ko'o Fai Nuwa-the lake of youth, while souls of the elderly will stay in the brown/burgundy lake. Tiwu Ata Bupu-the Lake of the old.

b. Accessibility and directions.

Take the flight from Kupang to Ende or from Bima to Ende, then continue to Moni, 52 kilometers northeast of Ende, which is the usual base for visiting Kelimutu. You should visit from July to September every year. Contact: Kelimutu national park office, jalan Ahmad Yani No. 34, Ende, Flores - East Nusa Tenggara. Phone (0381) 22478.

4. Komodo Marine National Park.

Gambar 17: Komodo Marine National Park



Sumber: <http://lcc-abbeytravel.com/leisure/en/article/komodo-national-park-is-the-home-of-the-unique-and-rare-komodo-dragon-varanus-komodoensis-/1843>

a. Enter the dragon park.

*Komodo and Rinca are the largest of 80 islands that lie between the lesser Sunda islands of Sumbawa to the west and Flores to the east. Together with an extensive area of the surrounding ocean they form the Komodo national park. Established in 1980, the park was declared a man and biosphere reserve and a world heritage site in 1986. It also has been made famous by the enormous lizards, the endangered Komodo dragon (*varanus komodensis*), which is the biggest reptile in the world today. Called the dragons of the east, Komodos may grow up to 3 meters in length and weigh 150 kg. and dubbed the descendants of dinosaurs, they can lay up to 10 eggs at a time.*

A rich marine life thrives in the waters around Komodo, Rinca and the smaller islands where beautifully intact reefs are abundant with coral and fish species. Fierce currents make for some of the more challenging diving pursuits, and also encounters with big fishes, rays, tuna and turtles.

b. Accessibility and directions.

Komodo national park can be reached from Sape (Sumbawa Island) on board a ferry that departs daily in the

morning. Other popular base is Labuan Bajo (Flores island), also by ferry to the park. You should visit the months from March to June and from October to December. Contact: Komodo marine national park, jalan Kasimo, Labuan Bajo, Flores Barat, East Nusa Tenggara 86445. Phone (0385) 41004, 41005, fax. (0385) 41006.

Email: tnkomodo@indosat.org.

F. Kalimantan.

1. Derawan Sangalaki.

Gambar 18: Derawan Sangalaki



Sumber: <https://kaltimprov.go.id/berita/kepulauan-derawan>

a. Where the green turtles come home.

Clustered in a small archipelago chain that lies in the Makassar Strait near the equator, between Borneo and Sulawesi are Derawan, Sangalaki, Aratua, and Kakaban. The islands have environmental significance as the biggest

nesting ground for green turtles in Indonesia. The plankton rich waters harbor a fantastic ecosystem, most of which is rarely explored.

Most dive sites are shallower than 20 meters with gently sloping reefs and shallow areas. The dive sites are famous for the large gathering of Manta rays. Amongst the reefs of this archipelago is also a habitat, lots of very interesting critters, beautiful nudibranchs, hidden crabs and shrimps and unusual fish such as ghost pipefishes, scorpion fishes and more.

Kakaban island has been declared a regional marine conservation area and an ecologist haven thanks to a unique lake teeming with jellyfish.

b. Accessibility and directions.

Derawan Island can be reached from either Berau (Tanjung Redeb) or from Tarakan by boat. You should visit the months from May to October every year. Contact: Derawan dive resort komplek, Balikpapan Permai G-1, No. 34, jalan Jend Sudirman, Balikpapan, East Kalimantan. Phone (0542) 7072615, 7072617. Fax. (0542) 420293. Email: marketing@divederawan.com. Narwastu dive center (Nabucco island resort-Maratua)

2. Tanjung Puting *national park*.

Gambar 19: Tanjung Puting *national park*



Sumber: <https://www.wsj.com/articles/a-river-cruise-through-borneo-to-hang-with-orangutans-1454605998>

a. UNESCO's biosphere reserve.

Declared a game reserve in 1935 and a national park in 1982, Tanjung Puting has several types of ecosystem: Lowland tropical forest, dry land forest, freshwater swamps forest, mangrove forest, coastal forest and secondary forest.

The park is home to several endangered endemic species such as monkey, maroon leaf monkey, sun bear, clouded leopard and leopard cat. It has 220 Species of orchids, hornbills, 2 species of crocodiles and the much sought after Arwana (dragon fish). Tanjung Puting is best known for its Orangutans as it was the first orangutan

rehabilitation center in Indonesia. The center has now located in three locations, known as Tanjung Harapan, Pondok Tanggui and Camp Leakey.

Declared by UNESCO as a biosphere reserve, the park's rich ecosystem also benefits the local human population. The wetlands act as a natural flood and erosion control, as well as a natural biological filtration system and encourage seasonal fish nurseries that are a major sources of protein for the surrounding people. In addition, Tanjung Puting also yields a great variety of forest products such as honey, wax, aromatic woods and fibers for ropes and cloth.

b. Accessibility and directions.

Fly or use a ship Pangkalan Bun (Central Kalimantan) from Semarang (Central Java) and continue by land transportation to Kumai. From Kumai, use the traditional boat Klotok, or the much faster speedboat to Tanjung Harapan. From Kumai to Camp Leakey, about 1.5 to 2 hours by speedboat. You should visit the months from June to September. Contact: Tanjung Puting national park office, jalan H.M. Rafi'i km 2, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat 74181, Central Kalimantan. Phone/Fax (0532) 23832.

G. Sulawesi, Maluku & Papua.

1. Selayar-Takabonerate.

Gambar 20: Selayar-Takabonerate



Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Taka_Bonerate

a. The third largest atoll in the world

Lying in the southwest of Selayar island and is the third largest coral atoll in the world after Kwajalein in the Marshall island and Suvadiva in the Maldives, is Takabonerate (Telaga Bone Rate), that spreads over 2,220 sq km in the Flores sea, an area consisting of 21 small islands.

Rich in coral reef and seagrass ecosystems, the atoll offers some very good wall diving. Visibility is normally around 10 meters. The atoll rises sharply from the side of a

submerged ridge 2,000 meters below the surface it is said to have been a huge volcano that has since collapsed, leaving a wide ring of coral.

A national marine park, Takabonerate has an abundant amount of fish such as the wahoo, barracuda, giant trevally, marlin, sailfish, yellowfish, dogtooth tuna and mackerels. Fishing, however, is prohibited. There are also some resting areas for sea turtles on the islands.

b. Accessibility and directions.

Fly to Makassar and continue to the district of Bulukumba, located some 153 km from Makassar. If your trip is between September to February, ferries usually travel between Pantai Bira in Bulukumba and Benteng in Selayar island. From Selayar, ride a boat to Rajuni Kecil, the nearest island which is a part the Takabonerate marine park. You should visit the months from April to June and from October to December. Contact: Selayar-Takabonerate office, jalan S. Parman 40, Benteng-Selayar, South Sulawesi 92812. Phone/Fax: (0414) 21565.

2. Bunaken *Marine National Park*.

Gambar 21: Bunaken *Marine National Park*



Sumber: <https://id.pinterest.com/pin/821062575786598765/>

a. The under-water paradise.

With an area of 808 hectares and white sandy beaches, Bunaken island faces the coastline of Manado and is readily accessible, which also make the North of Sulawesi a veritable underwater paradise. The Bunaken and Manado Tua marine park are one of the world's best snorkling and diving spots. Magnificent coral gardens and a multitude of tropical marine life offer some of the best adventure to be explored and enjoy anywhere in the world. A tremendous variety of marine life thrives in these rich waters from sponges and corals to turtles and dolphins.

b. Accessibility and directions.

Take a flight to Manado, the capital of North Sulawesi province, and from there you can choose to go to Bunaken by public boats, chartered boats, or with an organized tour public boats travel between Manado and Bunaken island as well as Siladen island. Bunaken is only 30 minutes from Manado port, while Siladen is 20 minutes ride by boat. You should visit the month from April to October. Contact: Bunaken and Manado Tua marine national park office, jalan raya Molas Manado, North Sulawesi 95242. Phone/Fax (0431) 85922, email: tnb@manado.wasantara.net.id.

3. *Tangkoko Duasaudara reserve.*

Gambar 22: *Tangkoko Duasaudara reserve*



Sumber:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tangkoko_Batuangus_Nature_Reserve

a. Home of the world's smallest primate.

Situated on the tip the northern peninsula of Sulawesi lies the Tangkoko-Duasaudara nature reserve. The area is dominated by two volcanoes. Gunung Duasaudara (1 .351 m) and Gunung Tangkoko (1,109m). To the south-east is the 450 meters active volcano cone, Gunung Batu Angus. While to the south-west lies the extensive Pata plateau.

*Lowland rainforest covers most of the reserve. A large number of the wildlife here are fruit-eating mammals, such as the endemic Celebes black macaque (*macaca nigra*), tarsiers (*tarsius spectrum*), the smallest primate of the world and phalangers.*

b. Accessibility and directions.

From Manado head to Bitung by road and then continue to Batuputih, the main entrance to the nature reserve. The distance between Tangkoko Duasaudara reserve and Manado is approximately 40 km or 2 hours driving. You should visit the months from April to October. Contact: Tangkoko ecotourism guides club (KONTAK), kelurahan Bayuputih Bawah, Lingk 1, kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, 95535, North Sulawesi. Phone (0431) 871845, email: guidesclub@yahoo.com and noldikakaue@yahoo.com

4. Togean Islands.

a. *Gems a beautiful.*

The three largest islands of Batudaka, Togean and Talatakoh gulf of Tomini, of the coast of Central Sulawesi in Indonesia. Are the jungle clad volcanic islets and the Togean island.

White sands, blue seas and lush vegetation characterize these picturesque isles. The forest shelter a variety of wildlife, such as the Togean macaque, and the recently discovered and endemic Togean hawk-owl and Togean whiteeye. The rich coral reefs provide habitat and breeding areas for hawksbill turtle, green turtle and the dugong.

Gambar 23: Togean islands



Sumber: <https://www.togean.net/trip/wonderful-togean-5d4n/>

b. Accessibility and directions.

Togean islands can be reached from Ampana in central Sulawesi and Gorontalo by regular passenger boats, or visitors can charter a speedboat that treavels from Marisa about 150 km west of Gorontalo. You should visit the months from April to October. Waves can get particularly high in Desember and January, and traveling to these islands during that time of the year may be extremely uncomfortable and rough. Contact: Togean information center, jalan Kartini 16 Ampana, Central Sulawesi. Phone (0464) 21520.

5. Banggai Island.

Gambar 24: Banggai island



Sumber: <https://akurat.co/gayahidup/id-417213-read-punya-laut-indah-dan-kaya-banggai-gelar-festival-mancing>

a. All things fishy abound.

In the western part of central Sulawesi is bordered by the Banda sea in the south and the Mollucan sea in the north

lies the Banggai islands. The numerous large coral reefs that surround the islands support a very rich marine environment; vertical drop off covered with hard and soft coral reef, sharks and turtles, schools of jackfish, tunas and many coral reefs fishes. One of its most unique species is the endemic ornamental Banggai cardinal fish (pterapogon kaudermi).

Despite suffering from destructive fishing methods in some areas of the archipelago, the reef around the Banggai islands are stiii an outstanding place to dive in. The outer reefs still boast some very beautiful walls, with lots of gorgonians and black coral, small caves am overchangs, larger animals like whales, dugongs, turtles, groupers, sometimes sharks and eagle rays are unforgettable chance encounters. Around the inner islands, fringing reefs with coral gardens are populated by small fish and also unique animals like frogfish, ribbon eels and bobtail squid.

b. Accessibility and directions.

Fly to Palu in central Sulawesi and continue by road to Luwu. A daily ferry runs between Luwu and Tataba in Baggai island. Otherwise you can take the PELNI liner Ciremai that goes to Tataba from Makassar once a week. When you should visit? The months of April to October. Contact: Maleo

cottage, Jerome Doucet and Yani Mile, phone (0461) 324070/324068, email: wallacea@indosat.net.id.

6. *Wakatobi Marine National Park.*

Gambar 25: *Wakatobi marine national park*



Sumber: <http://www.thefearchronicles.com/wp7in1/wp-content/uploads/2015/07/wakatobi.jpg>

a. *A World of marine splendor.*

The Wakatobi marine national ark, lying just off the south-eastern tip of the Sulawesi is one of the undiscovered jewels of Indonesian diving sites. Wakatobi is named after the four islands that surround it, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia and Binongko which belong to Tukang Besi Archipelago. Exploring any of the Tukang Besi islands will be rewarded by fascinating fossil reef formations, including the

occasional giant clam or nautiloid shell. The entire area is a treasure trove of crustacean life.

The Wakatobi is famous for its spectacular night dives. Entire walls present a riot of colors as tubastrea and soft corals 'bloom', and a ming-boggling variety of invertebrates such as crustaceans, nudibranch, and pencil urchin, come-out of their hiding to feed in a parade of colorful hues.

b. Accessibility and directions.

From Kendari the capital of Southeast Sulawesi province, take a regular boat to bau-bau or about 5 hours of sailing. Continue to Lasalimu (a 1 hour drive) and then use a speedboat to Wanci, the entry point to Wakatobi. The trip from Lasalimu to Wanci takes about 2.5 hours.

When you should visit? The months from April to June and from October to December. Contact: Wakatobi marine national park office: Jalan Dayanu Ikhsanudin, Bau-Bau, Buton, Southeast Sulawesi. Phone (0402) 25652.

7. Toraja.

Gambar 26: Toraja



Sumber: <https://www.wego.co.id/berita/waktu-terbaik-berkunjung-ke-toraja/>

a. The highlands and sanctuary of the kings.

Dominated by the mountainous southwestern peninsula, the province of South Sulawesi, where the seafarings Bugis are, and to the northern part of the province is home to the Torajans, referred to as Tana Toraja or "Land of the Heavenly Kings". The Torajans believe their forefathers descended from heaven onto a mountain of twenty generations ago. Their unique culture is based on animistic beliefs in which death and afterlife ceremonies and rituals are for elaborate feasts, in which the dead are buried in cliff burial sites or hanging graves.

The center of Torajan culture is Rantepao. A gate built in traditional boat-shaped architecture marks the entry to Tana Toraja. The road passes through the mountains of Kandora and Gandang on which, according to Torajan mythology, the first ancestors of celestial beings descended from heaven and landed here. The majority of the people still follow the ancestral cult called "Aluk Todoio" which governs all traditional ceremonies.

b. Accessibility and directions

From South Sulawesi's province capital Makassar, take a bus that goes to Rantepao, which is a distance of 328 km or 6-8 hours by road. Rantepao has all tourism facilities and this is a starting point for exploring Tana Toraja. When you should visit? The months from April to September. Contact: Tourist information service, Jalan Pao Pura, Rantepao, South Sulawesi. Phone (0423) 23369.

8. Seram-Sawai.

Gambar 27: Seram-Sawai



Sumber: <http://agolf.xyz/sawai-surga-tersembunyi-di-seram-utara/>

a. Birds of a feather.

In the Maluku archipelago known in the past as the “spice Islands”. Seram is the second largest island that offers a number of amazing attractions such as Manusela national park, traditional village's, treks in the rainforest, and amazing bird-watching. A haven for othinologist, Seram is a natural habitat for the Mollucans, Triton and palm cockatoos, electus parrots, lorries, lorikeets and great Bill parrots, as well as hornbills, birds of paradise and exotic pigeons and coves. Offshore, some of the world's outstanding coral formations are only a dive away.

b. Accessibility and directions.

From Ambon, the capital of Maluku province, continue to Amahai on Seram island by public bus or rental car (both will board a ferry), or you can use a speedboat. When you should visit? Diving is usually not available during the dry season from April to June. Contact: (1) Balai taman nasional Manusela, jalan Kasturi No.1, Masohi, Central Maluku. Phone (0914) 22164, fax: (0914) 22165, www.balaitnmanusela.org, (2) Yayasan Wallacea. Contact person: Ceisar, phone (9911)310296, mobile: 081343342485, 0817552874.

9. Raja Ampat Islands.

a. Jewels of the east.

The seas around Raja Ampat are possibly possessing the richest variety of coral species in the world, and has only recently been discovered by scientist as having the world richest reef system. Stunningly beautiful above and below the water, the gem-like islands of Raja Ampat are situated off the northwestern tip of Papua. The four largest islands in the archipelago are Waigeo, Batanta, Salawati and Misool, which shelter a richly diverse land species and forests.

Offshore reefs protect an astounding 1320 species of fish, as well as 553 species of coral.

Even today, the area is still the least explored dive areas in the world boasting an amazing marine environment, including huge schools of fish, tiny seahorses, and rich coral formations.

Gambar 28: Raja Ampat Islands



Sumber: <https://www.papuaparadise.com/news/where-raja-ampat-is-and-what-beauties-can-i-discover/>

b. Accessibility and directions.

Fly to Sorong on the western tip of Papua and then rent a boat to Raja Ampat islands. When you should visit? The months of May to October. Contact: Papua diving, phone (0411) 401660, fax (0951) 325274.

Bab III

Pasar Ekowisata

Ekowisata sejatinya adalah komponen dari pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) sebagai bagian dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), yang memiliki peran penting dalam proses dan realisasinya dalam dunia nyata. Karena itu dalam konteks pasar ekowisata, seluruh aktivitasnya termasuk liburan, bisnis, konferensi, kongres, wisata kesehatan, wisata petualangan, harus berbasis pembangunan berkelanjutan tersebut. Artinya, dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pariwisata, pengoperasiannya, pemasarannya, dan lain-lain, harus fokus dan memenuhi kriteria aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan itu sendiri, disusun dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dunia berupa kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim melalui aksi nyata. Konsep ini dilahirkan pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB Rio+20 pada tahun 2012 dengan target

yang implementatif dan berlaku universal, terukur, dan mampu menyeimbangkan tiga dimensi antara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Semenjak tanggal 29 Juni 2015, PBB menetapkan SDG's (*Sustainable Debelopment Goals*), yang memiliki 17 unsur dengan 169 capaian terukur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi (id.m.wikipedia.org, tanggal 29 Juni 2020 pukul 17.20). Seluruh tujuan itu, ditetapkan bersama oleh negara-negara yang berada di bawah naungan PBB sebagai program ambisi yang harus dicapai paling lambat tahun 2030. Semenjak penetapan SDG's, maka tujuan pembangunan milenial yang telah ditetapkan sebelumnya atau MDG's (*Millenial Development Goals*) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Program pembangunan berkelanjutan, meliputi unsur-unsur (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan

komunitas berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem laut, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan (*ibid*).

Gambar 29: Sustainable Development Goals



Sumber : <http://www.sanitasi.or.id/?p=709>

Pasar ekowisata, pada prinsipnya sama dengan pariwisata pada umumnya (walaupun dalam pelaksanaannya memiliki kekhususan), ialah berbasis pada portofolio produk pariwisata, yaitu: (1) Portofolio pelanggan yang terdiri dari personal, bisnis, dan internasional, dan (2) portofolio produk yang terdiri dari wisata alam (35%), wisata budaya (60%), dan wisata buatan (5%).

Gambar 30: Portfolio strategi kepariwisataan

PORTOFOLIO PELANGGAN	PERSONAL	WISNUS INDIVIDU/FAMILY TRAVELLER, KOMUNITAS
	BUSINESS	BIRO TRAVEL, UKM, USAHA, ASOSIASI, PEMDA
	INTERNATIONAL	WISMAN
PORTOFOLIO PRODUK	Alam (<i>Nature</i>) (35 %)	1. WISATA BAHARI (<i>MARINE TOURISM</i>) (35%)
		2. EKOWISATA (<i>ECO TOURISM</i>) (45%)
		3. WISATA PETUALANGAN (<i>ADVENTURE TOURISM</i>) (20%)
	Budaya (<i>Culture</i>) (60 %)	1. WISATA WARISAN BUDAYA DAN SEJARAH (<i>HERITAGE AND PILGRIM TOURISM</i>) (20%)
		2. WISATA BELANJA DAN KULINER (<i>CULINARY AND SHOPPING TOURISM</i>) (45%)
		3. WISATA KOTA DAN DESA (<i>CITY AND VILLAGE TOURISM</i>) (35%)
	Buatan Manusia (<i>Man Made</i>) (5 %)	1. WISATA MICE (<i>MICE & EVENTS TOURISM</i>) (25%)
		2. WISATA OLAHRAGA (<i>SPORT TOURISM</i>) (60%)
		3. OBJEK WISATA TERINEGRASI (<i>INTEGRATED AREA TOURISM</i>) (15%)

Sumber: Kemenpar RI, 2017.

Portfolio pelanggan personal, terdiri dari individu, keluarga, dan komunitas. Portfolio bisnis, terdiri dari biro perjalanan, usaha kecil dan menengah, usaha pariwisata, dan pemerintah daerah. Sementara itu, portfolio internasional adalah wisatawan mancanegara (wisman).

Portfolio produk wisata alam (*nature*) sebesar 35%, terdiri dari wisata bahari (*marine tourism* sebesar 35%), ekowisata (*ecotourism* sebesar 45%), dan wisata petualangan (*adventure tourism* sebesar 20%).

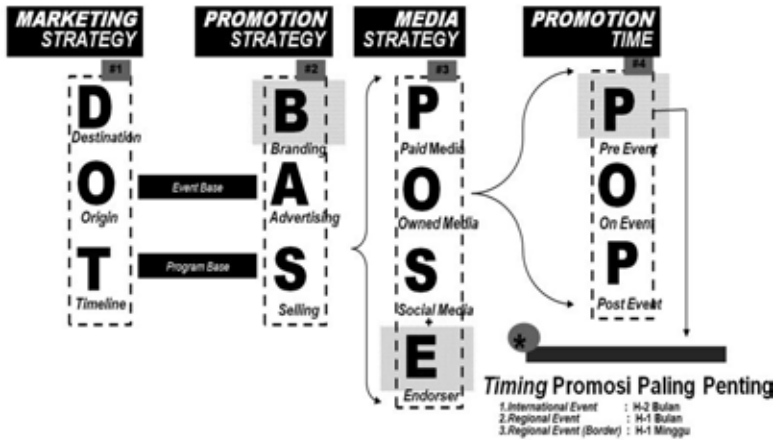
Portfolio produk wisata budaya (*culture*) sebesar 60%, terdiri dari warisan budaya dan sejarah (*heritage and*

pilgrim tourism sebesar 20%), wisata belanja dan kuliner (*culinary and shopping tourism* sebesar 45%), wisata kota dan desa (*city and village tourism* sebesar 35%).

Portfolio wisata buatan manusia (*man made* sebesar 5%), terdiri dari wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Events tourism*) sebesar 25%, wisata olah raga (*sport tourism* sebesar 60%), dan objek wisata terintegrasi (*integrated area tourism* sebesar 15%).

Dalam hal strategi pembangunan kepariwisataan, ekowisata juga memanfaatkan strategi khusus, yaitu *marketing strategy* yang terdiri dari DOT (*destination, origination, and time*), *promotion strategy* yang terdiri dari BAS (*branding, advertising, and selling*), *media strategy* yang terdiri dari POSE (*paid media, own media, social media, and endorser*), serta *promotion time* yang terdiri dari POP (*pre-event, on-event, dan post-event*) (Kemenpar RI, 2017).

Gambar 31: Strategi pemasaran pariwisata



Sumber: Kemenpar RI, 2017.

A. Segmen Pasar

Ruang lingkup ekowisata dibandingkan dengan pariwisata pada umumnya relatif kecil (hanya sebesar 45% dari keseluruhan wisata alam), namun mampu mendorong pertumbuhan industri dan pasar pariwisata yang sangat cepat karena memiliki tempat khusus, apalagi kalau didukung oleh regulasi pemerintah. Ekowisata, adalah satu-satunya segmen pasar pariwisata yang mengedepankan keseimbangan dalam wisata alam. Siapapun yang terlibat dalam ekowisata, apakah negara, perusahaan/industri,

destinasi, ataupun yang lain, harus mengedepankan kebijakan dan program lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Kalau tidak, maka dia tidak memenuhi kriteria sebagai ekowisata. Kriteria dimaksud, di antaranya: (1) Ekowisata memerlukan ahli pemasaran khusus sehingga mampu menarik wisatawan yang memiliki interes utama terhadap destinasi alam, (2) *management skills* sangat penting agar pengunjung atau wisatawan bersikap *protected* terhadap lingkungan alam, (3) perlu pemandu wisata dan penerjemah khusus, lebih baik kalau mereka berasal dari penduduk lokal yang menguasai sejarah alam lingkungan di sana dan pembangunan berkelanjutan berbasis budayanya, (4) adanya kebijakan pemerintah berkenaan dengan pengembalian pajak darah yang diperoleh dari aktivitas ekowisata dan diperuntukkan bagi konservasi destinasi/alam lingkungan, pembangunan berkelanjutan masyarakat lokal dan masyarakat adat, dan (5) fokus perhatian pada masyarakat lokal agar mereka memberikan informasi yang benar, relevan, eksplisit, penuh dedikasi dan partisipasi, bahwa mereka sungguh-sungguh menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai pilihan dan komitmennya (Wood, 2002:13).

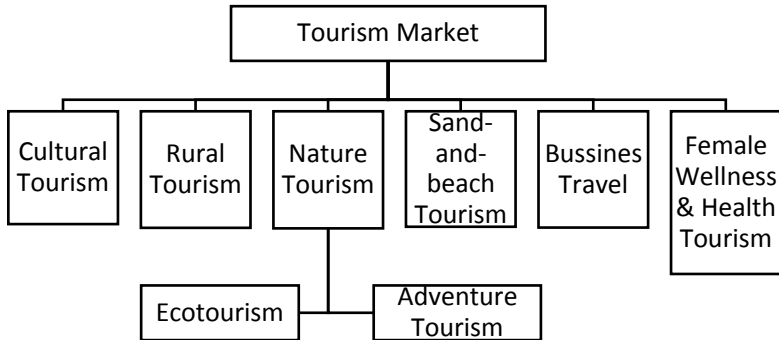
Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam segmen pasar ekowisata adalah: (1) Peningkatan perhatian kontrol atas tradisi masyarakat adat secara khusus apabila ekowisata di suatu tempat maju dan berkembang, (2) konsep efisiensi dan keseimbangan sosial perlu dimunculkan berbasis perlindungan wilayah ekowisata untuk konservasi jangka panjang dan keanekaragaman budaya, (3) antisipasi terhadap resiko yang ditimbulkan oleh wisatawan non-ekowisata yang walaupun secara materi memberikan kontribusi besar, namun mengancam keselamatan ekowisata dan masyarakat lokal, (5) bagaimana menyeimbangkan antara desakan investor berskala menengah dan besar, masuknya orang-orang luar, dengan ekspektasi masyarakat lokal untuk tetap dapat berpartisipasi pada ekowisata berbasis masyarakat (*community-based tourism/CBT*).

B. Unsur Pasar Ekowisata

Unsur-unsur pasar dalam ekowisata, sesungguhnya terkait langsung dengan pasar wisata secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat *cultural tourism, rural tourism, nature tourism, sun and beach tourism, business travel, female-*

wellness and health tourism. Ekowisata itu sendiri adalah bagian dari wisata alam (nature tourism) bersama dengan wisata petualangan (adventure tourism) (Wood, 2002:11).

Gambar 32: Ecotourism as a market segmen



Sumber: Wood (2002). *Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability*, p. 11. Burlington, USA: UNEP.

Bab IV

Kesadaran Lingkungan

Kesadaran lingkungan dalam lingkup ekowisata, paling tidak meliputi tiga unsur, yaitu: (1) hakikat lingkungan, (2) apa yang dipikirkan dan dirasakan tentang lingkungan, dan (3) bagaimana berperilaku di dalam lingkungan (Ahman Sya dan Maman Abdurachman, 2012:51). Ketiga unsur tersebut dalam implementasinya terkait satu sama lain, sehingga tidak ada kawasan yang dapat dimengerti secara terpisah-pisah.

Untuk mengkaji kesadaran lingkungan pada setiap pribadi manusia, khususnya berkenaan dengan ekowisata, maka perlu difahami tentang gambaran mental, peta mental (peta kognitif), nilai-nilai budaya, serta rencana-persepsi dan kognisi, yang nantinya akan bermuara pada perilaku. Dengan kata lain, perilaku bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa ada latar belakang yang menyebabkannya. Karena itu perlu dikaji dari berbagai aspek.

A. Gambaran Mental

Gambaran mental biasanya berbentuk pandangan yang representatif, berupa kesan-kesan dari suatu destinasi ekowisata yang pernah dilihat dan masih tersimpan. Kesan ini berhubungan dengan perasaan gembira, senang, terharu, kagum, dan sebagainya. Keadaan atau suasana dari daerah tersebut misalnya tenang, sunyi, mencekam, ramai, dan lain-lain. Mungkin juga kesegaran, keharuman yaitu respons yang berhubungan dengan dria penciuman yang menambah nuansa tertentu terhadap gambaran mental tersebut. Contohnya: Deburan ombak pada waktu pagi yang segar, kicauan burung, pandangan indah yang mengagumkan dari puncak gunung, atau yang lainnya.

Mungkin kita masih memiliki gambaran yang jelas tentang suatu daerah yang pernah dikunjungi. Kegembiraan kelompok pada waktu menyusuri pantai, kesibukan mereka pada saat membuat sketsa pemandangan, kegairahan pimpinan kelompok waktu mengatur kegiatan anggotanya untuk melakukan observasi dan pencatatan yang teliti mengenai daerah yang dikunjungi. Gambaran mental tersebut akan terekam dengan jelas. Apabila perasaan ikut tergoyahkan, terpukau dengan keindahan alam yang

mengagumkan sehingga menyadari keagungan Yang Maha Pencipta Allah SWT, maka kita berada pada suatu posisi kesadaran lingkungan yang melingkupi deskripsi tentang bentang alam (*natural landscape*) yang dikunjungi.

Kesadaran lingkungan merupakan landasan yang penting untuk memahami lingkungan secara utuh dan menyeluruh, serta melakukan suatu tindakan *pro-environment* yang bermanfaat bukan hanya bagi alam lingkungan tersebut, akan tetapi juga bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia secara berkesinambungan.

B. Peta Mental (Peta Kognitif)

Manusia menempati alam dunia yang dapat dialami, namun mengarahkan tindakannya terhadap dunia pengamatan (persepsi) dari dunia yang dapat dialami itu. Dunia pengalaman tersebut mungkin serasi dan mungkin pula bertentangan dengan dunia yang dapat dialami (Schoonmaker, 1977:21, dalam Ahman Sya, 2012: 53).

Interaksi keruangan (*spatial interaction*), merupakan salah satu bentuk perilaku keruangan (*spatial behavior*). Perilaku keruangan manusia tergantung pada peta kognitif

dari lingkungan keruangan (*spatial environment*). Pemetaan kognitif merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian transformasi psikologis dimana seorang individu menerima, membuat kode, menyimpan, mengingat kembali, dan *decode* informasi tentang lokasi relatif dan atribut-atribut dari fenomena dalam lingkungan keruangan sehari-hari (Down, 1973:9, dalam Ahman Sya, 2012: 53).

Lingkungan merupakan suatu permukaan yang berskala besar, bersifat kompleks dalam kategori-kategori informasi dan jumlah contoh-contoh dari kategori-kategori informasi tersebut. Setiap individu secara relatif merupakan suatu organisme yang kecil dengan mobilitas terbatas. Baik keterbatasan dalam **penginderaan** rangsangan, kemampuan dalam memproses informasi, kemampuan menyimpan, dan keterbatasan dalam waktu yang dimilikinya.

Manusia menerima informasi dari sumber yang kompleks, tidak menentu dan berubah-ubah serta tidak teramalkan, melalui modalitas alat dria yang tidak sempurna, yang bekerja selama waktu tertentu dengan jangka dan interval yang berubah-ubah. Dalam keanekaragaman tersebut, seorang individu harus mengumpulkan, mempersatukan, dan memadukan

informasi untuk membentuk gambaran yang komprehensif dari suatu lingkungan. Proses tentang memperoleh dan memadukan serta menyimpan informasi-informasi tersebut dinamakan pemetaan kognitif, dan hasil dari proses tersebut pada suatu waktu tertentu dapat dianggap sebagai **peta kognitif** (Down, 1973:10, dalam Ahman Sya, 2012:54).

Pemetaan kognitif merupakan unsur yang mendasar dalam penyesuaian manusia, juga merupakan persyaratan yang baik untuk *survival* manusia, serta untuk perilaku kesehariannya. Hal ini merupakan suatu mekanisme untuk berusaha supaya individu dapat menjawab pertanyaan yang mendasar dengan cepat dan efisien: (1) Dimanakah benda-benda yang bernilai itu berada?, dan (2) bagaimanakah caranya untuk sampai pada benda-benda itu, dan ketempat darimana benda itu berasal?

Penggunaan istilah peta dalam peta kognitif, hanyalah analogi fungsional. Perhatian utamanya adalah pada representasi kognitif yang merupakan fungsi umum dalam peta kartografis, tetapi tidak perlu mempunyai sifat-sifat fisik dari model grafik gambar seperti peta pada umumnya. Peta kartografis dan peta kognitif mempunyai kesamaan

fungsi, tetapi tidak mempunyai struktur yang sama. Analoginya bukan analogi proses, melainkan analogi hasil.

Nama lain untuk peta kognitif adalah *signatura kognitif*, peta mental, dan *schemata*. Beberapa aspek dari peta kognitif mungkin mempunyai peta kartografis, mungkin pula berupa *signatura* linguistik (dimana skala dan operasi rotasi tidak relevan), dan mungkin pula merupakan hasil pandangan dan titik pandangan setinggi mata.

Apabila kita melakukan penelitian tentang persepsi lingkungan, tujuan yang sebenarnya adalah untuk memberikan gambaran tentang kesan dari seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, dan perkembangan gambaran afektif dari orang tersebut. Demikian pula dalam bidang afektif dan psikomotorik.

Boulding (1972:47, dalam Ahman Sya, 2012:56), mengguankan istilah citra (*image*) untuk istilah peta kognitif, Menurut dia, struktur pengetahuan yang subjektif atau citra dari setiap individu atau organisasi, terdiri bukan saja dari “citra fakta”, tetapi juga “citra nilai budaya”. Terdapat perbedaan antara citra dari objek-objek fisis dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda, dengan penilaian yang kita

berikan terhadap benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan benda-benda tersebut.

Citra tentang budaya, berhubungan dengan *rating* dari berbagai bagian citra kita tentang dunia sekitar, yaitu berdasarkan skala mana yang lebih baik dan lebih buruk. Skala nilai budaya dari setiap individu atau organisasi, merupakan unsur tunggal yang paling penting yang menentukan efek dari pesan yang diterima terhadap citra dunianya.

Pesan yang dipandang tidak baik dan juga tidak buruk, mungkin tidak atau hanya punya efek yang kecil terhadap citra. Kalau pesan itu dipandang buruk atau membahayakan terhadap citra yang dimiliki, pesan itu akan menjumpai rintangan dalam penerimaannya. Rintangan tersebut biasanya tidak berlangsung untuk selama-lamanya. Pesan yang diulang-ulang atau pesan yang dipaksakan oleh penguasa, mungkin akan dapat menembus rintangan tersebut dan mengubah citra (Krech, 1962:226-238, dalam Ahman Sya, 2012:57). Kebalikannya, andaikata pesan itu menguntungkan terhadap citra dunia yang telah ada, pesan itu akan dapat diterima dengan mudah, walaupun mungkin akan menyebabkan sedikit perubahan dalam struktur

pengetahuan, dan tidak akan terjadi pengorganisasian kembali secara fundamental. Pesan yang menguntungkan mungkin tidak akan menimbulkan dampak terhadap struktur pengetahuan. Bahkan mungkin akan memberi efek stabilitas berupa rintangan terhadap pesan-pesan yang tidak menguntungkan yang terdapat dalam struktur pengetahuan atau citra.

Stabilitas atau resistensi terhadap perubahan struktur pengetahuan tergantung pula pada konsistensi dan penataan internal. Tampaknya terdapat semacam asas minimasi terhadap ketegangan internal yang berlaku, yang menyebabkan citra-citra tertentu menjadi mantap, dan citra-citra lainnya menjadi goyah karena alasan-alasan internal yang murni. Dalam hal ini hendaklah diingat bahwa penyebab dari keterpaduan struktur pengetahuan itu bukan semata-mata konsistensi logika saja. Terdapat pula unsur-unsur *non-logic* yang mewujudkan kemantapan tersebut, misalnya jika struktur tersebut terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan *aesthetic* (Boulding 1972:48, dalam Ahman Sya, 2012:58).

Walaupun dalam persepsi indera yang sederhana, atau dianggap sederhana, ternyata abahwa pesan yang datang

melalui indera itu sendiri telah melalui media sistem nilai budaya. Kita tidak memandang data indera itu sebagai data mentah, namun telah melalui media proses belajar yang tinggi berupa penafsiran dan penerimaan.

Kalau sekelompok manusia memiliki citra yang sama tentang lingkungan dan atau dunianya, atau mereka memiliki citra yang identik, dan jika kelompok manusia itu dapat menerima serangkaian pesan-pesan yang sama dalam menyusun citra dari lingkungan atau dunianya, maka sistem nilai dari semua individu tersebut haruslah kira-kira sama. Pengembangan dari citra merupakan bagian dari kultur atau subkultur dimana citra itu berkembang, dan tergantung pada semua unsur dari kultur atau subkultur tersebut

C. Peta Kognitif dan Rencana

Peta kognitif atau citra merupakan semua pengetahuan yang terkumpul dan terorganisasikan yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri dan tentang lingkungan atau dunianya (Miller, 1972:61 dalam Ahman Sya, 2012:59). Citra lebih lengkap dari khayalan, karena meliputi segala sesuatu yang telah dipelajari oleh seseorang, nilai-nilai budaya, dan fakta-fakta bagi dirinya, yang terorganisasikan

dalam konsep-konsep, khayalan, atau hubungan-hubungan yang telah dikuasai oleh orang yang bersangkutan. Citra memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan ekowisata, karena ekowisata tidak lain adalah wisata yang berbasis pemahaman tentang lingkungan (hidup) manusia dan makhluk lainnya.

Miller menyatakan bahwa rencana yang dimiliki seseorang berkenaan dengan lingkungan, adalah proses hierarkis dalam diri seorang manusia yang dapat mengendalikan urutan dari tindakan-tindakan sistematis yang harus dikerjakan. Pelaksanaan dari suatu rencana, tidak usah selalu berupa tindakan yang dapat dilihat, misalnya rencana untuk pengumpulan atau pengubahan informasi. Demikian pula rencana-rencana untuk pengendalian tindakan pada destinasi ekowisata.

Citra dan rencana memiliki hubungan satu sama lain, seperti dikemukakan Miller (1972:62, dalam Ahman Sya, 2012:60), yaitu: (1) Suatu rencana dapat dipelajari, dengan demikian rencana itu merupakan sebagian dari citra, (2) nama dari rencana harus meliputi sebagian dari citra, karena harus menjadi bagian dari citra orang tentang dirinya sendiri yang dapat melaksanakan rencana tersebut, (3)

pengetahuan haruslah digabungkan ke dalam rencana, kalautidak, pengetahuan itu tidak dapat menjadi dasar dalam pengendalian perilaku. Jadi, citra dapat menjadi bagian dari rencana, (4) perubahan dalam citra dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan rencana untuk mengumpulkan, menyimpan, atau mengubah informasi, (5) perubahan-perubahan dalam rencana dapat dilakukan dengan menggunakan informasi yang diambil dari citra, (6) transformasi dari deskripsi menjadi instruksi, merupakan perilaku verbal yang sederhana.

D. Persepsi dan Kognisi

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa peta mental (peta kognitif) adalah merupakan hasil dari proses yang terdiri dari serangkaian transformasi psikologis dimana seseorang individu menerima, membuat kode, menyimpan, mengingat kembali, dan mendekode informasi tentang lokasi relatif dan atribut-atribut dari fenomena dalam lingkungan keruangan sehari-hari. Misalnya saja tentang destinasi ekowisata Gunung Leuser di perbatasan Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam.

Pemetaan kognitif merupakan proses penerimaan, mempersatukan, dan menyimpan informasi keruangan, yang dilandasi oleh persepsi (proses) dan kognisi (hasil). Persepsi itu sendiri terdiri dari proses pengamatan dan hasil dari proses persepsi yang memerlukan pernyataan eksplisit sebagai pusat perhatian (*focus of interest*).

Istilah persepsi memang diartikan bermacam-macam. Bagi ahli psikologi eksperimen, persepsi itu berkenaan dengan kesadaran stimulus melalui perasaan fisiologis yang kuat (*physiological excitation*) dari *receptor* alat-alat dria (Bartley, 1958:16, dalam Ahman Sya, 2012:62). Sementara itu, para ahli psikologi sosial berpendapat bahwa persepsi berkenaan dengan pengenalan objek sosial yang ada pada waktu sekarang, yang terdapat dalam bidang pendriaan langsung maupun kesan yang telah diperoleh seseorang atau kelompok sebagai pengalaman pada masa lampau. **Bagi para ahli geografi, persepsi merupakan suatu istilah yang meliputi segala sesuatu, sebagai jumlah keseluruhan dari pengamatan, ingatan, sikap, preferensi, dan faktor-faktor psikologis lainnya, yang ikut serta dalam pembentukan apa yang dinamakan kognisi lingkungan.** Selanjutnya, persepsi dapat diartikan pula sebagai proses yang terjadi karena

adanya suatu objek yang menghasilkan pegahayatan langsung daro objek tersebut melalui sebuah atau lebih alat dria (Down, 1973:14 dalam Ahman Sya, 2012:63).

Kognisi itu sendiri tidak usah dikaitkan dengan perilaku yang langsung, dan karenanya tidak usah dihubungkan dengan sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan yang dekat. Sebliknya, kognisi dpat dihubungkan dengan apa yang terjadi pada masa lampau, atau apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang (Ibid., hal. 63). Misalnya, bagaimana keadaan destinasi Pulau Komodo di masa lampau, dan bagaimana kemungkinannya di masa depan, apabila manajemennya tidak memperhatikan aspek=aspek penting dalam ekowisata.

Levy menyatakan bahwa perbedaan anantara persepsi dan kognisi, hanyalah dalam derajat fokus (Levy, 1970:251, dalam Ahman Sya, 2012:63). Keduanya berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap organisasi dan interpretasi tentang informasi. Persepsi mempunyai referensi pendriaan yang lebih lagsung daripada kognisi. Dalam arti yang lebih umum, kognisi meliputi pula persepsi, berpikir, pemecahan masalah, organisasi tentang informasi, dan gagasan-

gagasan. Sementara itu, Stea (1969 dalam Ahman Sya, 2012:63), menjelaskan bahwa kognisi terjadi dalam konteks keruangan. Jika ruang dalam perhatian kita itu begitu luas, maka tidak dapat dipandang atau dipahami seintas lalu atau dalam beberapa waktu yang singkat (selayang pandang). Hal ini sangat erat kaitannya dengan destinasi ekowisata yang memerlukan informasi yang komprehensif dalam waktu yang memadai, sehingga para wisatawan memahami hakikat ekowisata sebagai wisata yang berkaitan erat dengan ekologi.

Ruang yang berskala besar harus diorganisasikan dan diperlakukan secara kognitif agar mudah diingat. Di dalamnya terdiri dari objek-objek dan gejala-gejala yang terdapat di luar bidang penginderaan yang langsung dari individu. Perbedaan itu dapat diterima dengan mudah oleh para ahli geografi pariwisata, karena berhubungan dengan skala, hakikat informasi dan kognisi lingkungan daripada dengan persepsi keruangan yang lebih singkat.

Proses persepsi dan kognisi mengarah pada pembentukan disposisi untuk bertindak laku dengan cara tertentu terhadap segolongan objek, dan memang selayaknya untuk dipandang seperti itu, yang disebut pula

sebagai sikap (Krech, 1962:177, dalam Ahman Sya, 2012:64). Konsep peta kognitif dan sikap, sebenarnya memang sejalan. Menurut Fishbein (Ahman Sya, 2012:64), sikap itu terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) kognisi atau kepercayaan/keyakinan, (2) afeksi atau sikap, dan (3) konasi atau tujuan perilaku. Unsur keyakinan dan sikap, srelevant dengan pengertian peta kognitif. Fishbein, membedakan keyakinan terhadap eksistensi dari sebuah objek dan hakikat dari objek tersebut, dimana keduanya dinyatakan dalam dimensi probabilitas-improbabilitas. Dalam hal ini Boulding (1956:5-6, dalam Ahman Sya, 2012:65) menyatakan bahwa *image* (peta kognitif) sebagai pengetahuan sbjektif, sangat mengatur perilaku kita termasuk perilaku wisatawan di lokasi ekowisata.

Bab V

Ekowisata dan Demografi

Secara signifikan, ekowisata di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan. Namun demikian, tantangan yang paling besar muncul bukan hanya dari sisi kualitas pengetahuan, pemahaman, dan perilaku manusia yang ada di dalamnya, akan tetapi juga dari sisi kuantitas atau jumlah penduduk yang terus bertambah secara mencengangkan. Hal ini diprediksi akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup, tempat tinggal, tempat berusaha, yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penggunaan lahan di berbagai tempat, termasuk lahan yang selama ini berfungsi sebagai destinasi ekowisata. Menurut proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 yang dikeluarkan oleh Bappenas, pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan mencapai jumlah 271 juta orang, yang tersebar di Pulau Jawa (152 juta orang), Sumatera (59 juta orang), Sulawesi (19 juta orang), Kalimantan (16 juta orang), Bali dan Nusa Tenggara (15 juta orang). Sisanya tinggal di Maluku dan Papua (Bappenas, 2010).

Hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan bagi ekowisata Indonesia sebagian besar akan datang dari aspek demografi ini. Terutama apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik. Sekarang ini, Indonesia (2020) berada pada urutan nomor empat terbesar di dunia dalam hal jumlah penduduk, setelah RRT (sekitar 1,40 milyar) , India (1,36 milyar), Amerika Serikat (333,4 juta), dan Indonesia (271 juta)(*id.m.wikipedia.org*, 8 Juni 2020, pukul 10.54 WIB). Tingkat kelahiran penduduk yang relatif masih tinggi, penyebaran yang tidak merata, pendidikan yang masih relatif rendah, struktur penduduk usia muda, kesejahteraan yang belum memadai, dan berbagai faktor lainnya, akan memunculkan berbagai masalah termasuk dalam pengembangan ekowisata.

Aspek demografi bagi ekowisata merupakan faktor kunci dan menentukan. Oleh karena itu pengendalian dan penanganannya sangatlah penting. Bahwa penduduk memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, adalah mutlak. Namun dalam proses pemenuhan itu diharapkan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam lingkungan.

Diharapkan nilai-nilai dan kepedulian masyarakat tentang konservasi dan atau pelestarian lingkungan yang selama ini dimiliki dapat dipertahankan dan diimplementasikan.

- A. Tingkat Kelahiran dan Kematian
- B. Persebaran
- C. Pangan, Papan, Sandang
- D. Pendidikan dan Kesehatan
- E. Lapangan Kerja dan Ekonomi
- F. Lintas Budaya

Bab VI

Geografi dan Ekowisata

Geografi sebagai ilmu, memiliki kaitan yang sangat erat dengan ekowisata, terutama dari aspek hakikat keilmuannya. Menurut Pattison (Marsden, 1976: 57, dalam Ahman Sya, 2012:27), hakikat geografi dapat dikelompokkan ke dalam empat buah tradisi yang terkait satu sama lain, saling melengkapi, dan tumpang tindih (*overlapping*). Tradisi-tradisi itu adalah: (1) **Tradisi keruangan**, yang merefleksikan kepentingan tentang pola-pola keruangan yang menelaah gerakan-gerakan yang dijelaskan secara geometris dan menggunakan peta sebagai alat penjelasannya, (2) **tradisi penelaahan wilayah**, yang memperkuat gagasan bahwa para geografer menaruh perhatian terhadap sifat yang khas dari tempat-tempat dalam konteks kajian regional, (3) **tradisi manusia-daratan**, yang menaruh perhatian terhadap hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, dan (4) **tradisi ilmu pengetahuan tentang bumi**, yang menekankan terhadap deskripsi (pelukisan) tentang bumi dan eksplanasi

(penjelasan) dari sifat-sifat fisis pada permukaan bumi. Keempat tradisi ini, sangat bermanfaat dalam penelaahan, pengkajian, pengembangan, dan bahkan evaluasi ekowisata di suatu tempat atau daerah, khususnya berkenaan dengan optimasi manfaat bagi manusia, tanpa harus mengorbankan alam lingkungan yang melebihi kapasitas.

Dalam menelaah gejala-gejala geografi dan ekowisata, dapat digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan **idiografis** dan **nomothetis**. Pendekatan idiografis berhubungan dengan penelaahan empiris dari gejala-gejala yang unik dan tidak berulang lagi. Contohnya adalah dalam tradisi penelaahan wilayah, yang bermaksud menelaah “dunia yang sebenarnya” yang meliputi tempat-tempat yang beraneka ragam. Penelaahan tersebut berupa pengkajian berbagai variabel yang terdapat di daerah tertentu, sebagaimana biasa ditemui dalam implementasi pendekatan regional atau kasus.

Pendekatan **nomothetis**, lebih bersifat ilmiah, terkait dengan penelitian tentang pola-pola dan proses, penyusunan generalisasi, dan hukum-hukum. Pendekatan ini berkenaan dengan gejala-gejala yang berulang, meliputi

penelaahan variabel yang tunggal atau sejumlah kecil variabel-variabel yang terdapat di daerah yang luas. Karena itu, hal tersebut lebih berhubungan dengan metode sistematis dibandingkan dengan metode regional. Para ahli “geografi baru” lebih menyukai tradisi idiografis empiris untuk membentuk dasar yang kuat bagi pengetahuan yang sangat membantu penafsiran geografis tentang lingkungan dan atau dunia ini.

Metode penjelasan ilmiah sangat terkait dengan pendekatan nomothetis. Alasannya adalah karena tujuan dari penjelasan dalam ilmu pengetahuan tidak lain untuk menyusun hukum-hukum yang umum yang dapat menerangkan perilaku dari gejala-gejala. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, dapat digunakan (1) pendekatan induktif, yang memulai dengan kasus yang khusus dan bergerak menuju pernyataan yang universal, dan (2) pendekatan deduktif, yang memulai sesuatu dengan pernyataan universal dan kemudian menyusun pernyataan yang berhubungan dengan serangkaian gejala khusus.

Harvey (Marsden, 1976:60, dalam Ahman Sya, 2012: 30), menyusun enam buah bentuk penjelasan yang dapat

digunakan oleh para ahli geografi dan juga ekowisata, sebagai berikut: (1) **Deskripsi kognitif**, yaitu penjelasan yang berhubungan dengan pengumpulan, penataan dan pengelompokkan gejala-gejala yang memungkinkan tersusunnya generalisasi, (2) **analisis morfometris**, yaitu penjelasan yang berhubungan dengan kerangka untuk menelaah bentuk-bentuk dan bangun-bangun dalam ruang, seperti pola-pola pedukuhan dan struktur jaringan-jaringan, (3) **analisis sebab-akibat**, yang meliputi penelaahan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyebaran geografis yang sederhana, (4) **penjelasan tentang proses terjadinya dalam kurun waktu (*temporal modes*)**, yang berhubungan dengan rantai penyebab (*causal chain*). Hal tersebut berhubungan dengan tanda-tanda (gejala-gejala) dan fakta-fakta yang merupakan sebab dan akibat yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berturut-turut dalam kurun waktu tertentu, (5) **analisis fungsional/ekologis**, yang menganalisis gejala-gejala berdasarkan peranan yang dimainkan dalam aspek kehidupan tertentu (misalnya peranan ekowisata dalam menyejahterakan masyarakat sekitar). Penjelasan ekologis meliputi penelaahan hubungan jalin-menjalin, yaitu suatu

konsep biologis yang banyak diterapkan dalam geografi maupun ekowisata, (6) **analisis sistem**, yaitu analisis yang berifat menyeluruh (wholeness) yang meliputi seluruh bagian dalam sub sistem yang saling terkait, berhubungan, ketergantungan, satu sama lain. Hal ini dapat digunakan dalam ekowisata melalui analisis sistem destinasi ekowisata, pemasaran ekowisata, SDM ekowisata, atau ketiganya secara utuh. Pada intinya, analisis sistem adalah suatu bentuk sintesis, yaitu suatu usaha untuk menanggulangi kerumitan-kerumitan yang ada.

Suatu sistem dapat pula didefinisikan sebagai serangkaian objek-objek, ditambah dengan atribut-atributnya beserta hubungan jalin menjalinnya (Marsden, 1976:61, dalam Ahman Sya, 2012:34). Dengan demikian, ketika pendekatan sistem ini diterapkan pada usaha untuk pembangunan dan pengembangan ekowisata, maka seluruh unsur yang terlibat di dalamnya akan menjadi unit analisis yang saling berhubungan dan ketergantungan. Peran yang dimiliki oleh suatu subsistem tidak lebih dominan dibandingkan dengan subsistem yang lain. Karena itu, pendekatan ini dipandang lebih cocok bagi ekowisata yang memerankan manusia dengan alam lingkungan berada pada posisi yang sama.

Bab VII

Peran NGO dalam Ekowisata

Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah tropis dan memiliki hutan hujan terbesar ke 3 di dunia. Hutan hujan merupakan salah satu ekosistem yang memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi didaratan. Karena kekayaan alam serta keindahannya Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wisata. Beberapa hal menurut Eagles (1994) yang membedakan wisata dengan pariwisata dengan produk kegiatan lainnya:

- a. Pengalaman rekreasi di lapangan sebagai produk dikonsumsi di daerah tersebut, jauh dari rumah konsumen.
- b. Biaya perjalanan menuju daerah wisata sering jauh lebih mahal daripada biaya masuk ke daerah wisata tersebut.
- c. Produk wisata adalah sebuah paket fasilitas dan program yang menarik orang untuk datang ke wilayah tersebut.
- d. Pengalaman wisata pada umumnya hanya berlangsung selama beberapa hari dan bersifat eksperimental; tidak dapat dimiliki kecuali sebagai kenangan.

- e. Produksi, pengiriman, dan konsumsi produk wisata berlangsung secara bersama-sama.
- f. Para konsumen terlibat secara aktif dalam memproduksi pengalaman, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
- g. Pengalaman wisata yang tidak sesuai dengan harapan konsumen tidak dapat dikembalikan dalam bentuk pengembalian biaya.
- h. Situs wisata dan pengalaman sulit untuk didapat sebelum benar-benar merasakan. Oleh karena itu, ajakan langsung dari teman atau keluarga adalah faktor utama yang menentukan pilihan.
- i. Produk wisata tidak dapat disimpan selama permintaan rendah dan kemudian dan kemudian dijual saat permintaan berlebih.
- j. Aspek-aspek penting dalam pengalaman wisata terjadi sebelum dan sesudah partisipasi di lapangan.

Dalam perjalanannya wisata yang dilakukan memberikan berbagai dampak negatif baik bagi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Akibat dampak tersebut maka terbentuklah wisata alternatif yang berwawasan lingkungan.

Wisata alternatif memberikan penawaran terhadap wisata yang berkelanjutan salah satu jenisnya adalah ekowisata. Ekowisata menekankan pentingnya konservasi ekologi tanpa meninggalkan kepentingan sosial ekonomi masyarakat lokal.

Tujuan ekowisata yang berbasis kepada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar memiliki kesamaan tujuan pada beberapa NGO/LSM yang bergerak dibidang lingkungan. LSM yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata berupa lsm lokal, nasional, atau internasional. Menurut Paulus Wirutomo (2001), Komunitas dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Komunitas Primordial adalah sebuah komunitss yang diikat oleh kesamaan ciri primordial seperti kesamaan suku, ras, agama dan daerah asal;
- b. Komunitas Okupasional yaitu komunitas yang terbentuk dan diikat oleh kesamaan pekerjaan/ profesi, seperti komunitas pedagang pasar, pegawai pabrik dan lain-lain;
- c. Komunitas Spatial adalah komunitas yang diikat oleh kesamaan tempat tinggal seperti komunitas dalam satu RT/RW, komplek, dusun atau kampung tertentu, komunitas penghuni rumah susun dan lain-lain.

Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non Governmental Organization*) memegang peranan penting dalam pengembangan dan manajemen pariwisata baik di negara maju maupun negara berkembang. Peran serta dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata khususnya pariwisata telah meningkatkan dampak-dampak positif dari pengembangan pariwisata dan meningkatkan motivasi untuk mengkonservasi alam dan budaya. Beberapa prinsip partisipasi Menurut I NengahSubadra (2006) Hasil peran serta lembaga swadaya masyarakat di beberapa destinasi pariwisata yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi dampak negatif dan intensitas yang berlebihan terhadap lingkungan dan habitat yang masih alami atau belum terjamah;
- b. Meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap sumber daya alam dan budaya yang keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupannya sehari-hari;
- c. Menghasilkan atau mendatangkan dana dari para donator yang peduli terhadap sumber daya alam dan budaya sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan

pelestarian alam dan budaya untuk menunjang pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development).

Adapun beberapa peran lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan pariwisata, seperti:

- b. Sebagai fasilitator atau penghubung di antara para stakeholder pariwisata misalnya: antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal, antara pengelola kawasan yang dilindung dengan masyarakat lokal, dan antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Kemampuan lembaga swadaya masyarakat dalam menengahi antara para pihak yang berkepentingan (*interest party*) semakin memperkuat posisinya sebagai lembaga yang independen dan sama sekali tidak memihak ke salah satu pihak yang berkepentingan atau netral (*neutral party*);
- c. Sebagai penggagas pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan (*community-based ecotourism development*) agar bisa memperluas tujuan dan mendapatkan dampak konservasi yang lebih besar dengan cara mengoptimalkan peran dan kerja sama dengan stakeholders yang lain.

- d. Sebagai pelatih dan penyedia sumber informasi yang relevan yang berhubungan dengan isu-isu pariwisata.
- e. Sebagai rekan kerja sama dari pengelola kawasan terlindung dalam upaya penerapan tujuan dari pengembangan pariwisata seperti; program pendidikan lingkungan dan program pemanfaatan sumber daya alam.
- f. Sebagai pengawas kinerja pemerintah khususnya departemen yang menangani kawasan yang dilindungi untuk meyakinkan bahwa program-programnya berjalan dengan semestinya.

Adapun menurut *Conference-Workshop on Ecotourism, Conservation and Community Development* yang diadakan di Filipina, 7-12 November 1999 menyebutkan kontribusi yang dapat dilakukan swasta untuk membantu aktivitas komunitas adalah melalui beberapa aspek langsung berikut:

- a. Akomodasi dimiliki oleh komunitas lokal. Hal ini mungkin dalam bentuk losmen untuk penginapan wisatawan, penginapan, atau rumah untuk disewakan yang biasanya dikelola oleh keluarga. Pendapatan diperoleh oleh keluarga pengelola dari

uang sewa kamar dan biaya makanan. Penyediaan makanan juga dapat dikelola secara bersama-sama oleh sebuah kelompok masyarakat, sehingga pendapatan yang diperoleh langsung masuk ke kas organisasi untuk kepentingan bersama.

- b. Penyedia transportasi, masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan ekowisata sebagai penyedia transportasi untuk para wisatawan yang datang.
- c. Pemanduan dan jasa pembawaan barang akan sangat membantu memperlancar perjalanan ekowisata bagi para ekowisatawan. Hal ini menjadi salah satu aspek penting ekowisata yang dapat menjadi wadah komunitas lokal untuk berpartisipasi.

Bab VIII

Peran CBETM, Perempuan, dan Masyarakat Adat

A. CBETM

Community Based Ecotourism Management atau yang lebih dikenal oleh istilah pendekatan manajemen ekowisata yang berbasis komunitas masyarakat. Ekowisata berbasis pada masyarakat ini berfokus pada kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya serta memainkan peran penting dalam melanjutkan tantangan dunia pariwisata dunia (UNEP, 2011). Dalam CBETM anggota masyarakat setempat adalah pelindung yang dianggap sebagai sumber daya alam. CBETM melibatkan masyarakat dalam praktik konservasi yang akan meningkatkan kesadaran lingkungan antar penduduk (Higgins & Desbioles 2009). Manajemen ekowisata berbasis masyarakat merupakan bentuk pendekatan perencanaan pembanguna pariwisata alternatif yang bersifat partisipatif, yang dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk pariwisata dengan mengenali dampak – dampak penting terhadap lingkungan, sosio-

budaya. CBETM merupakan alat pembangunan masyarakat yang memperkuat kemampuan masyarakat pedesaan untuk mengelola sumber – sumber ekowisata dengan keterlibatan mereka di dalamnya. CBETM memiliki karakter yaitu:

- Bentuk ekowisata berbasis yang memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan ekowisata
- Masyarakat akan memperoleh keuntungan dari kegiatan ekowisata setempat
- Menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi serta distribusi kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan

Pengembangan CBETM memiliki prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain (Suansri 2003):

- a. Mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industry ekowisata
- b. Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan
- c. Mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan

- d. Meningkatkan kualitas kehidupan
- e. Menjamin keberlangsungan lingkungan
- f. Melindungi ciri khas dan budaya masyarakat lokal
- g. Mengembangkan pembelajaran lintas budaya
- h. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia
- i. Mendistribusikan keuntungan kepada anggota masyarakat
- j. Menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungan

Bedasarkan hal tersebut CBETM adalah manajemen dalam ekowisata yang dibangun dengan prinsip kemitraan masyarakat dengan *operation tour*. Nasikun (2011) CBETM memiliki 4 manfaat antara lain: (1) mudah diorganisasi karena biasanya pariwisata ini dalam skala kecil, (2) memberikan peluang untuk lebih mudah dikembangkan objek atau atraksi wisata kecil karena dapat dikelola komunitas, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat, (3) memberikan kesempatan lebih untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, (4) CBETM tidak memberikan tekanan pada keberlanjutan cultural, akan tetapi

memberikan penghormatan para wisatawan terhadap budaya lokal

B. Peran Perempuan

Perempuan memberikan peran dalam mempertahankan pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam hal pariwisata. Ekowisata memberikan dampak bagi kehidupan penduduk lokal tidak terkecuali perempuan. Ekowisata menjadi panggung, dimana tiap perempuan mengambil perannya sesuai dengan pengaruh dari lingkungan kehidupan sekitar. Desti (2019) mengatakan motivasi keterlibatan perempuan dalam pengembangan desa ekowisata dianggap memberikan dampak positif, seperti membantu perekonomian keluarga. Sri (2013) menjelaskan adanya pengaruh motivasi perempuan dalam mengelola pondok wisata untuk mengaktualisasikan diriguna meningkatkan ekonomi keluarga. Peran perempuan dalam ekowisata sering dikaitkan dengan pandangan ekofeminisme. Ekofeminisme adalah teori yang mengatakan bahwa perempuan erat kaitannya dengan lingkungan dan perempuan penting dalam menjaga keberlangsungan alam. Teori ini menyebutkan bahwa

perempuan memiliki pengetahuan mendalam dan sistematis mengenai proses alam. Hal ini dicontohkan oleh aktivitas – aktivitas perempuan di desa. Rodda dalam Desti (2019) menyatakan bahwa perempuan tidak hanya mengawasi kerusakan lingkungan, namun juga berperan penting dalam pengelolaan lingkungan. Menurut IUOTO (*International Union of Official Travel Organization; Spillane, 1994*), dalam pengembangan pariwisata salah satu indikator yang harus diperhatikan adalah pemicu kemakmuran bagi masyarakat melalui perkembangan jasa pelayanan diantaranya adalah akomodasi. Berdasarkan kebutuhan wisatawan akan *homestay* maka peran perempuan akan menjadi sentral dalam hal pelayanan. Beban pekerjaan perempuan akan bertambah apabila rumahnya dijadikan *homestay* bagi wisatawan. Ekowisata dapat melibatkan perempuan dalam banyak cara seperti keterampilan dan minat. Ekowisata dalam konteks yang lebih luas, bisa beragam terkait dengan aktivitas lainnya misalnya mengolah makanan menjadi kuliner, membuka *took souvenir*. Keterlibatan perempuan dalam ekowisata dapat dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Keterlibatan secara langsung dalam ekowisata berupa

kemampuan perempuan mengolah hasil SDA dan menjadikan *souvenir* yang akan berdampak langsung meningkatkan ekonomi. Contoh lain dijelaskan oleh (Desti 2019) Budaya menenun pada kultural masyarakat Sembalun Luwang menjadikan daya Tarik tersendiri. Hal ini berdasarkan kepercayaan masyarakat adat sekitar jika wanita belum bisa menenun tidak boleh menikah karena dianggap belum memiliki kepribadian yang matang. Hal ini membuka kesempatan luas kesempatan kerja bagi perempuan. Peren perempuan dalam ekowisata dapat meningkatkan ekonomi bagi keluarganya.

C. Masyarakat Adat

Perkembangan ekowisata telah menjadi kontak antara masyarakat adat dengan masyarakat luar. Pembangunan ekowisata dengan melibatkan masyarakat adat akan memiliki dampak positif terkait pelestarian lingkungan. Reimer dan Walter dalam Riga (2016) menjelaskan bahwa dengan berlangsungnya kegiatan ekowisata menyebabkan masyarakat meninggalkan aktifitas pembalakan kayu. Kerusakan lingkungan akan berdampak langsung terhadap atas kualitas kehidupan. Masyarakat

hukum adat menurut Soekanto (2005) adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri yaitu memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Penghidupan masyarakat adat bersifat gotong – royong, namun bertentangan dengan pelestarian alam. Masyarakat adat cenderung berkebun dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Pengembangan ekowisata dengan melibatkan masyarakat adat dapat memberikan alternatif lapangan kerja sehingga perusakan lingkungan dapat diminimalisasi. Masyarakat adat dalam pengembanagan ekowisata dapat menjadi objek ekowisata berupa ekowisata budaya seperti Kampung Baduy di Banten. Kehadiran ekowisata ditengah masyarakat adat dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Sebagai contoh masyarakat yang terbiasa dengan berburu, berladang, bertani akan merubah sebagian aktivitasnya menjadi guide atau pemandu wisata dan beberapa berubah menjadi warung dan took souvenir. Dalam kegiatan perencanaan masyarakat adat dilibatkan dalam penentuan peraturan – peraturan terkait kawasan ekowisata tersebut.

Bab IX

Ekowisata Maritim

Data UNWTO menunjukkan bahwa pada tahun 2019 kenaikan kunjungan wisatawan Internasional sebesar 4 persen atau mencapai 1,5 Milyar kunjungan, dan diprediksi pula hal yang sama ditahun 2020. Tahun lalu adalah tahun yang sangat baik pertumbuhan pariwisatanya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, bahkan pertumbuhannya melebihi perkiraan UNWTO. Dikutip dari Detik travel bahwa kedatangan turis internasioanl pada tahun 2018 total 1,4 miliar, Timur tengah 64 juta meningkat 10 persen, Afrika 67 juta meningkat 7 persen, Asia dan Pacifik 343 juta meningkat 6 persen, Eropa 713 juta meningkat 6 persen dan Benua Amerika 217 juta meningkat 3 peren. Sector pariwisata adalah salah satu pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang paling kuat kata Zurab Sekjen UNWTO. Perkiraan pertumbuhan pariwisata tahun 2020 diperkuat dengan beberapa faktor pendorong yakni kemudahan pembuatan visa, biaya transportasi udara yang lebih murah, berbagai event

internasional seperti Olimpiade Tokyo dan Expo 2020 di Dubai.

Pariwisata tumbuh sejak perang dunia ke II, dari suatu fenomena ekonomi dan sosial menjadi salah satu Industri terbesar di dunia. Perkembangan pariwisata Internasional yang begitu cepat dalam abad terakhir ini dominan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan faktor teknologi. Pariwisata bukan sesuatu yang dibangun tapi dikembangkan seperti bentuk dan tempat pelayanan publik rumah sakit, pasar, toko, terminal, kantorpos, bank, keamanan, kebersihan, keindahan dan lain-lainnya yang ditata menjadi suatu daya tarik wisata.

Kepariwisataan dapat pula dikatakan sebagai perwujudan hak asasi manusia, hal ini sudah sejalan dengan sidang ke 13 WTO (World Tourism Organization) yang membahas isi kode etik pariwisata dunia yang dicetuskan di Santiago (Chili) pada tanggal 27 September-1 Oktober 1999, dalam pasal 5 (lima) berbunyi "Pariwisata adalah kegiatan yang bermanfaat untuk negara dan masyarakat yang dikunjungi".

Organisasi Internasional seperti PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO) telah mengakui bahwa

pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama termasuk di antaranya menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.

Pariwisata di Indonesia belum mendapat perhatian khusus kalangan masyarakat, karena keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang kepariwisataan itu sendiri. Seandainya SAPTA PESONA (Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan), itu tidak ada maka sampai sekarang belum dikenal adanya pariwisata. Pariwisata harus dikenal secara manusiawi dan universal. Pariwisata bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan suatu kegiatan yang beraktualisasi dengan kegiatan yang lainnya. Bahkan dia merupakan kegiatan kecil (mikro) yang menghidupkan kegiatan besar lainnya (makro). Karena kemikroannya sehingga kegiatan pariwisata harus tumbuh dari masyarakat bawah, mulai dari ekonomi kerumahtanggaan, (cendramata, home stay) koperasi primer maupun sekunder (suplyer bahan makanan, usaha perjalanan wisata) pengusaha konglomerat (sarana wisata, hotel, kawasan wisata, Biro Perjalanan Wisata)

Karena dinamis dan kompleksnya industri ini, maka perlu ditangani oleh orang yang profesional dan pembinaan

yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam PP No 50 Tahun 2011 pasal 14 Tentang RIPARNAS jelas ditegaskan bahwa ada 3 pembangunan Daya Tarik Wisata yaitu :

1. Daya Tarik Alam
2. Daya Tarik wisata Budaya, dan
3. Daya Tarik wisata hasil buatan manusia

Pariwisata dilihat dari segi produk, seperti usaha daya tarik wisata. Pengembangan usaha ini dibagi menjadi daya tarik wisata yang dapat dikelola secara profesional baik objek wisata alam maupun daya wisata buatan manusia yang tidak pernah akan habis di produksi. Fungsi kelestariannya akan terpenuhi karena satu daya tarik wisata dengan daya wisata lainnya akan terjadi persaingan yang arahnya menuju kualitas pelayanan yang prima dengan benuasa alamiah, karena sasaran wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah DTW yang alamiah. Budaya adalah merupakan jati diri suatu bangsa, orang yang tidak mengenal budayanya adalah orang yang tidak mempunyai jati diri, budaya dan pariwisata susah dipisahkan dalam kegiatannya, karena didalam paket wisata yang dinamis ada unsur atraksi budaya didalamnya. Minat khusus adalah suatu atraksi wisata yang membutuhkan kekhususan baik wisatawan

maupun alat yang digunakan seperti Arung Jeram, diving, Snorkling, Panjat Tebing, dan Ekowisata. Semua ini akan dikemas menjadi satu paket wisata yang handal, bervariasi, bentuk dan warnanya yang akan dijual kepada wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Aspek yang diperkirakan berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kesinambungan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia pada toleran pariwisata dunia untuk skala makro dalam lima tahun ke depan antara lain meliputi (ideologi), pertahanan, keamanan, hak azasi manusia : lingkungan (environment), globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas (free trade) kemajuan IPTEK yang akan mempengaruhi beberapa hal diantaranya adalah :

1. Perkembangan lingkungan global bisa sewaktu-waktu dapat mengancam atau sekaligus mendorong peluang dan pengembangan kepariwisataan Indonesia.
2. Masalah hak azasi manusia (HAM) aspek HAM sebagai faktor kekuatan eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengancam kesinambungan pembangunan diupayakan untuk dijadikan sebagai pendorong dengan kemantapan

HAM dalam skala prioritas pada setiap proses pembangunan dan dalam pengembangan pariwisata Indonesia maka kependudukan dan jaminan keselamatan HAM mulai dilaksanakan.

3. Masalah keselamatan lingkungan (*Environment*) dengan penetapan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) melalui pemeliharaan dan penyelamatan lingkungan.
4. Terjadinya blok-blok perdagangan/pengorganisasian diberbagai kawasan dunia, proses globalisasi dan liberalisme perdagangan dan investasi serta semakin kaburnya batas-batas negara dalam berinteraksi antar bangsa yang akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat.

World Tourism Organization (WTO) mengelompokan negara-negara di dunia pariwisata dalam 6 (enam) wilayah, yaitu ; wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Timur dan Fasifik. Dari 6 (enam) kawasan menurut WTO, pertumbuhan tertinggi sebesar 7,15 % akan dicapai oleh Asia Timur dan Pasifik, termasuk ASEAN di dalamnya sehingga pada tahun 2020 diperkirakan

wisatawan mencapai 20 juta, kondisi ini akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat menarik wisatawan tersebut datang mengunjungi Indonesia.

Dalam skala Internasional banyak produk-produk wisata yang khas mirip atau serupa yang dipasarkan oleh Negara-Negara lain, fasilitas yang menarik dan kreasi modern yang merupakan tantangan bagi pariwisata Indonesia dalam persaingan menarik para wisatawan, sedangkan kekuatan yang dimiliki pariwisata Indonesia yaitu banyaknya promosi produk wisata seperti wisata budaya, wisata alam, wisata bahari dan Ekowisata.

Pola pariwisata dunia dibedakan atas tujuan wisata dunia yang hirarki pangsa pasarnya berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan dan WTO yaitu :

- a. Eropa, jenis wisatanya ditunjang dengan sifat geografis yang menyatu dengan wilayahnya.
- b. Amerika, jenis wisatanya di dukung oleh teknologi modern.
- c. Asia Timur dan Pasifik, jenis wisatanya di dukung oleh Alam tropis dan budaya timur.

- d. Afrika jenis wisatanya didukung dengan keberadaan flora dan fauna alami budaya timur.
- e. Timur Tengah, jenis wisatanya di tunjang dengan sejarah Islam dan budaya arab.
- f. Asia Selatan, jenis wisatanya didukung dengan keberadaan alam dan budayanya.
- g. Asia Tenggara, dengan jenis wisata baharinya yang mempesona yang dikemas dengan konservasi yakni ekowisata Bahari.

Untuk daya tarik wisata di Indonesia yang merupakan bagian dari Asia Tenggara, daya tariknya lebih cenderung kepada wisata alam khususnya Bahari. Pada alam tropis yang menghasilkan keaneka ragam wisata alam pantai, pegunungan, flora dan fauna dan sebagainya serta wisata budaya Asia.

Dalam UU kepariwisataan No 10 tahun 2009, BAB V tentang kawasan strategis, pasal 12 dikatakan bahwa penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek diantaranya; bagian (d) perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup. Pada pasal 14 tentang Usaha pariwisata terdiri dari beberapa diantaranya adalah (i) usaha wisata tirta termasuk didalamnya adalah wisata bahari.

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, (2007: 101) sudah dituangkan pula tentang program pengembangan kepariwisataan secara nasional sebagai berikut :

*“Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional, sebagai wilayah **wisata bahari terluas didunia** secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa”.*

Pemerintah tidak saja memikirkan pengembangan kepariwisataan khususnya wisata bahari hanya untuk rencana jangka menengah, tapi lebih dari itu sudah pula terencana pengembangan wisata bahari tersebut dalam jangka panjang 25 tahun kedepan. Kepariwisataan yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari hulu sampai dengan hilir serta dapat mempekerjakan masyarakat

mulai dari yang yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Farid, 2011:62)

Gambar 33. Visitor was Diving and Snorkling



For visitors who love diving and snorkeling, this island is very suitable to visit because of the natural panorama offered there are 14 diving spot points which each provide its own beauty, including Januar Point, Aquarium Point and Tanjung Point. In addition there is also Shark Point, where visitors can feel the sensation of diving with sharks. (photo: IO/Prive. Doc) Sumber: <https://observerid.com/dive-with-sharks-on-kapoposang-island/>

A. Model Pengembangan Ekowisata Bahari Dalam

Perspektif Implementasi Kebijakan

1. Aspek Kebijakan Ekowisata Bahari

Pendekatan perencanaan wisata bahari (*tourism planning*), merupakan pendekatan perencanaan pariwisata

pada umumnya, dengan titik tekan pada usaha yang terpadu dan bertanggung jawab terhadap terpeliharanya sumberdaya lingkungan, (alam dan budaya) melalui pengelolaan yang dinamis. Pengalaman pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya di beberapa wilayah di beberapa negara membuktikan bahwa dengan 'menjual' dan 'memasarkan' kawasan wisata alam melalui pemasaran yang lebih aktif (dengan penjualan dan promosi misalnya), justru akan lebih menguntungkan. Selain merupakan tawaran pengalaman yang 'menantang' bagi wisatawan, dengan pengelolaan secara tepat, wisata alam akan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pemasukan daerah, bahkan bagi devisa negara.

Perencanaan wisata bahari adalah merupakan salah satu implementasi kebijakan dibidang kelautan yang merupakan salah satu sumber ekonomi khususnya pendapatan daerah, namun kalau tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk bagi pelestarian lingkungan hidup itu sendiri, khususnya biota laut serta akan terjadi perubahan sosial yang mendasar bagi masyarakat.

Keterlibatan instansi terkait dan stakeholder sangat berperan penting dan kesuksesan implementasi kebijakan

ini, kelautan dan kawasan pesisir pantai dihadapkan berbagai macam masalah perencanaan, kebijakan pengembangan wisata bahari dan masalah di legislatif ditambah lagi dengan lemahnya secara nasional kerjasama antar sektoral terhadap aktifitas isu-isu kebaharian pada umumnya, (Wilson 2005, dalam Farid 2011).

Dalam skala Internasional banyak produk-produk wisata yang khas mirip atau serupa yang dipasarkan oleh Negara-Negara lain, fasilitas yang menarik dan kreasi modern yang merupakan tantangan bagi pariwisata Indonesia dalam persaingan menarik para wisatawan, sedangkan kekuatan yang dimiliki pariwisata Indonesia yaitu banyaknya promosi produk wisata seperti wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari.

Untuk menjangkau keberadaan daya Tarik wisata bahari perlu dilakukan pemetaan yang dapat dilihat langsung melalui aplikasi Google SketchUp yang menghasilkan berupa gambar desain 3 Dimensi, untuk mengembangkan sistim pemetaan yang telah ada (Farid, 2017:7).

Di Indonesia potensi wisata alam sangat diminati oleh wisatawan mancanegara tertinggi setelah jenis wisata

lainnya, lagipula pengelolaannya tidak begitu sulit apabila ada suatu interkonesitas kebijakan satu instansi dengan instansi lainnya, dapat dilakukan melalui berkoordinasi bersama mewujudkan pengembangan pariwisata. Pengembangan wisata alam dilaksanakan melalui dua aspek yaitu produk dan pasar wisata. Hanya saja, pada pengembangan pariwisata alam, destinasi sebagai suatu produk wisata diharapkan mampu mendrive atau mengarahkan wisatawan untuk berwisata ke daerah atau area wisata alam tertentu. Dengan demikian daya tarik wisata tertentu memiliki segmen wisatawan tertentu.

Oleh karena area atau kawasan wisata alam ini relatif lebih rentan dibandingkan dengan bentuk pariwisata lainnya, maka pemanfaatan setiap atraksi alam diperhitungkan daya dukungnya. kawasan wisata alam yang dikunjungi wisatawan, dan telah melewati daya dukungnya, tidak akan menarik bagi wisatawan. Pada kondisi yang demikian menghasilkan kepuasan atau *satisfaction* yang rendah bagi wisatawan. Dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata diperlukan suatu perencanaan. Sesuai dengan posisi destinasi yang dapat berwilayah nasional atau daerah atau yang lebih sempit, berupa kawasan dan area

wisata mempunyai cakupan yang berbeda. Semakin luas cakupan wilayah perencanaan akan semakin kompleks persoalannya, sehingga faktor yang dipelajari semakin banyak.

Perencanaan pariwisata harus didasarkan hasil suatu penelitian sebab suatu penelitian akan menghasilkan suatu teori yang dapat dipergunakan untuk pengembangan. Sementara penelitian itu, ada yang dibentuk atas dasar suatu teori tetapi ada penelitian lain untuk mengkaji suatu teori tertentu. Teori yang dipergunakan sebagai landasan dalam penelitian pada bidang lain yang terkait dengan pariwisata dapat dipergunakan untuk menunjang atau untuk landasan pengembangan bidang pariwisata, yang memang aspeknya sangat luas.

Dalam PERDA No 6 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan, menegaskan pasal 29 bahwa : Penyelenggaraan perusahaan pariwisata di Wilayah Pesisir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan dan Badan hukum pada zona pemanfaatan terbatas. Perusahaan pariwisata yang dimaksud diatas adalah usaha sarana pariwisata alam seperti : akomodasi

pemondokan, makanan dan minuman, sarana wisata tirta (bahari), angkutan wisata, cendramata dan sarana wisata budaya.

Berkaitan dengan PERDA diatas, maka wilayah penelitian kami termasuk bagian dari wilayah yang memiliki wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang berpotensi di Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dipasarkan kepada wisatawan yang sekaligus dapat menjadi daerah tujuan wisata. Hal ini perlu disikapi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang, termasuk diantaranya memaksimalkan potensi daerah di bidang pariwisata, dengan tetap memperhatikan kelangsungan ekosistem, sehingga wisata yang ditawarkan adalah wisata berbasis ekologi di lingkungan pesisir dan laut (wisata bahari).

Propinsi Sulawesi Selatan memiliki sejarah keterkaitan erat dengan kehidupan laut, dan budaya masyarakat yang kaya akan pengalaman kehidupan pesisir dan petualangan di laut. Propinsi Sulawesi Selatan juga memiliki panjang garis pantai 1.937,7 km dan bertanggung jawab mengelola wilayah perairan laut seluas kurang lebih 48.000 km² (RENSTRA No 17 Tahun 2006), dan memiliki pulau dan kepulauan sebanyak 298 besar dan kecil, yang

sebahagian besar sudah bernama, salah satu dari kepulauan yang sudah terkenal sejak dahulu kala adalah gugusan Spermonde sepanjang pantai *Kabupaten Pangkep* sampai dengan *Pantai Barombong*, Kepulauan Tanakeke di *Kabupaten Takalar*, Kepulauan sembilan di *Kabupaten Sinjai*, pulau Kapoposan di *Kabupaten Pangkep* dan kepulauan Takabonerate di *Kabupaten Selayar* yang terletak di Selat Makassar dan laut flores, dengan ciri khas yang mewakili pulau-pulau tropis (RENSTRA NO 17 tahun 2006, tentang pengelolaan Wilayah Pesisir & Laut Propinsi Sulawesi Selatan).

Dalam RENSTRA NO 17 tahun 2006, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Laut Propinsi Sulawesi Selatan pada halaman 41 dikatakan bahwa salah satu sasaran indikator strategi dalam mengoptimalkan potensi wisata bahari, yaitu meningkatkan daya tarik obyek wisata bahari dengan langkah-langkah program yaitu : pemulihan citra pariwisata, peningkatan daya tarik produk wisata bahari, penguatan daya saing produk obyek wisata bahari, dengan sasaran utama adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya RENSTRA dan PERDA diatas merupakan landasan bagi pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan, untuk melakukan koordinasi bersama antar instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat, Swasta, LSM untuk bersama-sama memajukan wilayah pesisir yang sebelumnya termarginalkan karena kemiskinan menjadi wilayah pesisir yang dapat maju dan sejahtera, melalui pelaksanaan program pariwisata bahari.

Dari hasil proses pelaksanaan program diatas, sesuai periode rencana prioritas pertama tahun 2006- 2010 belum ada yang terlaksana dari program strategi yang sudah ada seperti ; pengembangan wisata bahari berkesinambungan (Ekowisata Bahari) , pengembangan pendidikan formal dan non formal kepariwisataan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari secara berkelanjutan, peningkatan kontribusi wisata bahari terhadap peningkatan PDRB.

Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Meter dan Horn bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kebijakan diatas. Dan kegiatan implementasi ini baru dapat dilakukan, setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga telah disetujui pula.

Banyak kalangan memperlakukan tentang perusakan lingkungan, oleh para pengembang disisi lain diperlukannya penanganan lingkungan dalam rangka keberlangsungan hidup manusia sekaligus dapat menjadi daya tarik wisata, dengan timbulnya permasalahan ini menjadi permasalahan global baik mengenai kelestarian lingkungan alam itu sendiri maupun perilaku budaya masyarakat cinta akan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan, dengan hal ini telah mendorong upaya dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah Indonesia, untuk menciptakan kondisi dengan berusaha menyelaraskan antara jawaban terhadap permasalahan global dan kepentingan-kepentingan bagi keberlangsungan pembangunan lokal/nasional, seperti kelangsungan dan kelestarian alam lingkungan (*nature preservation*) dan tanggung jawab terhadap perkembangan social masyarakat

(community development), (World Ocean Conference- Manado Septe 2008, dan Sail Bunaken Agustus 2009

Apabila pengembangan kawasan wisata bahari salah dalam perencanaan awal, maka akan terjadi resistensi terhadap kehidupan masyarakat sekitar, apalagi akan berdampak terhadap perusakan ekosistem yang ada, maka akan menjadi masalah dikemudian hari. Dilain pihak masih ada kawasan Taman Nasional Laut yang berpotensi di Propinsi Sulawesi Selatan namun belum mendapat tanggapan positif dari pemerintah.

Kepulauan Spermonde, Tanakeke Kabupaten Takalar , Kepulauan Di wilayah Makassar dan Pulau Kapoposon di kabupaten Pangkep adalah isu yang sudah lama berkembang, dimana pengelolaan kawasan ini oleh Pemerintah Daerah belum optimal mengembangkan Kawasan ini bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota yang memiliki potensi kawasan lebih menarik daripada kepulauan Bunaken, yang memiliki terumbu karang (atoll) yang sangat menarik, sebagaimana dimuat dalam sebuah hasil disertasi tentang kepulauan Spermonde (Suhaeb : 2008. Dalam Farid 2008).

Pengalaman pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya di beberapa wilayah di beberapa negara membuktikan bahwa dengan 'menjual' dan 'memasarkan' kawasan wisata bahari yang lebih aktif, akan lebih menguntungkan. Selain merupakan tawaran pengalaman yang 'menantang' bagi wisatawan, dengan pengelolaan secara tepat, wisata bahari akan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pemasukan daerah, bahkan bagi devisa negara.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 (2005: 181) telah ditekankan bahwa program pengembangan destinasi pariwisata bertujuan, untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang atraktif dengan pendekatan professional, kemitraan swasta, pemerintah dan masyarakat serta memperkuat jaringan kelembagaan serta mendorong investasi, dengan salah satu kegiatan pokoknya adalah :

*“Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan **ekowisata dan wisata bahari**, terutama dilokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat luas.”*

Jadi jelaslah bahwa, pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan sudah direncanakan dalam sebuah lembar daerah untuk memfokuskan pengembangan wisata bahari yang dimiliki baik secara nasional maupun tingkat lokal sangat besar potensinya untuk dikembangkan, sejalan dengan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang salah satu kelompok masyarakat yang termarjinalkan di negara kita ini baik karena kemiskinan maupun tingkat pendidikan yang sangat rendah.

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, (2007: 101) sudah dituangkan pula tentang program pengembangan kepariwisataan secara nasional sebagai berikut :

*“Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional, sebagai wilayah **wisata bahari terluas didunia** secara arif dan berkelanjutan, serta*

mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa”.

Pemerintah tidak saja memikirkan pengembangan kepariwisataan khususnya wisata bahari hanya untuk rencana jangka menengah, tapi lebih dari itu sudah pula terencana pengembangan wisata bahari tersebut dalam jangka panjang 25 tahun kedepan. Kepariwisataan yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari hulu sampai dengan hilir serta dapat mempekerjakan masyarakat mulai dari yang yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kebijakan diatas maka seharusnya pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan sudah dapat mengimplementasikan melalui program kerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota yang memiliki kawasan wisata bahari seperti Kepulauan Spermonde dalam wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, kepulauan Tanakeke di Kabupaten Takalar, Pulau kapoposan di Kabupaten Pangkep.

Dengan menghimpun berbagai informasi dari berbagai pihak terkait untuk melakukan program aksi dalam

menangkap peluang ini, agar Sulawesi Selatan memiliki destinasi lain selain Tana Toraja sebagai destinasi budaya. Dari berbagai kawasan wisata bahari baik dipesisir maupun pulau-pulau yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan di diduga belum terkelolah dengan baik, seperti 12 pulau kecil dalam wilayah Kota Makassar, juga terdapat di Kabupaten Takalar dan Pangkep. (Fairid 2008: 32)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan wisata bahari, selain membawa dampak ekonomi secara positif juga akan membawa dampak negatif dikemudian hari, baik dari segi lingkungan maupun sosial budaya masyarakat di daerah tujuan wisata bahari. Olehnya itu diperlukan ketegasan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang diikuti ketegasan sangsi (*reinforcement*) yang jelas, untuk memproteksi dampak negatif yang akan timbul dimasa yang akan datang, karena menyangkut kehidupan masyarakat hingga masa yang akan datang.

Mari kita bercermin dari beberapa isu-isu pengembangan wisata bahari di negara-negara yang sudah maju.

Tidak ada keraguan bahwa pengembangan pariwisata memiliki dampak ekonomi yang luas. Terdapat banyak contoh mengenai kehidupan masyarakat, wilayah dan bahkan negara yang bangkit kembali secara ekonomi, dengan manfaat sosial dalam kesempatan kerja yang lebih besar, layanan yang lebih baik, kesehatan yang membaik dan standar hidup yang meningkat. Meskipun beberapa penduduk lokal mungkin marah terhadap menjamurnya wisatawan di lokasi-lokasi seperti Antigua atau Hawaii, namun tidak ada yang menyangkal bahwa penduduk lokal yang sama mendapat manfaat dari bisnis, layanan dan infrastruktur yang didukung oleh para wisatawan. Realitasnya adalah bahwa yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan misalnya, kesempatan kerja, layanan-layanan sosial yang lebih baik meningkatnya lalu-lintas dan tekanan inflasi.

Pengaruh ekonomi dari pariwisata bisa bersifat multiganda dan sesuatu yang menggiurkan. Pariwisata nampak merupakan sebuah industri yang membutuhkan sedikit investasi atau modal, apalagi daya tarik sebuah wilayah sudah ada. Pariwisata membawa devisa yang signifikan kedalam sebuah negara, menyebar ke berbagai

industri layanan seperti makanan, akomodasi dan transportasi serta daya tarik (*attraction*) itu sendiri bagi masyarakat lokal. Selain itu, para wisatawan memberi kontribusi pada pendapatan pajak pemerintah daerah (Lokal), melalui pajak penjualan terhadap barang dan jasa, namun pemerintah tidak bisa berharap dari mereka dalam jangka panjang, karena mereka adalah pengunjung. Selanjutnya, pengunjung ini memiliki sedikit pengaruh atau kepentingan dalam pemerintahan. Akibatnya, pariwisata nampak merupakan pilihan yang sangat menarik bilamana pemerintah mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan ekonomi mereka. Namun demikian, ada sejumlah kasus yang mengilustrasikan konsekuensi-konsekuensi ekonomi negatif yang bisa berasal dari pengembangan pariwisata.

Terbukti bahwa jika aktivitas pariwisata merusak daya-tarik yang menjadi basisnya, selanjutnya investasi dalam infrastruktur pariwisata dan bisnis akan hilang. Oleh karena itu, kesinambungan merupakan komponen penting dalam keberhasilan ekonomi jangka panjang pada tiap usaha pariwisata berbasis alam. Misalnya, di Australia Barat di “Monkey Mia” dipahami bahwa manfaat-manfaat ekonomi

yang berasal dari pertunjukan ikan lumba-lumba sudah menjadi kepentingan komunitas lokal untuk melindungi ikan lumba-lumba.

Banyak penduduk lokal dengan cepat menekankan perlunya manajemen yang cermat terhadap “Monkey Mia” untuk melestarikan interaksi ikan lumba-lumba dengan manusia, karena akan membawa rejeki dollar wisatawan di Denham, pusat perdagangan di Shire. (Keys, 1987: 23)

Salah satu dampak ekonomi paling kelihatan dari pengembangan pariwisata terhadap masyarakat lokal adalah dampak dari inflasi harga. Meningkatnya permintaan yang berasal dari para wisatawan yang mengunjungi sebuah wilayah biasanya menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Ini bisa menimbulkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya jika mereka tidak memperoleh pendapatan yang lebih besar sebagai akibat dari pariwisata.

Istilah ‘kebocoran’ (*leakage*) mulai digunakan untuk menggambarkan kehilangan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat lokal, ketika uang yang dibelanjakan wisatawan

kepada masyarakat tersebut lari ke tempat lain. Ini sangat sering terjadi dalam situasi wisata bahari, karena pengunjung sering datang dengan kapal boat yang mereka sediakan dengan membawa perbekalan dari tempat lain. Selain itu, di banyak wilayah kepulauan, operator-operator wisata bahari bukanlah penduduk lokal tetapi merupakan operator luar, yang datang musiman dan memiliki perusahaan di tempat lain. Akibatnya, banyak uang yang dibelanjakan pada bisnis ini sebenarnya mengalir diluar dari masyarakat lokal.

Kurangnya pengeluaran wisatawan pada masyarakat lokal menimbulkan banyak kontroversi berkenaan dengan industri kapal pesiar. Kapal-kapal besar ini memuat pengunjung, meskipun jumlah pengunjung cukup banyak naik dan turun ke darat untuk mengunjungi masyarakat lokal, namun sedikit uang yang dibelanjakan pada makanan, akomodasi dan transportasi.

Salah satu isu berikutnya adalah bahwa manfaat-manfaat ekonomi yang timbul dari pengembangan pariwisata jarang terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat dan wilayah. Namun demikian, ada sejumlah lokasi yang mendapat manfaat ekonomi yang signifikan dari

pengembangan aktivitas wisata bahari. “Kaikora” adalah salah satu lcontoh okasi tersebut.

Kaikoura-Slandia Baru adalah masyarakat pantai yang kecil yang berlokasi disekitar semenanjung kecil di pantai Timur Laut Pulau Selatan Selandia Baru, berada didekat pantai dekat semenanjung yang berjarak kira-kira satu kilometer dari pantai sebelah Selatan Selandia Baru. Peningkatan perluasan yang cepa, dari 30 meter menjadi lebih dari 1.000 meter dalam jangka waktu singkat, dan pertemuan arus lepas pantai didekat Kaikoura menyebabkan menyemburnya air yang kaya-nutrien yang mendukung rantai makanan biota laut yang kaya. Akibat dari ekosistem yang melimpah ini, sejumlah spesies seperti ikan paus, ikan lumba-lumba dan anjing laut bisa ditemukan disana yang relatif dekat dengan pantai.

Kegiatan mengamati ikan paus dan ikan lumba-lumba secara komersial dimulai pada tahun 1988 di “Kaikoura” dan industri ini tumbuh dengan cepat menjadi aktivitas ekonomi yang paling penting di wilayah ini. Sebelum wisata yang berbasis mamalia laut ditetapkan di kota ini, Kaikoura tertekan secara ekonomi. Dampak dari pertumbuhan wisata pada kota ini menyebar luas:

Dampak dari *Whale Watch Kaikoura* pada kota kecil adalah besar. Sebelum adanya aktifitas usaha ini, Kaikoura dilihat sebagai sebuah wilayah yang tertekan secara ekonomi. Bisnis-bisnis berjalan turun, dan orang-orang harus meninggalkan wilayah ini untuk bekerja. Setelah adanya usaha yang meningkatkan jumlah wisatawan, bisnis-bisnis informal mulai mendapat manfaat melalui peningkatan penjualan ... Berbagai bisnis baru bermunculan dalam bidang akomodasi dan *catering*. Toko-toko kapal baru dan bar-bar, serta toko-toko cendramata juga bermunculan. Harga-harga perumahan juga meningkat, dan laju pertumbuhan kehidupan meningkat sedikit. Tanpa *Whale Watch Kaikoura*, saya kira kota kami pada akhirnya akan diberikan kepada hantu dan mati. (Hawke, 1995, dalam Farid 2011).

Indikator-indikator sosial-ekonomi menopang kesan-kesan Hawke dalam Oramas. Pada tahun 1991, sesaat setelah wisata berbasis-hewan laut besar dimulai di Kaikoura, pengangguran di wilayah tersebut masih lebih tinggi daripada rata-rata di Selandia Baru: hanya 29 persen warga distrik yang melaporkan pendapatan diatas \$ZN 30.000 per tahun, dibandingkan 44 persen secara nasional.

Jumlah pengunjung tahunan ke Kaikoura pada tahun 1989 diperkirakan 10.000. Angka ini meningkat dramatis mencapai 100.000 dalam lima tahun pada tahun 1993. Arus kunjungan wisatawan ini menghasilkan kebangkitan ekonomi yang signifikan ke distrik tersebut, dengan angka pengangguran yang menurun signifikan pula dan diikuti pendapatan rumah tangga meningkat dramatis. Kaikoura tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang tertekan secara ekonomi, tetapi sebagai salah satu 'kota yang melonjak' di Pulau Selatan Selandia Baru.

Adapun dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan wisata bahari, tampak dalam konsensus literatur tentang pariwisata bahwa permintaan wisatawan untuk berinteraksi dengan alam, yang meliputi lingkungan bahari, telah meningkat dengan cepat (Jenner dan Smith, 1992). Kepentingan manusia pada alam, lingkungan bahari dan pengalaman wisata alam tercermin dalam permintaan yang semakin meningkat dan nilai yang ditempatkan pada lingkungan pantai yang relatif tidak terganggu dan, khususnya, hewan-hewan buas (Gauthier, 1993). Meskipun pariwisata jenis ini disambut oleh banyak peneliti sebagai penyelamat yang cocok bagi populasi margasatwa yang

terancam, meliputi spesies-spesies laut, namun banyak penulis merasa khawatir tentang dampak-dampak lingkungan yang negatif yang berasal dari pariwisata berbasis alam (Butler, 1990; Wheeler, 1991, 1994; Zell, 1992; Pleumaron, 1993). Glasson, Godfrey dan Goodey meringkaskan pandangan-pandangan ini ketika mereka menyatakan: 'Pariwisata mengandung benih-benih kerusakan, pariwisata bisa membunuh pariwisata, yang merusak daya tarik lingkungan yang ingin dinikmati oleh para pengunjung' (Glasson, Godfrey dan Goodey, 1995: 27).

Ada sejumlah kasus signifikan yang di tulis oleh *Mark Oram* dalam *Marine Tourism Development, Impact and management* yang mengilustrasikan dampak-dampak negatif yang terkait dengan daya tarik alam-wisatawan (Hanna dan Wells, 1992; Burger dan Gochfield, 1993; Griffiths dan Van Schaik, 1993; Ingold dkk., 1993; Viskovic, 1993; Muir, 1993). Lebih khususnya, ada banyak penulis yang mengungkapkan keprihatinan terhadap dampak-dampak negatif dibebankan pada ekosistem bahari sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas wisata bahari.

Beberapa contoh mengilustrasikan keprihatinan-keprihatinan ini. Di Florida, binatang manati (*manatee*) India

Barat yang terancam menjadi sebuah daya tarik wisatawan yang utama:

Kepastian sebenarnya dalam melihat binatang manati antara bulan November-Maret di wilayah Blue Springs/ Sungai Crystal memberi kontribusi pada meningkatnya popularitas penyelaman terkait binatang manati dan darmawisata naik boat. Didalam wilayah Sungai Crystal itu sendiri (rumah ketiga bagi populasi binatang manati Florida pantai barat), lima toko selam hadir untuk melayani *scuba* terkait-binatang manati dan *snorkelling*. Pada puncak musim binatang manati, kepadatan penyelam di perairan muara bisa mencapai 1/10 m² dan, meskipun ada undang-undang pengganggu binatang manati, namun banyak orang akan mencumbu, memukul dan berusaha menaiki hewan-hewan tersebut.(Shackley, 1990: 313)

Shackley menyimpulkan tinjauannya terhadap pariwisata terkait-binatang manati: 'Tiap orang yang ingin memastikan kelangsungan hidup spesies-spesies akan dinasehati untuk menghindari pemburu spesies tersebut' (Shackley, 1990: 316).

Laporan selanjutnya mengidentifikasi keprihatinan terhadap dampak dari pertumbuhan wisata bahari di Pasifik utara:

Teluk Glacier di Alaska tenggara merupakan tempat dengan kontroversi panjang mengenai sensitivitas ikan paus punggung bungkuk terhadap gangguan kapal ... Pada tahun 1970 hanya empat kapal 'besar' (terutama kapal-kapal pesiar tetapi terkadang juga kapal feri negara bagian dan kapal militer) yang memasuki Teluk Glacier. Tujuh tahun kemudian, masuknya 103 kapal besar dicatat oleh Dinas Taman Nasional, dan banyak kunjungan tambahan dilakukan oleh kapal-kapal wisata yang lebih kecil dan kapal layar pribadi. 'hengkangnya tiba-tiba' ikan paus punggung bungkuk dari Teluk Glacier dilaporkan pada musim panas 1978, dan tahun berikutnya lebih sedikit ikan paus masuk dan bertahan di teluk tersebut selama musim ikan paus mencari makan pada musim panas. (Reeves, 1992: dalam Farid 2011)

Sebuah konsep penting yang mengilustrasikan bahaya yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan inkremental kecil terhadap lingkungan alam adalah 'rangkaiian rekreasi'. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Stankey (1985) ketika

ia menggambarkan kerusakan bertahap dari tempat berkemah ketika tempat tersebut menjadi semakin populer dengan para pengunjung. Fenomena ini diamati di banyak lingkungan alam yang berbeda dan bisa digambarkan sebagai berikut.

Ketika tempat-tempat alamiah asli ditemukan dan digunakan untuk rekreasi, maka terjadi perusakan terhadap atribut-atribut alam di tempat tersebut. Akibatnya, pengunjung-pengunjung sebelumnya yang tertarik oleh lingkungan asli yang tak tercemar, berpindah dan digantikan oleh jumlah yang lebih besar, dengan alasan kualitas lingkungan yang lebih rendah. Rantai ini berlanjut, yang menghasilkan jumlah pengunjung yang selalu meningkat, meningkatkan pembangunan infrastruktur tempat untuk mengatasi kebutuhan pengunjung dan menurunkan kualitas lingkungan. Sementara itu, 'kelompok penemu' awal, yang telah berpindah, menjelajahi dan 'menemukan' tempat asli lain dan memulai rantai pergantian rekreasi di tempat lain. Hasil-hasil keseluruhan dari pergantian tempat rekreasi adalah bergerak sedikit demi sedikit pembangunan fasilitas dan infrastruktur, yang berakibat hilangnya sedikit demi sedikit 'kesatwaan' (wilderness) dan kualitas lingkungan.

Yang terkait dengan konsep perubahan tempat rekreasi adalah model Siklus Hidup Pariwisata Butler (1980) (Gambar 5.1). ia menyatakan bahwa tempat tujuan atau daya tarik wisata melewati sejumlah tahap umum ketika ia menjadi lebih populer. Model ini mencerminkan konsep 'siklus hidup produk' khas yang digunakan secara luas dalam bidang manajemen bisnis dan pemasaran: yaitu, bahwa sebuah produk akan mengikuti pola perkembangan *lahir-tumbuh-dewasa* (*birth-growth-maturity*). Jenis jalur perkembangan ini telah lama diamati di lokasi-lokasi *whale watching* yang sudah terkenal dan memiliki relevansi dengan sejumlah kasus wisata bahari.

Kasus lain di Teluk Hanauma di kepulauan Oahu di Hawaii mengilustrasikan dampak lingkungan yang dramatis yang bisa terjadi sebagai akibat dari pariwisata dan tahap-tahap perkembangan yang diuraikan dalam model Butler.

Kasus Hanauma merupakan ciri khas dari banyak lokasi pantai yang terkenal oleh para wisatawan. terlihat bahwa degradasi lingkungan tak terhindarkan ketika pariwisata menjadi lebih baik. Akan tetapi, meskipun terdapat semua contoh kasus, namun ada kasus-kasus dimana pengembangan pariwisata memberi manfaat dan

dorong bagi masyarakat lokal yang lebih baik. misalnya, salah satu justifikasi utama yang digunakan dalam penentuan kawasan wisata bahari adalah nilainya sebagai daya tarik wisatawan. Demikian pula, nilai dari spesies terancam yang masih hidup, sebagai daya tarik wisatawan, memberi justifikasi untuk perlindungan hewa-hewan laut seperti ikan paus, lumba-lumba, anjing laut, kura-kura laut, dan ikan hiu (Orams dan Forestell, 1995). Selanjutnya, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengalaman wisata bahari bisa dimanfaatkan untuk mendorong pariwisata agar menjadi lebih bertanggung jawab secara lingkungan – menjadi *conservationist* bahari yang aktif (Orams, 1997).

Organisasi-organisasi lingkungan seperti *Earthwatch*, *World Wide Fund for Nature*, *the Pacific Whale Foundation*, *jaringan Marine Mammal Stranding* dan banyak lainnya kesemuanya dapat memanfaatkan kegiatan dan pengalaman wisata bahari untuk mendapatkan pendonor dan dukungan bagi pekerjaan konservasi, akibatnya wisatawan bahari dalam beberapa kasus, secara aktif mendukung perbaikan lingkungan wisata bahari.

Dalam tulisan Orams tentang sebuah daya tarik wisata bahari di Hanauman yang merupakan sebuah teluk kecil yang tersembunyi dan berlokasi di pulau Oahu, Hawaii, kira-kira 15 menit perjalanan dari kota Honolulu. Sebelum tahun 1950-an, teluk yang terpencil ini digunakan oleh penduduk lokal Hawaii untuk pencari makan secara tradisional dan oleh nelayan-nelayan musiman dan peserta kemah di akhir pekan. Terumbu karang ikan dan kehidupan laut lainnya melimpah pada saat itu dan pemanfaatan-pemanfaatan sumberdaya ini masih skala kecil. Selama tahun 1950-an, sebuah jalan pantai dibangun dari Honolulu sampai Hanauman. Dengan membaiknya akses mengubah secara dramatis jumlah orang yang mengunjungi teluk suatu peningkatan pengunjung yang pesat. Menjelang tahun 1964 diperkirakan lebih dari 1.000 ikan dan 500 terumbu karang diambil setiap tahun oleh para pengunjung ke teluk tersebut dengan menggunakan penyelaman dan senjata tombak. Keprihatinan atas dampak-dampak ini menimbulkan sebuah pelarangan dalam mengambil semua kehidupan laut dari teluk pada tahun 1967, dan pada tahun 1970 Hanauma diumumkan sebagai taman laut dan dipromosikan sebagai tempat tujuan wisatawan

Sejumlah operator perjalanan swasta mulai menjalankan perjalanan bis ke teluk bagi wisatawan dimana *snorkelling* (penyelaman) dan *fish feeding* (memberi makan ikan) menjadi aktivitas yang populer. Peningkatan pemanfaatan wilayah ini menghasilkan permintaan akan perbaikan fasilitas untuk melayani wisatawan. Jalan dipbaiki, tempat parkir diperbesar, ruang istirahat dan fasilitas pariwisata ditambah. Fasilitas-fasilitas ini berfungsi meningkatkan popularitas teluk tersebut, dan keprihatinan terhadap 'daya dukung' lokasi. Pemerintah lokal mendanai sebuah penelitian pada tahun 1977 untuk menentukan tingkat pemanfaatan optimum untuk taman tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa daya dukung teluk sebaiknya ditetapkan pada 1.000 pengunjung per hari. Popularitas Hanauma berlanjut dan pemanfaatan teluk melebihi 10.000 pengunjung per hari diperkirakan bahwa menjelang tahun 1981 lebih dari 2 juta wisatawan mengunjungi teluk kecil ini setiap tahun.

Menilai dampak dari pemanfaatan menjadi tempat wisata bahari terhadap teluk ini adalah sulit. Sebagaimana halnya dengan semua ekosistem laut, interaksi-interaksi ikan karang dan fauna laut lainnya dengan komponen-

komponen ekosistem lainnya adalah kompleks, dinamis dan akibatnya sulit diukur. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa biomassa (bobot) ikan didalam terumbu karang di Hanauma adalah jauh lebih tinggi dari tingkat keasliannya, sedangkan biomassa dari organisme-organisme lain seperti karang, sepon dan fauna laut lainnya adalah jauh lebih rendah dan semakin menurun. Beberapa penyebab ditunjukkan. *Pertama*, praktek umum dari *fish feeding* oleh para wisatawan mendorong konsentrasi yang lebih besar daripada normal terhadap spesies ikan karang yang akan menerima makanan yang diberikan oleh manusia. *Kedua*, menginjak-injak secara langsung terhadap organisme *benthic* oleh para perenang dan penyelam sifatnya merusak. *Ketiga*, banyak lumpur yang teraduk oleh jumlah orang yang menyeberang di perairan dangkal sifatnya mengganggu bagi kehidupan laut seperti karang. *Keempat*, banyak bahan minyak gosok anti sinar matahari (*suntan lotion*) dan urin yang masuk ke perairan tersebut sebagai akibat dari jumlah wisatawan yang banyak sifatnya merusak. Reynolds menyatakan bahwa 'menjelang pukul 10, perairan itu keruh (dari lumpur) dan terdapat lapisan minyak *suntan lotion* pada perairan tersebut. *Kelima*, pancuran air tawar yang

dipasang untuk kenyamanan wisatawan di pantai menimbulkan tingkat aliran air tawar yang lebih tinggi dari normal, yang mengubah komposisi salinitas dekat pantai.

Konsensus yang dibuat berkenaan dengan Hanauman adalah bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan yang cepat, bersama-sama dengan infrastruktur yang dibangun untuk melayani kebutuhan mereka, menimbulkan p tajam penurunan kualitas ekosistem teluk, khususnya di wilayah-wilayah dangkal yang sering digunakan. Namun demikian, Hanauma masih populer dan memberi contoh mengenai konsep rangkaian rekreasi. Sekarang banyak orang menganggap Hanauma tidak lebih dari 'sebuah wilayah korban, sebuah lokasi dimana wisatawan massal bisa dianjurkan untuk tidak membawa dampak negatif ke teluk tersebut untuk kepentingan semua pihak, sehingga mengurangi dampak yang sama di teluk-teluk dan pantai-pantai lain di pulau Oahu.

2. Aspek pengembangan Ekowisata Bahari

Ada aspek-aspek pokok yang menjadi titik tolak dalam perencanaan ekowisata bahari. adapun empat aspek yang menjadi pertimbangan yakni , pertama kelestarian lingkungan/ ekologi, lalu aspek nilai ekonomi yang akan

ditimbulkan, dampak sosial kemasyarakatan dan terakhir adalah tanggung jawab/ kepentingan nilai estetis (Farid 2008: 56). Secara lebih jauh gambaran kepentingan dan manfaat yang dari pendekatan perencanaan ekowisata pada suatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. Aspek Ekologis

Program pengelolaan ekowisata akan memberikan manfaat secara ekologis suatu wilayah perencanaan, terpeliharanya ekosistem melalui pengendalian secara optimal berapa besar/banyak jumlah pengunjung ke suatu kawasan adalah komponen yang dihasilkan melalui program pengelolaan paket ekowisata ini. Komponen lain yang lebih detil misalnya adalah bagaimana pengendalian polusi/limbah dengan elemen-elemen pendukungnya (daur ulang sampah, pemakaian bahan non kimia;, kemudian pengendalian sistem drainase, serta upaya konservasi spesies langka beserta habitatnya, adalah manfaat ekologis lain yang dapat dikembangkan melalui program perencanaan ekowisata ini.

Disamping itu, pengelolaan ekowisata adalah bentuk pengembangan wisata yang paling sedikit membutuhkan tambahan sarana prasarana pendukung, dibandingkan

dengan bentuk pengembangan wisata konvensional, seperti wisata resort (resort based tourism) ataupun wisata taman rekreasi-hiburan (recreation park tourism). Dengan meminimalkan faktor infrastruktur penunjang ini, berarti memberikan kesempatan penggunaan energi tinggi secara efektif dan efisien dan upaya bagi pemanfaatan sumberdaya lokal.

2. Aspek Nilai Estetis.

Aspek ini bertujuan bagaimana manfaat nilai estetis dan penghargaan terhadap kelangsungan lingkungan hidup dapat dikembangkan melalui program ekowisata. Disamping itu, pengenalan dan pengembangan ekowisata juga akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab (baik itu wisatawan, masyarakat, dan aparat terkait) terhadap kelangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penghargaan akan nilai kepentingan lestari nya satwa yo.ng sangat langka pada habitat aslinya misalnya, tidak mungkin tergantikan oleh adanya tiket masuk yang dapat inengganggu siklus kegiatan satwa tersebut. Untuk komponen yang lebih teknis, arunan perencanaan dan perancangan kawasan (urban design guidelines), diiiharapkan dapat, berpijak pada tanggungjawab

akan kelestarian lingkungan, sehingga pada transformasinya, seperti arahan bentuk dan *layout* tapak kawasan, adalah design yang selaras dan rancangan bagi elemen-elemen bangunan dan lingkungan bangunan (elemen atap, dinding, ketinggian lantai, jalur pedestrian, dan sebagainya) adalah yang dapat memanfaatkan komponen alami.

3. Aspek Ekonomi.

Pengelolaan ekowisata secara tepat dan terarah, disamping adalah kebutuhan karena manfaat ekologis dan estetikanya, juga dapat memberikan nilai ekonomis bagi pengelola di pusat maupun daerah. Seperti yang berlangsung pada wilayah di beberapa negara, ekowisata telah menjadi suatu industri dengan manfaat ekonomis, yaitu memberikan pemasukan devisa negara yang sangat berarti.

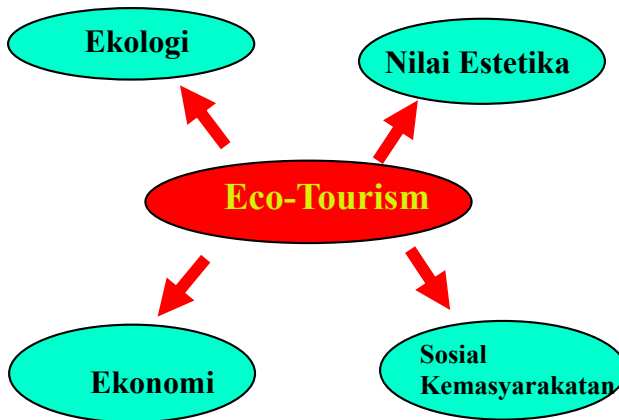
Dalam konteks pembangunan ekonomi Nasional jelas bahwa pariwisata sangat memegang peran yang utama dalam aktifitas ekonomi (Farid 2017: 3 ICEST)

4. Aspek Sosial Kemasyarakatan.

Dalam perjalanannya, sisi sosial kemasyarakatan tidak pernah dapat dilepaskan pada suatu pengembangan kepariwisataan. Program ekowisata pada suatu wilayah,

langsung atau tidak langsung, akan memberikan perhatian bagi berkembangnya pembangunan kehidupan masyarakat (*community development*). Untuk ini memang sangat diharapkan kerjasama terpadu antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta (*private sector*) terkait.

Gambar 34: Aspek-aspek dalam Ekowisata



Masih banyak yang menerjemahkan atau mengindonesiakan "ecotourism" dengan bahasa yang keliru, padahal "ecotourism" atau "ecological tourism" arti bahasanya yaitu wisata ekologi. Definisinya dalam bahasa Inggris adalah: ***"Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the***

well-being of local people.” (S. Balangy and M.E. Wood, 1992).

Ekowisata adalah suatu konservasi yang utuh, komunitas, dan perjalanan wisata yang berkelanjutan, dengan kata lain bahwa siapa saja yang terlibat dalam aktivitas pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip ekowisata dibawah :

- *Mengurangi dampak*
- *Membangun kepedulian terhadap lingkungan dan budaya lokal*
- *Membangun pengalaman yang positive bagi wisatawan dan pengunjung serta tuan rumah.*
- *Menyediakan anggaran khusus untuk konservasi.*
- *Menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal*
- *Bangun rasa sensitif bagi tuan rumah terhadap politik, lingkungan dan pendekatan sosial (TIES 1990 Dalam Farid 2018*

Gambar 35. Hamparan mangrove di Kepulauan Tanakeke
Kabupaten takalar Sulsel



Sumber: <http://puterakelana02.blogspot.com/2011/07/pulau-tanakeke.html>

B. Analisis Pasar dan Pemasaran Ekowisata Bahari

Karakteristik pasar : Dengan tingginya minat wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia khususnya mengunjungi obyek alam, atraksi dan seremonial budaya di Tana Toraja dan Desa Kajang di Bulukumba, Taman Laut Pulau Kapoposang di Selat Makassar dan Taman Nasional Laut Takabonerate di Selayar, Sulawesi Selatan, maka kawasan pulau-pulau Tanakeke yang relatif dekat

dengan kota Makassar sebagai daerah lintasan dan persinggahan, dapat menjadi alternatif kunjungan bagi wisatawan yang memiliki waktu kunjung singkat (*one day by trip*).

Hambatan Pasar : Masih sedikitnya biro perjalanan wisata di Indonesia yang melirik produk wisata alam laut ini, karena merasa kendalanya banyak, seperti : tingkat jual program ekowisata jenis ini ditentukan oleh isi kemasan produknya, materinya harus mengandung unsur pelestarian lingkungan, menawarkan pola perjalanan yang akrab dengan alam dan mengasah kepekaan terhadap lingkungan. Dengan demikian, pengembangan ekowisata bahari membutuhkan suatu perhitungan yang cermat dan mencakup berbagai permasalahan di daerah tujuan ekowisata. Selain itu, prinsip pasar ekowisata tidak semata-mata berorientasi utama komersial (ekonomi) tetapi adalah keterpaduan yang berimbang antara tujuan bisnis dan kelestarian sumberdaya alam dan budaya yang harus saling memberi manfaat satu sama lain (*mutual*).

1. Aspek Pasar

Sejak tahun 2000, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat dengan rata-rata sebesar 9 – 14%

setiap tahun, hingga pada tahun 2010 sebanyak 12 juta kunjungan. Pariwisata Indonesia pada akhir tahun 2010, diproyeksikan akan merupakan sektor industri terbesar dalam hal pemasukan devisa negara.

Dengan mempertimbangkan jumlah wisatawan yang tertarik pada keindahan alam utamanya keindahan alam laut, kekhasan dan budaya lokal, maka wilayah pulau-pulau Tanakeke, merupakan kawasan yang berpotensi menjadi model pengembangan wisata alam di di daerah ini khususnya wisata alam laut di Kawasan Timur Indonesia (Farid : 2008)

2. Konsep Pemasaran Ekowisata Bahari

Dalam pemasaran pariwisata dikenal ada 3 aspek yakni: *Branding*, *advertisement* dan *selling* yang perlu dikembangkan dalam memasarkan destinasi pariwisata (Farid 2019:8) ketiga aspek diatas memiliki sifat satu dengan lainnya saling keterkaitan.

Branding merupakan aspek pertama untuk menyimpan kesan dalam pemasaran produk ekowisata bahari.

Advertisement suatu bentuk cara dalam memperkenalkan produk ekowisata bahari baik iklan melalui offline maupun online yang lebih efektif dan efisien.

Selling adalah bentuk promosi produk ekowisata bahari yang dilakukan baik secara langsung kepada konsumen maupun melalui perantara provider, atau melalui pelaksanaan even.

Aspek Di tingkat global pertumbuhan pasar ekowisata tercatat jauh lebih tinggi dari pasar wisata secara keseluruhan. Berdasarkan analisis TIES (2000) pertumbuhan pasar ekowisata berkisar antara 10-30 persen per tahun sedangkan pertumbuhan wisatawan secara keseluruhan hanya 4 persen. Tahun 2010 WTO memperkirakan pertumbuhan ekowisata sekitar 30 persen. Di kawasan Asia Pasifik sendiri angka pertumbuhan tadi berkisar antara 10-25 persen. Di Indonesia diperkirakan sekitar 30 persen wisman pada tahun 2010 merupakan ekowisatawan (*ecotourist*). Statistik ini menunjukkan bahwa pergeseran perilaku pasar wisata sedang berlangsung saat ini dan ekowisata diperkirakan akan menjadi pasar wisata yang sangat prospektif di masa depan.

Siapa yang dimaksud dengan ekowisatawan? Mereka adalah segmen wisatawan yang memiliki motif, minat, dan ketertarikan pada hal-hal yang khusus di daerah tujuan wisata, terutama pada kegiatan konservasi alam dan budaya

yang menjadi pusat kegiatan wisatanya. Disebut ekowisatawan karena di dalam perjalanan wisatanya kelompok ini sangat sensitif dan peduli pada lingkungan sehingga hanya menggunakan sumberdaya alam secara hemat dan yang tidak kalah penting, "*contributes to the visited area through labour or financial means aimed at directly benefiting the conservation of the site*" (Ziffer, dikutip Orams, 1995). Mencari pengalaman baru dengan cara belajar dari dan bersama masyarakat lokal tentang beragam sumberdaya dan daya tarik alam maupun budaya setempat, merupakan ciri penting segmen wisatawan ini.

Berdasarkan studi-studi pasar wisata di berbagai negara, TIES (2000) mencoba memetakan karakteristik sosial-demografis pasar ekowisatawan sebagai berikut:

Pertama, wisatawan berusia menengah/produktif atau berkisar antara 35-54 tahun, meskipun ada variasi usia berdasarkan kegiatan wisata yang diminati dan faktor biaya. Di Belize (Amerika Tengah) 82 persen ekowisatawan berada pada kelompok umur antara 18-50 tahun.

Kedua, sebesar 50 persen merupakan perempuan, meskipun distribusinya berbeda berdasarkan jenis kegiatan wisata. Artinya, ekowisata bukan lagi didominasi kaum laki-

laki. Kepedulian dan kebutuhan pada lingkungan alam juga menjadi karakteristik penting wisatawan perempuan.

Ketiga, mereka pada umumnya berpendidikan tinggi. Sebanyak 82 persen di antaranya mencapai tingkat pendidikan tinggi. Penting diketahui pula bahwa lulusan sekolah lanjutan semakin banyak menyukai ekowisata sehingga pasar ekowisata ini semakin besar. Sekali lagi, gambaran para ekowisatawan di Belize dapat dijadikan contoh yang menunjukkan 65 persen di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi.

Keempat, sebagian besar (60 persen) wisatawan menyukai kegiatan wisata dalam berpasangan, 15 persen menyukai perjalanan bersama keluarga, dan hanya 13 persen suka bepergian sendiri. Ciri yang menonjol di sini adalah perjalanan wisata dalam kelompok kecil ataupun individual (*free individual tourist*).

Kelima, wisatawan pada umumnya mempunyai durasi perjalanan wisata yang panjang. Kelompok terbesar (50 persen) menyukai perjalanan dalam rentang waktu 8-14 hari. Hal ini bisa dimaklumi karena motivasi mereka biasanya tinggi pada pencarian keunikan alam dan pengalaman yang lengkap atas perjalanan wisata.

Keenam, wisatawan bersedia membelanjakan uangnya lebih banyak dibandingkan dengan wisatawan biasa. Kelompok terbesar (26 persen) mengatakan mereka telah menyediakan belanja wisata antara US\$ 1.000 sampai dengan US\$ 1.500 per perjalanan. Dalam hal tujuan konservasi ODTW dan upaya pemberdayaan ekonomi lokal mereka bahkan bersedia memberikan pengeluaran ekstra.

Ketujuh, unsur atau objek penting perjalanan wisata adalah kawasan alam bebas, kehidupan satwa liar, dan kegiatan hiking/treking. Pengamatan burung, misalnya, merupakan kegiatan wisata yang utama bagi sekitar 30 persen wisatawan AS (Epler Wood Report, 2004. Dalam Farid 2008)).

Kedelapan, motivasi utama untuk melakukan perjalanan di masa depan adalah untuk menikmati pemandangan alam dan mencari pengalaman atau tempat baru.

Pengetahuan yang lebih mendalam tentang karakteristik psikografis ekowisatawan juga sangat diperlukan terutama untuk maksud pengembangan produk wisata. Dari sepuluh ciri yang dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara psikografis ekowisatawan

termasuk dalam apa yang disebut sebagai kelompok *allocentric*, yakni mereka yang *active when traveling, spending most of their waking hours exploring and learning about the places they visit, rather than soaking up the sun (or tequila)*.

Selain sisi permintaan dari sudut penawaran juga terlihat fenomena menarik dalam pasar ekowisata. Telah tercatat tidak kurang 600 penyelenggara perjalanan ekowisata yang - ini sangat penting dalam kaitan dengan karakteristik ekowisata - 85 persen di antaranya berskala kecil, yakni mempekerjakan kurang dari 20 orang. Meskipun berskala kecil, namun bisnis ekowisata ini mampu memutar omset sebesar US\$ 250 juta (*The International Ecotourism Society, 2000*).

Di samping itu tidak sedikit lembaga non-pemerintah yang giat berkampanye untuk memajukan ekowisata sebagai tipe perjalanan wisata maupun sebagai produk yang perlu dikembangkan oleh penyedia jasa. Jaringan lembaga seperti TIES (www.ecotourism.org), bekerjasama dengan hampir semua negara melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat setempat untuk mendorong dan menyosialisasikan prinsip-prinsip ekowisata dalam

pembangunan pariwisata. Di Indonesia, misalnya, lembaga swadaya seperti Bina Swadaya, Indecon, dan Yayasan Ekowisata Halimun adalah beberapa di antaranya yang giat memelopori aktivitas ekowisata. Demikian pula kebijakan pemerintah melalui penetapan fungsi taman nasional (National Park) dapat dipandang sebagai bagian dari respons penyedia jasa ekowisata tersebut.

Penyedia jasa wisata seperti hotel juga semakin gencar mempromosikan produk yang berlabel lingkungan (*eco-labelling*). Di AS telah dibentuk asosiasi perhotelan bernama Green Hotels Association (www.greenhotels.com) yang beranggotakan tidak kurang 65 perusahaan *international chain hotel* dan menawarkan produk ramah lingkungan. Mereka tidak hanya menawarkan produk tersebut tetapi juga melakukan kampanye kepada tamu hotel untuk mendukung produk-produk ramah lingkungan

Bab X

Penutup:

Ekowisata dan Industri

Kesuksesan ekowisata, salah satunya ditentukan oleh peran penting dari industri pariwisata terutama dalam menumbuhkan apresiasi untuk kepentingan konservasi. Alasan mengapa industri memiliki peran penting, karena mereka memiliki modal dasar pendanaan yang memadai, yang dapat digunakan secara bersama-sama dengan masyarakat. Misalnya saja dengan NGO masyarakat ekowisata dan lain-lain.

Peningkatan peran industri pariwisata dalam konteks ekowisata dapat memberikan *support* yang kuat bagi masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan, serta memanfaatkan kerjasama antara masyarakat dengan industri.

Keterkaitan antara ekowisata dan industri pariwisata diantaranya adalah kepemanduan wisata, operator *outbound*, operator *inbound* dan pemandu wisata lokal. Hal-hal penting yang dapat diperankan melalui kerjasama

industri dan masyarakat di antaranya adalah: (1) informasi tentang pasar ekowisata, (2) *advice* terkait pengunjung untuk melakukan atraksi, akomodasi, kuliner dan layanan transportasi, (3) program pemasaran ekowisata, (4) penyediaan pelayanan untuk memfasilitasi pengunjung sehingga memiliki apresiasi yang tinggi, (5) penyiapan pelatihan pemandu lokal dan wirausaha, (6) investasi dalam pengoperasian ekowisata, dan (7) pengoperasian ekowisata dengan tetap memperhatikan aspek-aspek ekologi.

A. Pendahuluan

Dari semua yang terlibat dalam kegiatan ekowisata, industri pariwisata memiliki peran penting dan menentukan yang diapresiasi oleh para pelestari lingkungan. Banyak *conservationist* yang tidak suka berurusan dengan perusahaan yang bermotivasi laba. Namun demikian, para pengusaha ini sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi melalui ekowisata. Mereka dapat berpartner dengan LSM, pengelola kawasan lindung dan masyarakat jika ekowisata ingin menjadi lebih dari sekadar konsep abstrak.

Semakin lama, industri pariwisata menjadi pendukung paling kuat untuk mendukung kawasan lindung, dan dinamika ini harus didorong dengan membangun mekanisme komunikasi dan kolaborasi yang memadai antara pengelola kawasan lindung dan *tour operator*.

Mekanisme pariwisata tingkat internasional dan bahkan nasional, mensyaratkan bahwa seperangkat pengaturan yang kompleks (transportasi, penginapan, pemandu, dll.) ada untuk memfasilitasi perpindahan wisatawan dari rumah mereka ke tujuan wisata. Setiap pengaturan memerlukan serangkaian kegiatan khusus dan karyawan, infrastruktur, serta biaya yang sesuai.

Beberapa operator perjalanan memiliki spesialisasi khusus pada bidang ekowisata. Namun, ada juga bahkan banyak operator wisata petualangan dan wisata pada umumnya, yang sebagian besar tidak memenuhi standar ekowisata. Praktik pariwisata konvensional masih mendominasi dalam industri pariwisata, sama seperti yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita, terlepas dari inisiatif bagi mereka untuk menjadi lebih berkelanjutan atau tidak. Namun demikian, industri pariwisata dalam ekowisata melakukan program *go green* dengan kecepatan yang

semakin tinggi karena wisatawan menuntut layanan yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, banyak hotel sekarang mendaur ulang kaleng dan botol, serta mendorong para tamu untuk menggunakan kembali handuk agar menghemat penggunaan air.

Jumlah bisnis ekowisata juga meningkat ketika berbagai perusahaan baru didirikan. Banyak dari mereka telah mengembangkan pemahaman sejak awal tentang komitmennya terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Sementara itu, bisnis pariwisata alam yang lebih tua dan lebih mapan cenderung lambat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekowisata ke dalam kegiatan mereka.

LSM yang bergerak di bidang konservasi yang bermitra dengan *tour operator* swasta, merupakan model yang ideal untuk memberikan pedoman teknis yang meningkatkan operasi wisata alam menjadi operasi ekowisata.

B. Tautan dalam Rantai Pariwisata

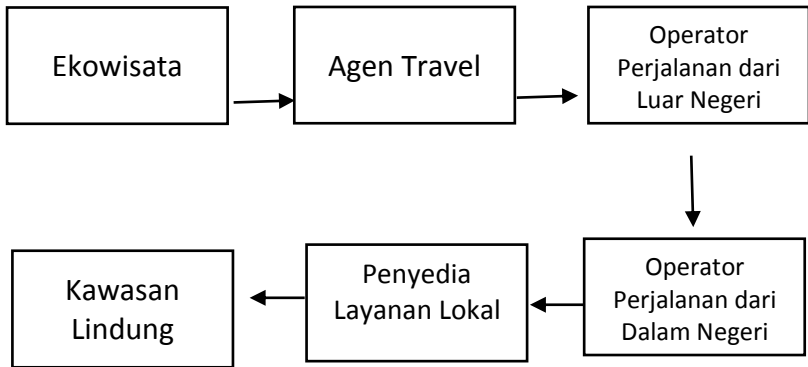
Gambar dibawah ini mendeskripsikan tautan dalam rantai pariwisata yang menghubungkan ekowisata menjadi kawasan lindung.

1. Agen Perjalanan - biasanya "toko" umum atau rangkaian outlet *ritel* yang menawarkan berbagai layanan perjalanan domestik dan internasional kepada pelanggan, dapat mengunjungi sambil berdiskusi dan tatap muka dengan tenaga penjualan di kota atau lingkungan mereka sendiri. Mereka biasanya akan menjual program dari operator *outbound*. Pelancong lingkungan termasuk ekowisata, jarang sekali membeli tiket perjalanan melalui agen umum yang lebih fokus pada tujuan wisata massal, kapal pesiar, dll.
2. Operator *outbound* - biasanya operator ini berspesialisasi dalam wilayah geografis tertentu seperti Amazon atau Amerika Selatan, atau pada aktivitas tertentu seperti mengamati burung atau mendaki gunung. Mereka akan berlokasi di negara asal wisatawan ramah lingkungan. Mereka memproduksi brosur setiap tahun dengan serangkaian jadwal keberangkatan tetap untuk setiap program wisata, dan juga mereka sering memiliki pelanggan setia yang kembali untuk membeli perjalanan secara teratur. Mereka akan mengumpulkan paket lengkap untuk turis termasuk tiket pesawat, dan dapat menyediakan penanggungjawab wisata untuk

menemani kelompok klien mereka, yang biasanya terlebih dahulu akan membuat kontrak dengan operator termasuk untuk memberikan layanan di negara tujuan.

3. Operator *inbound* - terletak di negara tujuan, mereka menyediakan paket layanan lengkap dari kedatangan di negara keberangkatan. Mereka mungkin memiliki fasilitas sendiri seperti kendaraan, pondok-pondok dan lain-lain, atau mereka dapat mensubkontrakkan kepada yang lain di wilayah kota yang akan dikunjungi wisatawan. Kontrak kerja operator *outbound* intinya adalah menyediakan semua layanan "di darat". Dengan munculnya internet, mereka semakin bersaing secara langsung dengan operator *outbound* lainnya.
4. Penyedia layanan lokal - di luar kota-kota besar, di dekat objek wisata alam, ini dapat berupa penginapan lokal dan pemilik hotel, penyedia transportasi lokal, ekowisata berbasis masyarakat yang menjadi panduan bagi pemandu lokal. Di sinilah komunitas lokal biasanya bergabung dengan rantai pariwisata. Lebih banyak pelancong yang tidak sibuk yang terhubung langsung dengan ini, terutama jika mereka memiliki fitur dalam panduan perjalanan seperti *lonely planet*, dll.

Gambar 36. Struktur Industri Pariwisata



Sumber: Andy Drum dan Alan Moore, 2002.

C. Operator Perjalanan Pribadi Dalam Proses Perencanaan

Menerapkan ekowisata dapat menjadi usaha yang sangat menantang walaupun tergolong mahal. Namun, jika industri pariwisata terlibat dalam hal ini sejak awal, biaya dapat sangat dikurangi dan kesuksesan dapat dibuat sebesar mungkin. Memasukkan pengalaman operator *tour* pribadi dalam proses perencanaan dan desain ekowisata akan sangat berharga dan tidak dapat diduplikasi oleh LSM konservasi. Masukan *essesntials* oleh berbagai segmen industri pariwisata dapat meliputi:

1. Memberikan informasi tentang pasar potensial untuk kegiatan ekowisata.

2. Memberikan saran tentang preferensi pengunjung dalam hal ketertarikan, akomodasi, layanan makanan dan transportasi.
3. Memasarkan kegiatan ekowisata.
4. Menyediakan satu atau lebih layanan yang diperlukan untuk memfasilitasi akses pengunjung dan apresiasi terhadap situs ekowisata
5. Menyediakan pelatihan pemandu dan pengusaha lokal
6. Berinvestasi dalam operasi ekowisata. Investasi kemungkinan akan bergantung pada ekspektasi tingkat pengembalian finansial tertentu.
7. Mengoperasikan operasi ekowisata seperti *ecolodge*. Dalam situasi kawasan lindung, operator ini akan dianggap sebagai pemegang konsesi. Dengan demikian, mereka akan tunduk pada pedoman ketat yang mencakup segala sesuatu mulai dari penggunaan sumber energi hingga jumlah tamu yang mungkin mereka tangani pada satu waktu hingga pemanfaatan pasokan dan tenaga kerja lokal. Mereka juga diharuskan membayar biaya konsesi kepada manajemen kawasan lindung.

Daftar Pustaka

1. Budowski, G., (1976). *Tourism and Environmental Conservation: Conflict, Coexistence or Symbiosis?* Environmental Conservation 3(1): 27-31.
2. Desti, A., (2019). *Peran Perempuan dalam Perkembangan Desa Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kaki Gunung Berapi Rinjani Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Tesis.* Medan: Universitas Sumatera Utara.
3. Drum, Andy and Moore, Alan. 2002. *Ecotourism Development. A Manual for Conservation Servation Planners and Managers. Volume I, An Introduction to Ecotourism Planning.* Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA.
4. Higgins-Desbiolles, F., (2009). *Indigenous Ecotourism's Role in Transforming Ecological Consciousness. J. Ecotur.* 8 (2), 144-160.
5. <http://agolf.xyz/sawai-surga-tersembunyi-di-seram-utara/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.06
6. <http://lcc-abbeytravel.com/leisure/en/article/komodo-national-park-is-the-home-of-the-unique-and-rare-komodo-dragon-varanus-komodoensis-/1843> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.43
7. <http://rinjaninationalpark.com/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.45
8. <http://www.thefearchronicles.com/wp7in1/wp-content/uploads/2015/07/wakatobi.jpg> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.02

9. <https://akurat.co/gayahidup/id-417213-read-punya-laut-indah-dan-kaya-banggai-gelar-festival-mancing> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.00
10. <https://blog.pigijo.com/tak-kalah-dari-tanjung-lesung-taman-nasional-ujung-kulon-wajib-kamu-kunjungi/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.10
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Tangkoko_Batuangus_Nature_Reserve diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.57
12. <https://id.pinterest.com/pin/821062575786598765/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.55
13. https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Taka_Bonerate diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.53
14. <https://ijenvolcanotour.com/wp-content/uploads/2016/02/ijen-plateau-blue-fire.jpg> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.18
15. <https://indonesiaexpat.biz/travel/the-bare-necessities-gunung-leuser/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.33
16. <https://kaltimprov.go.id/berita/kepulauan-derawan> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.49
17. <https://mytravelingphotograph.blogspot.com/2012/06/mount-gede-adventure-unforgettable.html> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.16
18. <https://placeandsee.com/mount-halimun-salakanational-park> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.12
19. <https://sunrise-indonesia.com/eksotika-gunung-bromo/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.16
20. <https://vacationspotindonesia.wordpress.com/2015/04/13/kerinci-seblat-national-park/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.35

21. https://www.google.com/search?q=siberut+national+park&safe=strict&sxsrf=ALeKk01S8R6hFJ_BdbOTbvowT6BiaQpKBA:1593525155305&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-icrm16nqAhXKAnIKHcsTAikQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1517&bih=675#imgrc=bjADUBCRB617XM diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.37
22. https://www.indonesia-tourism.com/lampung/way_kambas.html diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.39
23. <https://www.klook.com/id/activity/24296-baluran-national-park-safari-tour-surabaya/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.22
24. <https://www.lakescientist.com/kelimutu-crater-lakes/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.47
25. <https://www.liputan6.com/news/read/3916170/wisata-wan-taman-nasional-alas-purwo-melonjak-53-persen> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.24
26. <https://www.papuparadise.com/news/where-rajampat-is-and-what-beauties-can-i-discover/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.08
27. <https://www.pariwisatasumut.net/2019/03/bukit-lawang-di-bahorok-sumatera-utara.html> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.31
28. <https://www.togean.net/trip/wonderful-togean-5d4n/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.59
29. <https://www.triptipedia.com/tip/Wvj2HwL/get-to-know-more-about-the-island-of-java> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.14
30. https://www.villa-arun.com/portfolio/ijen-crater/attachment/ijen-crater-sulfur-lake_3x2/ diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.20

31. <https://www.wego.co.id/berita/waktu-terbaik-berkunjung-ke-toraja/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 13.04
32. <https://www.wonderfulbali.com/bali-barat-national-park/> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.41
33. <https://www.wsj.com/articles/a-river-cruise-through-borneo-to-hang-with-orangutans-1454605998> diakses pada tanggal 30 juni 2020 pukul 12.51
34. kajianpustaka.com (26 Juni 2020). Beranda: *Ekowista (Pengertian, Prinsip, Karakteristik dan Jenis)*.
35. Kartajaya, Hermawan (2006). *Marketing Mix Seri 9 Elemen Marketing*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
36. Kartawijaya, Hermawan and Sapta Nirwandar. (2013). *Tourism Marketing 3.0 Turning Tourist to Advocate*.ed. Kevin Leonard Rachman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
37. Kasali, Rhenald (1998). *Membidik Pasar Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
38. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2012). *The Wonders of Ecotourism* Indonesia. Jakarta: Kemenparekraf RI.
39. Kesrul, M (2004). *Meeting Incentive Trip, Conference and Exhibition*. Jakarta: Graha Ilmu.
40. Kotler, Philip and Gary Armstrong (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi 12* (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
41. Kotler, Philip and Kevin Keller (2012). *Marketing Management, 14e*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
42. Nasikun (2011). Model Pariwisata Pedesaan: Pemodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan. *Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

43. National Park Office (2012). *Nusa Tenggara Timur Province (Development of Ecotourism Utilization Aspect Case Study)*. Labuan Bajo: Komodo National Park Office.
44. Pendit S., Nyoman (1999). *Wisata Konvensi, Potensi Gede Bisnis Besar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
45. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah. <http://danamonpeduli.or.id/wp-content/uploads/2011/05/PERMENDAGRI-33-2010.pdf> [5 April 2012].
46. Piagam Pariwisata Berkelanjutan tahun 1995.
47. Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
48. Priono, Y (2012). *Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat*. Jurnal Perspektif Arsitektur. Volume 7 No.1.
49. Putra, T.R (2006). Hiperurisemia dalam Sudoyo A.W., Setyohadi, B., Alwi I., Simadibrata K. M., Setiati S., *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*, edisi IV, 1203-07. Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam, UI.
50. Riga, S (2016). *Lubuk Larangan Ujung Tanjung Desa Guguk: Upaya Pelestarian Lingkungan dan Sumberdaya Perikanan pada Daerah Aliran Sungai Tipe Transporting System*. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai ke-2. Tesis. Yogyakarta: UGM, Badan Penerbit Fakultas Geografi.
51. Saputra, Ramadan (2011). *Pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah daerah kabupaten sijunjung*. Padang: Skripsi FISIP Unand.
52. Saputro, PB (2011). *Tata Kelola Wisata di Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah* [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

53. Sedarmayanti (2005). *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*.
54. Shimp, A. T (2013). *Komunikasi Pemasaran Terpadu*. (Muhammad Masykur, Ed.) (8th ed.).
55. Smith, August W (2001). *The Quality Audit Handbook*. Wisconsin: ASQC.
56. Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
57. Soekanto, Soerjono (1990). *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keliarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
58. Soemarwoto, Oto (1998). *Budaya Daerah dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Depdikbud.
59. Spillane, James (1994). *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
60. Sri, A (2013). *Faktor-Faktor yang Memotivasi Perempuan Sebagai Pengelola Pondok Wisata di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar*. Jurnal Analisis Pariwisata. Vol 13(1). P. 1-10.
61. Suansri, P (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.
62. Sudarto, G (1999). *Ekowisata: Wahana Pelestarian Alam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Yayasan Kalpataru Bahari bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia.
63. Suwanto, G. (2002). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
64. The Independent Commission on Good Governance in Public Services [ICGGPS] (2004). *The Good Governance Standard for Public Services*. Office for Public Management (OPM) and the Chartered Institute of

- Public Finance and Accountancy (CIPFA)*. London: ICGGPS.
65. TIES (*The International Ecotourism Society*) (2002). *Quebec Declaration on Ecotourism*. Canada: TIES.
 66. Tjiptono dan Chandra (2012). *Market Segmentation*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
 67. UNEP (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. New York: United Nations Environment Programme.
 68. United Nations Environment Programme [UNEP] dan [WTO] World Tourism Organization (2002). *Quebec Declaration on Ecotourism*. Canada, Quebec City: World Ecotourism Summit.
 69. Ward, J (2000). *The Relative Net Economic Benefits of Logging and Tourism in Native Australian Forests*. PhD Thesis. Australia: Griffith University, Gold Coast.
 70. Warpani, S.P. and I.P. Warpani (2007). *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
 71. Wood, M.E. (1999) *Ecotourism, Sustainable Development and Cultural Survival: Protecting Indigenous Culture and Land through Ecotourism*. *Cultural Survival* 23(2): 25-59.
 72. Wood, Megan Epler (2002). *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability*. USA: UNEP.
 73. Yoeti, Oka A (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*. Jakarta: Alumni.
 74. Yulianda, F. 2007. *Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi*. Makalah. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor: IPB.

75. Farid Said, Surayal Hizmi, Hamsu Hanafi, 2019. The Promoting Tourist destination After Earthquake in Lombok (Jurnal of Tourism and Hospitality Management Vol 7 David Publisher) <http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/JTHM>
76. Farid Said, Ahmad Wahidiyat, Dyah Darma Andayani, Harifuddin, Rudi Salam, 2017. Pengembangan Daya Tarik Wisata melalui Perancangan Peta Wisata Pantai Berbasis Goodle SketchUP. Jurnal Pekomnas Vol 2
URL Artikel:
<http://scholar.google.co.id/citations?user=3tRA72EAAA&hl=id&oi=ao>
77. Farid Said, Rudi Salam, Haedar Akib, Aris Baharuddin. An Analysis of Tourism Visit Trend. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (SSSEHR) (ICEST 2017) Atlantis Press. <http://scholar.google.co.id/citations?user=3tRA72EAAA&hl=id&oi=ao>
78. Farid Said 2011. Implementasi Kebijakan Kepariwisataaan (Suatu Studi Kasus pada Wisata Bahari di Sulawesi Selatan). Disertasi Pascasarjana S3 Universitas Negeri Makassar
79. Farid Said, 2008 Hasil Penelitian Pengembangan Ekowisata Kawasan Kepulauan Tanakeke (PEK2T) Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.

Biodata Penulis



- Nama : Prof. Dr. Sc. H.M. Ahman Sya, Drs.,
M.Pd., M.Sc.
- Tempat/Tgl.Lahir : Ciamis, 12 Juni 1958
- Jabatan : Guru Besar Tetap
Geografi FIS-UNJ
- Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV-E/Guru Besar
- NIP : 195806121983031004
- NIDN : 0012065801
- Sertifikat Pendidik :
- Alamat Kantor : Jl. Raya Rawamangun Muka,
RT.11/RW.14, Rawamangun,
Jakarta Timur
- Alamat Rumah : Jalan Marinir Timur V Blok AA-6
No.2, RT/RW 001/013, Kavling
Marinir, Kelurahan Pondok
Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur, 13450.
- Email : hm.ahmansya@gmail.com

Pendidikan:

- a. SD di Ciamis Lulus 1971
- b. SMPN di Ciamis Lulus 1974
- c. Pesantren Sindangsari Ciamis 1971-1974
- d. SMAN di Kuningan Lulus 1977
- e. Drs/S-1 Geografi IKIP Bandung Lulus 1982
- f. M.Pd./S-2 PLS IKIP Bandung Lulus 1988
- g. M.Sc. (*aanvulen*)/S-2, *Vakgroep Geographie, Faculteit Wetenschappen, Rijsuniversiteit Gent, Belgie.* Lulus 1992
- h. Doctor in de Wetenschappen (Dr. Wet.)/
Doctor of Science (Dr. Sc)/S-3, *Vakgroep Geographie, Faculteit Wetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, Belgie.* Lulus 1996
- i. Lulusan terbaik Lemhanas 1999

Bintang:

- a. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun
- b. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun
- c. Satya Lencana Karya Satya 30 tahun

Pengalaman Jabatan dan Aktivitas Organisasi:

1. Guru Besar/ Dosen PNS Universitas Siliwangi Tasikmalaya sejak 1982-2018.
2. Wkl. Sekr. Prog. Pengalaman Lapangan FKIP UNSIL 1982-1984.
3. Anggota dan Aktivistis Paguyuban Pasundan Cabang Tasikmalaya 1982-2004.

4. Ketua dan pendiri Jurusan Geografi Univ. Siliwangi dan Wkl. Pemb. Dekan III FKIP Univ. Siliwangi 1984-1985.
5. S-2 di IKIP Bandung 1985-1988.
6. Ka. Bid. Lingkungan Hidup Lemb. Penelit. Univ. Siliwangi 1989- 1991.
7. Sekretaris Rektor Univ. Siliwangi 1991-1992.
8. S-2 (*aanvulen*) dan S-3 di University of Gent, Belgium 1992-1996.
9. Pendiri Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi 1997.
10. Pembantu Rektor IV Bid. Kerjasama Univ. Siliwangi 1996-1998.
11. Pembantu Rektor III Bid. Kemahasiswaan Univ. Siliwangi 1998- 2001.
12. Anggota Senat Guru Besar UNSIL 2003-2016.
13. Ketua Jurusan IPS dan Ka. Prog. Studi Pend. Geografi FKIP UNSIL 2001-2006.
14. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana UNSIL 1997-2012.
15. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Univ. Negeri Jakarta 1997- 2000.
16. Anggota Pokja Geografi Lemhanas 1999-2004.
17. Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Kab. Tasikmalaya 2005-2010, 2010-2015.
18. Sekjen ARSSI (Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia) pusat 2000- 2005.
19. Ketua Umum ARSSI (Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia) pusat 2010-2014.
20. Anggota GIS Asia-Pasific 1997-2012.

21. Ketua Forum Rektor Jabar Timur 1999-2012.
22. Anggota team penilai buku pelajaran geografi SMU Kemendiknas 1988-2012.
23. Ketua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Bidang Kerjasama 2005-2010.
24. Wakil Ketua Bale Atikan Pasundan (BAP) PB Paguyuban Pasundan bidang kerjasama, kemahasiswaan dan kesiswaan 2005-2006.
25. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan 2010-2014.
26. Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan 2006-2010.
27. Staf Pengajar Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat 1999-2012.
28. Rektor Universitas ARS Internasional Bandung 2006-2010
29. Koordinator Program Doktor (S-3), Kajian Budaya. Pengelolaan Pendidikan, Fakultas Ilmu Budaya UNPAD 2010-2012.
30. Guru Besar Luar Biasa, Program Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya UNPAD 2010-2012.
31. Anggota Dewan Kurator Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung 2006-2012.
32. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) Bandung 2010- 2013.
33. Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kemenparekraf RI, 2012-4 Juni 2015.

34. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan. Kepariwisata (DBPKK), Kemenpar RI, 5 Juni 2015 - 4 Januari 2018.
35. Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kepariwisata, Kemenpar RI, 4 Januari 2018-28 Februari 2018.
36. Guru Besar Tetap Geografi UNJ, 1 Februari 2018-Sekarang.
37. Anggota senat FIS UNJ dan anggota senat UNJ 2018 sekarang
38. Ketua senat FIS UNJ 2018- sekarang.
39. Ketua komisi III bidang sumberdaya senat UNJ, 2018-2020.
40. Sekretaris Senat UNJ 2020-sekarang.
41. Anggota majelis pembina STP NHI Bandung 2018 sekarang
42. Guru Besar pembina Politeknik Pariwisata Negeri Palembang 2017-sekarang.
43. Guru Besar pembina Politeknik Pariwisata Negeri Lombok 2017- sekarang.

Karya Ilmiah dan Buku:

1. Tingkat Kemakmuran Masyarakat Desa (1982.)
2. Resistensi Program KB dan Usaha-usaha PLS dalam Menanganinya (1988).
3. The Ten Thousand Hills of Tasikmalaya (1992).
4. Geographical Study of the Agricultural Land Use (A Case Study of Tasikmalaya, West Java, Indonesia, Based Upon Field Work and Remote Sensing Techniques) (Belgium, 1996).

5. Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya (2000).
6. Bukit Sepuluh Ribu Tasikmalaya (2001).
7. Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (2002).
8. Panjalu, Latar Belakang Historis dan Rencana Pengembangannya Sebagai Objek Wisata Komersial (2003).
9. Geografi Pariwisata Kab. Tasikmalaya (2004).
10. Geowisata Kabupaten Kuningan (2005).
11. Dari Madrasah ke Pendopo, Otobiografi Bupati Tasikmalaya (2006).
12. Geowisata Kabupaten Tasikmalaya (2007).
13. Geowisata Priangan Timur (2007).
14. Sejarah Kampung Naga Tasikmalaya (2008).
15. Pembelajaran Peta (2010).
16. Pendidikan Berbasis Budaya (2011).
17. Pengantar Geografi (2012).
18. Geografi Perilaku (2013).
19. Geologi Pariwisata (2018).
20. Geografi Pariwisata (2019).
21. Geografi Politik (2020).
22. Manajemen Ekowisata (2020).
23. Pengantar Ekowisata (2020).

Biodata Penulis

Farid Said, kelahiran Makassar 23 Juli 1964, dari pasangan Said Nasir Al Amri dan Asia Bahweres, dan sekarang telah memiliki 4 orang anak. Pendidikan terakhir di Pasca Sarjana S3 Universitas Negeri Makassar tahun 2011 dengan judul disertasi: *Kebijakan Kepariwisata Studi Kasus Pariwisata Bahari*.



Dan S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar tahun 2001

Farid Said Bergabung di Kementerian Pariwisata sebagai dosen tetap sejak 1992. Dan 2010 menduduki jabatan fungsional Dosen Lektor Kepala (*Associate Professor*) di Politeknik pariwisata Makassar, selanjutnya 2014 diangkat sebagai Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama dan Penjaminan MUTU, 2017 berkarir di Politeknik Pariwisata Lombok sebagai Wakil Direktur I bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2018 pengurus Badan Promosi Pariwisata Lombok, serta Ketua Tim Pemulihan Pariwisata Pasca Gempa Bumi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Oleh Kementerian Pariwisata di tahun yang sama.

Farid Said Sejak 2015 menjadi dosen tidak tetap pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, penguji internal dan external pada Pasca Sarjana S3 Program Studi Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar dan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

2001 sampai dengan 2005 ditunjuk sebagai Counter Part Makassar Tourism Project IAPSD AusaAid, project Indonesia Australia. 2015 sudah menjadi Asesor Kompetensi dan Auditor Usaha Pariwisata.

Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pariwisata diluar Negeri diantaranya di *Santex Singapura, Songkla University Thailand, Canberra Institute of Teknologi Australia, Xianmen University Tiongkok dan Northen Illinois University USA.*

Farid Juga aktif sebagai penulis dan presenter Nasional dan internasional bidang pariwisata yang tulisannya sudah teregister tingkat Scopus ID: 57201942026, googleshooler dan lain lain.

Sejak 2002 sebagai Penyusun dan penulis *Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah* tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah Timur Indonesia, sekaligus penulis artikel di Jawa Post Group seperti Harian Fajar Makassar, Kendari Post, Lombok Post.

Praktisi dibidang pariwisata, khususnya pemandu wisata dan Manejer disalah satu Biro Perjalanan Wisata di Makassar yang digelutinya kurang lebih 12 tahun. Pernah dipercayakan sebagai sekertaris PHRI Sulsel dan sekertaris Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan, dan Kota Makassar (BPPD).

“BUKU INI SAYA PERSEMBAHKAN BUAT KEDUA ORANG TUA SAYA ALMARHUM, ISTRI TERCINTA DAN KE EMPAT ANAK ANAK YANG SAYA BANGGAKAN”

Lampiran:

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
2. Pengembangan ekowisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata.
7. Tim Koordinasi Ekowisata provinsi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaku ekowisata provinsi.
8. Tim Koordinasi Ekowisata kabupaten/kota adalah wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaku ekowisata kabupaten/kota.

9. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan/atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II JENIS DAN PRINSIP

Pasal 2

Jenis-jenis ekowisata di daerah antara lain:

- a. ekowisata bahari;
- b. ekowisata hutan;
- c. ekowisata pegunungan; dan/atau
- d. ekowisata karst.

Pasal 3

Prinsip pengembangan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
- b. konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata;
- c. ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;
- d. edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
- e. memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
- f. partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian

- ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan
- g. menampung kearifan lokal.

BAB III PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dalam mengembangkan ekowisata dilakukan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu oleh pelaku ekowisata.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pariwisata daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan ekowisata yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat antara lain:
 - a. jenis ekowisata;

- b. data dan informasi;
 - c. potensi pangsa pasar;
 - d. hambatan;
 - e. lokasi;
 - f. luas;
 - g. batas;
 - h. kebutuhan biaya;
 - i. target waktu pelaksanaan; dan
 - j. disain teknis.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. daya tarik dan keunikan alam;
 - b. kondisi ekologis/lingkungan;
 - c. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi;
 - d. peruntukan kawasan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. sumber pendanaan.

Pasal 7

Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata Provinsi dengan memperhatikan kebijakan ekowisata Nasional;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana pengembangan ekowisata sesuai dengan kewenangan provinsi;
- c. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata Provinsi dengan memperhatikan kebijakan ekowisata Nasional;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana pengembangan ekowisata provinsi dengan rencana pengembangan ekowisata kabupaten/kota, rencana pengembangan ekowisata nasional dan rencana pengembangan ekowisata provinsi yang berbatasan; dan

- e. memaduserasikan RPJMD dan RKPD yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha dengan rencana pengembangan ekowisata;

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 8

Pemanfaatan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. pengelolaan kawasan ekowisata;
- b. pemeliharaan kawasan ekowisata;
- c. pengamanan kawasan ekowisata; dan
- d. penggalian potensi kawasan ekowisata baru.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan dan/atau badan hukum; atau
 - b. pemerintah daerah.
- (2) Pemanfaatan ekowisata yang dilakukan oleh perseorangan dan/atau badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan ekowisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk memberikan kemudahan kepada perseorangan dan/atau badan hukum.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 10

Pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan antara lain terhadap:

- a. fungsi kawasan;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pembangunan sarana dan prasarana;
- d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis; dan
- e. kelestarian kawasan ekowisata.

Pasal 11

Pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui:

- a. pemberian izin pengembangan ekowisata;
- b. pemantauan pengembangan ekowisata;
- c. penertiban atas penyalahgunaan izin pengembangan ekowisata; dan
- d. penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan ekowisata.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Ekowisata sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata di provinsi.
- (2) Tim Koordinasi Ekowisata dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Ekowisata sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata di kabupaten/kota.
- (2) Tim Koordinasi Ekowisata dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 14

Susunan kepengurusan Tim Koordinasi Ekowisata di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- b. Sekretaris : Kepala Dinas/lembaga yang membidangi pariwisata
- c. Anggota : Kepala SKPD terkait, asosiasi pengusaha pariwisata, tenaga ahli, akademisi yang berpengalaman, dan masyarakat yang diperlukan.

Pasal 15

Susunan kepengurusan Tim Koordinasi Ekowisata di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota
- b. Sekretaris : Kepala Dinas/lembaga yang membidangi pariwisata
- c. Anggota : Kepala SKPD terkait, asosiasi pengusaha pariwisata, tenaga ahli, akademisi yang berpengalaman, dan masyarakat yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) berkedudukan pada dinas/lembaga yang membidangi pariwisata.
- (2) Staf sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai yang berasal dari SKPD yang membidangi pembangunan daerah dan pariwisata yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Ekowisata;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Tim Koordinasi Ekowisata; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (2) Kepala sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Tim Koordinasi Ekowisata.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan pengembangan ekowisata.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

- c. pemberian dana stimulan; dan atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis, dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 19

Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.

1. Pasal 21

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan melalui kegiatan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader

Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata di kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Bupati/Walikota melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun pada bulan Februari dan Agustus atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata di provinsi dan mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Gubernur melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun pada

bulan Maret dan September atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 24

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengembangan ekowisata di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman pengembangan ekowisata;
 - b. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan pembinaan pengembangan ekowisata di daerah secara nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pengembangan ekowisata di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pengembangan ekowisata di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2009

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
 - c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
 - d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisata;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas

- kerja.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
 13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
 15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;

- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 9

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

BAB VI USAHA PARIWISATA

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
 - i. konferensi, dan pameran;
 - j. jasa informasi pariwisata;
 - k. jasa konsultan pariwisata;
 - l. jasa pramuwisata;
 - m. wisata tirta; dan
 - n. spa.
- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak

sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam
- b. berusaha di bidang kepariwisataan;
- c. membentuk dan menjadi anggota asosiasi
- d. kepariwisataan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan

- yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan

- keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan,

keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
- b. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- c. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan daya tarik wisata nasional;
- e. menetapkan destinasi pariwisata nasional ;
- f. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- g. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- h. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali;
- i. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
- j. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
- k. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
- m. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- n. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 31

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarkan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis

lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.

- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Pasal 34

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pasal 36

- (1) Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 37

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 38

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 40

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia

dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 41

- (1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berasal dari:

- a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 45

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota.

Pasal 46

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 47

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 48

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas:
 - a. pengusaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia;
 - b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan

- kepariwisataan;
- d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarkan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 53

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 56

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 58

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 60

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 61

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 63

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus telah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

- (1) Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Pemerintah.
- (2) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan

dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3427), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan



Penerbit
Paramedia Komunkatama
Jl. Suryalaya Barat I No. 4C
Bandung, Jawa Barat
40265

ISBN 978-623-91830-6-6 (PDF)

